

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**HANIF NAWANIR
L4D 001 201**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

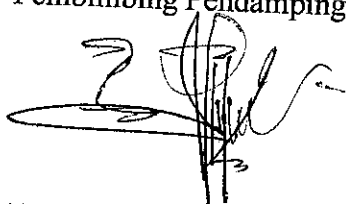
HANIF NAWANIR
L4D001201

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal Mei 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

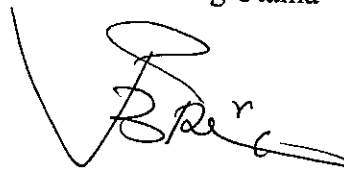
Semarang, Mei 2003

Pembimbing Pendamping



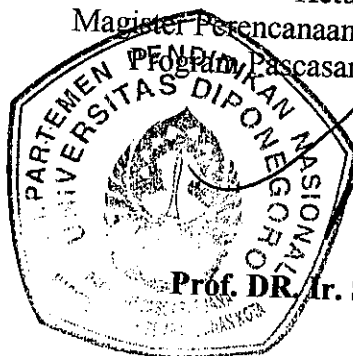
SAMSUL MA'RIF, SP.MT

Pembimbing Utama



PM. BROTOSUNARYO, SE.MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

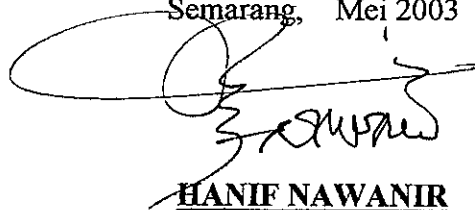


Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Mei 2003



HANIF NAWANIR

NIM : L4D 001 201

" ... dan apabila dikatakan : Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat... "

(QS. Al-Mujadalah:11)

*" Barangsiapa menghendaki akhirat,
hendaklah dicapai dengan ilmu.
Barangsiapa menghendaki dunia,
Hendaklah itu dicapai dengan ilmu "*

(Hadist Riwayat : Bukhari-Muslim)

*"Manis gula rasa sinyaman,
manis mata lihat pandangan.
Ilmu pengetahuan penerang jalan
intan insani sepanjang zaman"*

Tesis ini kupersembahkan untuk :

AYAHANDA TERCINTA H. NAWANIR, IBUNDA SYAHMENAR,
KAKAK-KAKAK : UNI FATMAYARNIS & DA CEP,
AIS & NI LEN DAN ADIKKU GUSMAN,
SERTA KEPONAKAN YANG LUCU,
SELALU MEMBERI KECEKILAN :
LANGGENG, UPI, GEMA DAN PUJI

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang demikian dalam tercurah hanya untuk Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan izin-Nyalah tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis yang berjudul “**Studi Pengembangan Ekonomi dan Keruangan Kota Sawahlunto Pascatambang**” ini dipilih berdasarkan pemikiran bahwa secara riil keberadaan dan keberlanjutan Kota Sawahlunto terancam seiring habisnya cadangan tambang batubara yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian kota ini, fenomena *ghost town* merebak di kalangan pemerhati kota. Sebagai Kota Tambang tertua di Indonesia, maka ini merupakan kekayaan sejarah yang perlu dilestarikan. Untuk itulah penulis mencoba meneliti kecenderungan perkembangan kotanya dan mencari basis pengembangannya pascatambang tersebut, yang ditinjau dari aspek ekonomi dan spasial. Aspek ekonomi dan spasial tidak dapat dipisahkan dalam suatu analisis wilayah dan merupakan primary aspect dalam pembangunan di mana saja dan kapan saja.

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak PM. Brotosunaryo, SE.MSP selaku Mentor dan Bapak Samsul Ma'rif, SP.MT selaku Co-Mentor yang senantiasa memberi bimbingan dan masukan dalam proses penulisan tesis ini,
2. Bapak DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc dan M. Mukti Ali, SE.MSi selaku penguji dan pembahas dalam sidang pembahasan dan ujian tesis yang juga banyak memberi masukan dalam penyelesaian tesis ini,
3. Bapak Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan Kota Sawahlunto yang telah memberi izin untuk mengikuti Program Magister ini,
4. Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Keahlian Teknik (PUSDIKTEK) yang telah memberi tunjangan belajar sampai selesainya studi ini,
5. Ayahanda H. Nawadir, BA dan Ibunda Syahmenar dengan segala kasih sayang dan do'a sampai penulis menyelesaikan studi ini,
6. Kakak-kakak tersayang Uni Fatmayarnis dan Da Cep, Ais dan Ni Len, adikku tercinta Gusman atas segala dukungan dan do'anya, serta keponakan yang selalu memberi keceriaan disaat-saat sulit,
7. Rekan-rekan di Pemda Kota Sawahlunto: Nova, Dewi, Vera, Riri dan lainnya yang sangat banyak memberi dukungan,
8. Rekan-rekan MPPWK 2001 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu, berdiskusi dalam membahas materi tesis ini, juga rekan-rekan MPPWK 2002
9. Rekan-rekan Wisma Sipodang 8 : P'Ojir, P'Dwan dan P'Air untuk jalinan persaudaraan serta hiburan-hiburannya.

Penulis berdo'a semoga semua jerih payah yang telah diberikan dibalasi Allah SWT dengan balasan yang setimpal, Amin ...

Terakhir, tiada gading yang tak retak, tesis ini tentunya jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan di kemudian hari, sehingga dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	10
1.3.1 Tujuan Studi	10
1.3.2 Sasaran Studi	10
1.4 Ruang Lingkup	10
1.4.1 Ruang Lingkup Sustansial	11
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	11
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Pendekatan dan Metodologi Penelitian	17
1.6.1 Pendekatan Studi	17
1.6.2 Metoda Penelitian	17
1.6.3 Jenis dan Kebutuhan Data.....	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	20
1.6.5 Teknik Sampling	21
1.6.6 Metoda dan Alat Analisis	23
1.7 Sistematika Penulisan	27

BAB II	TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA	29
2.1	Regenerasi Kota	29
2.2	Perkembangan Kota-Kota Khusus	31
2.2.1	Kota Rhondda Valley	31
2.2.2	Kota Nova Scotia	33
2.2.3	Kota Petaling Jaya dan Sungei Besi	34
2.3	Pola Perkembangan Kota Secara Umum	35
2.4	Pengembangan Wilayah.....	38
2.5	Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah	41
2.5.1	Pusat-Pusat Pertumbuhan	41
2.5.2	Pengembangan Ekonomi Lokal	45
2.5.3	Strategi Pengembangan Ekonomi	48
2.5.3.1	Location Quotient Analysis (LQ).....	48
2.5.3.2	Shift-Share Analysis.....	51
2.5.4	Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah	53
2.5.5	Pengembangan Wilayah Berbasis Kompetisi.	56
2.6	Pengembangan Ruang Terpadu	57
2.7	Konsep Spasial dalam Lingkup Wilayah	58
2.8	Aspek-Aspek Pengembangan Wilayah	59
2.9	Rangkuman Kajian Teori	61
BAB III	GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO	63
3.1	Sejarah Kota Sawahlunto	63
3.2	Gambaran Umum Wilayah Kota Sawahlunto.....	67
3.2.1	Kondisi Fisik	67
3.2.2	Penyebaran Penduduk dan Pola Perkotaan	68
3.2.3	Kondisi Perekonomian Kota Sawahlunto	71
3.2.3.1	Pertumbuhan Sektoral	72
3.2.3.2	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam Perekonomian Daerah.....	73
3.2.3.3	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita.....	75
3.2.3.4	Perkembangan Kelompok Sektor PDRB.	77
3.2.3.5	Posisi Perekonomian Kota Sawahlunto terhadap Propinsi Sumatera Barat	79

3.2.3.6 Potensi Wisata Kota Sawahlunto	80
3.3 Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto.....	86
3.3.1 Rencana Pengembangan Wilayah	86
3.3.2 Rencana dan Eksisting Tata Guna Lahan	89
3.3.3 Alokasi Pemanfaatan Ruang	91
BAB IV ANALISIS DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG	93
4.1 Analisis Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang	93
4.1.1 Kota Sawahlunto Sebagai Kota Tambang	93
4.1.2 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kota Sawahlunto	95
4.1.2.1 Analisis Ekonomi Basis.....	95
4.1.2.2 Analisis Kinerja Perekonomian Kota Sawahlunto.....	97
4.1.3 Analisis Wilayah Perencanaan Kota Sawahlunto	109
4.1.3.1 Penentuan Hirarki Kota Sawahlunto	109
4.1.3.2 Penentuan Wilayah Pengaruh Kota Sawahlunto	112
4.1.4 Analisis Perkembangan Ruang Kota Sawahlunto	117
4.1.4.1 Perubahan Penggunaan Lahan.....	117
4.1.4.2 Kecenderungan Perkembangan Kota Sawahlunto	121
4.1.5 Analisis Pengembangan Sesuai Wilayah Perencanaan	123
4.2 Arahan Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang	134
4.3 Spesifikasi Kawasan Pengembangan.....	157
4.3.1 Kawasan Kota Lama	157
4.3.2 Kawasan Salak	158
4.4 Operasionalisasi Konsep Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang.....	159
BAB V PENUTUP	169
5.1 Kesimpulan	169
5.2 Rekomendasi	171
DAFTAR PUSTAKA	174
RIWAYAT HIDUP PENULIS	178
LAMPIRAN	179

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.1 Peran Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 1997 dan 2000	5
TABEL I.2 Kebutuhan Data Penelitian	19
TABEL III.1 Luas Kota Sawahlunto Menurut Kemiringan	68
TABEL III.2 Kontribusi Sektoral PDRB Kota Sawahlunto Tahun 1995 – 2001.....	75
TABEL III.3 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Sawahlunto Tahun 1997-2000	76
TABEL III.4 Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999-2000.....	78
TABEL III.5 Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999-2000	78
TABEL III.6 Posisi Perekonomian Kota Sawahlunto terhadap Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2000	79
TABEL III.7 Alokasi Pemanfaatan Ruang Kota Sawahlunto	91
TABEL IV.1 Perhitungan LQ PerSub-Sektor Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 1997 dan 2001 Tanpa Sub-Sektor Batubara	96
TABEL IV.2 Perubahan PDRB Non Tambang Batubara Kota Sawahlunto Tahun 1997 dan 2001	98
TABEL IV.3 Hasil Perhitungan Komponen KPW, KPP, KPK dan PN	99
TABEL IV.4 Keterangan Nilai–Nilai KPP dan KPK.....	102
TABEL IV.5 Representasi Nilai KPP dan KPK.....	102
TABEL IV.6 Nilai Absolut Komponen KPW, KPP, KPK dan PEK ..	104
TABEL IV.7 Penentuan Sektor Ekonomi Strategis Kota Sawahlunto Tanpa Sub-Sektor Pertambangan Batubara.....	105
TABEL IV.8 Hirarki Kota Sawahlunto	110
TABEL IV.9 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Sawahlunto Tahun 1995 – 2001	117
TABEL IV.10 Aktivitas Ekonomi dan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 1995-2001	122
TABEL IV.11 Hasil Perhitungan LQ dan Shift-Share BWP I	124
TABEL IV.12 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan BWP I	124
TABEL IV.13 Hasil Perhitungan LQ dan Shift-Share BWP II	126
TABEL IV.14 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan BWP II	127
TABEL IV.15 Hasil Perhitungan LQ dan Shift-Share BWP III.....	128

TABEL IV.16 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan BWP III	129
TABEL IV.17 Hasil Perhitungan LQ dan Shift-Share BWP IV	130
TABEL IV.18 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan BWP IV	131
TABEL IV.19 Sintesis Analisis Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang	135
TABEL IV.20 Prioritas Kriteria Pengembangan Kota Sawahlunto	140
TABEL IV.21 Prioritas Kriteria Aspek Ekonomi	141
TABEL IV.22 Prioritas Kriteria Aspek Sosial Budaya	142
TABEL IV.23 Prioritas Kriteria Aspek Fisik	143
TABEL IV.24 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Pendapatan Daerah	144
TABEL IV.25 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Pendapatan Masyarakat.....	145
TABEL IV.26 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Kesempatan Kerja	146
TABEL IV.27 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Kelembagaan ..	146
TABEL IV.28 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Pendidikan	147
TABEL IV.29 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Keterkaitan Wilayah	148
TABEL IV.30 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Tata Guna Lahan	149
TABEL IV.31 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Ketersediaan Prasarana dan Sarana.....	149
TABEL IV.32 Prioritas Strategi Berdasarkan Kriteria Kelestarian Lingkungan.....	150
TABEL IV.33 Bobot Akhir Alternatif Strategi	151
TABEL IV.34 Rancangan Program Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang.....	165

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Peta Orientasi Kota Sawahlunto.....	12
GAMBAR 1.2 Peta Administrasi Kota Sawahlunto	13
GAMBAR 1.3 Skema Kerangka Pemikiran Strategi Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang.....	16
GAMBAR 2.1 Pola Umum Perkembangan Perkotaan.....	36
GAMBAR 2.2 Beberapa Alternatif Bentuk Kota	38
GAMBAR 2.3 Strategi Pembangunan dan Sumber Daya Lokal Yang Diandalkan.....	55
GAMBAR 3.1 Peta Kota Sawahlunto Sebelum Perluasan Tahun 1990	66
GAMBAR 3.2 Perkembangan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 1997-2000.....	72
GAMBAR 3.3 Kontribusi (%) Sektor-Sektor dalam Pembentukan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000 (dengan Batu Bara).....	73
GAMBAR 3.4 Kontribusi (%) Sektor-Sektor dalam Pembentukan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000 (tanpa Batu Bara).....	74
GAMBAR 3.5 Situs Tambang Terbuka dan Kegiatan Tambang Dalam	80
GAMBAR 3.6 Instalasi Pemrosesan Batubara	81
GAMBAR 3.7 Instalasi Pengangkutan Batubara	81
GAMBAR 3.8 Kesenian Tradisional yang Tetap Bertahan	82
GAMBAR 3.9 Peta Rencana Pengembangan Wilayah Kota Sawahlunto	88
GAMBAR 3.10 Peta Guna Lahan Eksisting Kota Sawahlunto Tahun 2001.....	91
GAMBAR 4.1 Peta Wilayah Pengaruh	114
GAMBAR 4.2 Peta Bagian Wilayah Pengembangan	116
GAMBAR 4.3 Peta Guna Lahan Kota Sawahlunto Tahun 1995	118
GAMBAR 4.4 Peta Guna Lahan Kota Sawahlunto Tahun 2001	119
GAMBAR 4.5 Peta Arah Perkembangan Keruangan Kota Sawahlunto	120
GAMBAR 4.6 Peta Sektor Ekonomi Unggulan	133
GAMBAR 4.7 Pembangunan Kota Sawahlunto dengan Sumber Daya Lokal yang Diandalkan	137
GAMBAR 4.8 Diagram Keputusan Arah Pengembangan	139
GAMBAR 4.9 Peta Arah Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang.....	156

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A. Garis Besar Wawancara	179
LAMPIRAN B. Kuesioner Penelitian	182
LAMPIRAN C. Kompilasi Data Hasil AHP	191
LAMPIRAN D. Hasil Perhitungan AHP	196
LAMPIRAN E. Data Sekunder	202
TABEL E.1 PDRB Kota Sawahlunto dan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Tanpa Sub-Sektor Batubara	202
TABEL E.2 Penggunaan Lahan Kota Sawahlunto Tahun 1995....	203
TABEL E.3 Penggunaan Lahan Kota Sawahlunto Tahun 2001....	203
TABEL E.4 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Silungkang Tahun 2000	204
TABEL E.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Lembah Segar Tahun 2000	204
TABEL E.6 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Barangin Tahun 2000	204
TABEL E.7 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Talawi Tahun 2000	204
TABEL E.8 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Silungkang Tahun 2001	205
TABEL E.9 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Lembah Segar Tahun 2001	205
TABEL E.10 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Barangin Tahun 2001	205
TABEL E.11 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kecamatan Talawi Tahun 2001	205
TABEL E.12 Tenaga Kerja BWP I Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2000-2001	206
TABEL E.13 Tenaga Kerja BWP II Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2000-2001	206
TABEL E.14 Tenaga Kerja BWP III Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2000-2001	206
TABEL E.15 Tenaga Kerja BWP IV Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2000-2001	206

LAMPIRAN F. Hasil Perhitungan LQ Per-BWP Tahun 2000-2001	207
TABEL F.1 LQ Per-Sektor BWP I Tahun 2000-2001	207
TABEL F.2 LQ Per-Sektor BWP II Tahun 2000-2001	207
TABEL F.3 LQ Per-Sektor BWP III Tahun 2000-2001	207
TABEL F.4 LQ Per-Sektor BWP IV Tahun 2000-2001	207
TABEL F.5 Hasil Perhitungan Shift-Share BWP I	208
TABEL F.6 Hasil Perhitungan Shift-Share BWP II	208
TABEL F.7 Hasil Perhitungan Shift-Share BWP III	208
TABEL F.8 Hasil Perhitungan Shift-Share BWP IV	208
LAMPIRAN G. Perhitungan Hirarki	209
TABEL G.1 Pembobotan Skalogram Guttman	209
TABEL G.2 Hirarki Berdasarkan Jumlah Penduduk	210
TABEL G.3 Hirarki Berdasarkan Jumlah Fasilitas, Aksesibilitas dan Kebijakan	211
TABEL G.4 Hirarki Kota Sawahlunto Berdasarkan Metoda Skalogram Guttman	212
LAMPIRAN H. Foto - Foto	213
GAMBAR H.1 Kawasan Wisata Sunway Lagoon di Selangor.....	213
GAMBAR H.2 Kantor Pusat PT. BA UPO	214
GAMBAR H.3 Patung Pekerja Tambang Ombilin	214
GAMBAR H.4 Aktivitas Penambangan Dalam dan Terbuka, serta Lobang Tambang Sukosari	215
GAMBAR H.5 Stasiun Kereta Api dan Bekas Asrama Pekerja Tambang.....	215

ABSTRAK

Sumber daya alam (natural resources) merupakan sumber penggerak perekonomian suatu wilayah, terutama pada awal-awal keberadaannya. Kekayaan sumber daya alam merupakan initial investment dalam pembangunan. Harus disadari bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak akan menjamin keberlanjutan wilayah tersebut dalam jangka panjang. Banyak kota dan daerah yang mati karena habisnya sumber daya alam yang dimiliki. Namun banyak pula yang mampu memanfaatkan peninggalan dan sisa-sisa eksploitasi sumber daya alamnya menjadi objek yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti Kota Rhondda Valley di Wales dan Glace Bay Nova Scotia di Kanada, yang merupakan kota wisata bekas pertambangan batubara. Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota yang sedang menghadapi fenomena semacam itu. Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan batubara semenjak zaman Hindia Belanda, sehingga terkenal sebagai kota tambang. Perkembangannya sangat tergantung dengan aktivitas tambang tersebut, namun sebagai sumber daya yang bersifat non-renewable, setelah dieksploitasi lebih dari seratus tahun, akhirnya cadangan tambangnya habis dan aktivitas pertambangan berhenti, sehingga keberlanjutan kotanya terancam, muncullah fenomena ghost town.

Habisnya sumber daya penggerak perekonomian wilayah bukanlah berarti kehancuran. Dalam menghadapi fenomena tersebut, Kota Sawahlunto harus menyusun suatu strategi yang bisa dijadikan acuan dan pedoman dalam menyongsong pembangunannya ke depan. Masih banyak sumber-sumber potensial yang bisa dimanfaatkan, baik dari sisi ekonomi maupun spasial.

Berhentinya aktivitas pertambangan di Kota Sawahlunto, harus diantisipasi dengan mencari dan menemukan sektor ekonomi lain yang bisa menggantikan peran pertambangan batubara. Dari hasil Analisis Economic : Location Quotient, Shift-Share dan Multiplier serta Analisis Spasial, maka didapatkan sektor yang bisa menggantikan peran pertambangan batubara adalah sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Namun menetapkan sektor tersebut sebagai basis strategi belumlah sesuai, tanpa memperhatikan dinamika dan perkembangan yang terjadi di Kota Sawahlunto sendiri. Dinamika yang berkembang saat ini adalah upaya memanfaatkan sisa-sisa bekas aktivitas pertambangan sebagai objek wisata, sehingga ditetapkanlah visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang tahun 2020. Dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process untuk menilai tingkat persepsi stakeholder kotanya terhadap rancangan strategi yang dibuat, maka strategi pengembangan Kota Sawahlunto pasca tambang adalah pengembangan sektor pariwisata berbasis wisata tambang yang didukung oleh sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif, yaitu sektor industri pengolahan dan jasa-jasa.

Konsekuensi sebagai sektor yang menjadi unggulan dan diharapkan dapat menggantikan peran sektor pertambangan batubara dalam kemajuan daerahnya adalah setiap program pembangunan yang ada harus diprioritaskan untuk kemajuan dan menunjang sektor tersebut, yaitu dengan arahan mulai dari Rakorbangdes sampai tingkat kota. Program wisata tambang harus disosialisasikan pada masyarakat melalui billboard yang dipasang di tempat umum atau pertemuan-pertemuan khusus berupa lokakarya dan seminar tentang wisata pertambangan ini, sehingga kemajuan daerah dan masyarakat yang dicita-citakan dapat tercapai. Suatu tantangan tentunya bagi Pemerintah Kota Sawahlunto.

ABSTRACT

Natural resources was the generator of regional economics in its presences and also the initials investment of development. As recognition, the dependence on natural resources would not guaranteed the regional sustainability in long term. In this case, extinction happened by used up of natural resources in rural and urban areas. However, many had the ability to advantage inheritances and left over of natural resources exploitation as an object with high economic value, for example the city of Rhondda Valley in Wales and Glace Bay Nova Scotia in Canada, the former coal mining fields that become tourism cities. Sawahlunto Municipality was one city that experiences this phenomena, as a growing and developing city to the presence of coal mining activities since the dutch time and known as Mine City. Its development were dependable to the existences of mining activities, yet a non-renewable natural resources exploitation for a century, would used up all mines reservation and end the activities, until then the sustainability of city would be threaten, and emerge a "ghost town" phenomena.

Used up and an end to the resources of regional economics generator could not be claimed as chaos. Facing this phenomena, Sawahlunto should arranged strategies as references and guidance for the development afterward. In fact, many potential resources of the areas could be advantaged, economically and spatially.

An end to the mining activities in Sawahlunto should be anticipated by a search and findings in other economic sectors so it would be able to replace the role of coal-mining activities. Result from the economic base analysis, location quotient, shift-share and multiplier also spatial analysis, shows findings on manufacturing and services industries as sectors that was able to replace the role of coal mining. However, establishment of these sectors as a basic strategy of regional economic would not be appropriate without observation on the dynamic and development of Sawahlunto itselfs. The dynamics these days developed to the attempt of taking advantage of left overs from the former mining activities fields as tourism object. For this reason, Sawahlunto Municipality perspective was the establishment of Mine Tourism City in Years 2020. Analytic hierarchy process was used to value the level of perception of the stakeholders for their city, concerning the development strategy of Sawahlunto from the former mining activities, shows result on the development of mine tourism economic base supported by sectors of competitive advantage on manufactures and services industries.

Consequences for these sectors of qualified and expectation to replace the role of coal mining sector for the regional advancement was that every existing development programs should gave priority to the advancement and supporting sectors, by assesing guidance establishment on the development meetings in the village level (Rakorbangdes) to city level. The program of mine tourism should be socialize to the community through billboards in public spaces or special occasion such as meetings, workshops, and seminar concerning mining tourism, so the regional and community advancement of what was expected could be reached. This was a challenge, of course, for the government of Sawahlunto.

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan salah satu modal keberlanjutan kehidupan manusia, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Sumber daya alam (*natural resources*) adalah sumbangan bumi berupa benda hidup maupun benda mati yang bisa dieksploitasi secara langsung atau tidak langsung oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan mentah dan energi (Yakin, 1997:28). Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sumber daya alam menjadi salah satu faktor produksi yang menentukan jalannya siklus perekonomian.

Kegiatan pembangunan selalu berkaitan dengan pemanfaatan suatu sumber daya alam. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam, makin efisien dan efektif pemanfaatan sumber daya alam tersebut, makin besarlah harapan akan tercapainya kehidupan ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi, maka perencanaan penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan dengan lebih cermat, memperhitungkan hubungan-hubungan ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat yang merugikan kelangsungan pembangunan secara menyeluruh (Soerjani, 1987:29)

Kenyataannya, pembangunan yang terlalu bertumpu pada sumber daya alam yang bersifat ekstraktif ini, suatu saat akan mengalami hambatan jika ketersediaanya berkurang dan akhirnya habis. Kelangkaan sumber daya alam menjadi problema tersendiri dalam perkembangan negara-negara dan kota-kota dunia. Banyak kota dan daerah yang kaya sumber daya alam, seperti batubara, emas, tembaga dan sebagainya,

kemudian menjadi mati setelah sumber daya alamnya habis dieksploitasi. Namun ada juga daerah-daerah yang mampu memanfaatkan dan mengelola sisa-sisa aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebut, sehingga tetap memberi nilai ekonomi yang tinggi, bahkan dicari dan diteliti karena kekhasannya, seperti Kota Rhondda Valley di Wales dan Glace Bay Nova Scotia di Kanada, yang merupakan kota bekas pertambangan batubara. Bekas lubang tambangnya dijadikan museum, permukiman buruhnya dipugar dan dikenang sebagai warisan masa lampau (Antono, 1993:13).

Paradigma pembangunan di Indonesia selama ini yang bertujuan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada. Hal ini diperparah oleh sistem pemerintahan sentralistik yang menyebabkan daerah-daerah kaya sumber daya tidak mendapat bagian yang seimbang dari apa yang telah diberikan. Ketidakpuasan atas kegagalan sistem dan paradigma pembangunan yang ada, telah menyebabkan munculnya paradigma baru yang lebih bertanggung jawab dan menjamin keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan, seperti pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang lebih memandang keberadaan sumber daya alam sebagai warisan anak cucu.

Perubahan paradigma pembangunan itu juga berpengaruh pada masalah alokasi sumber daya secara spasial, khususnya yang menyangkut pembangunan antara kawasan perkotaan yang bercorak industri dan jasa-jasa dengan wilayah perdesaaan yang didominasi oleh sektor primer dan pertanian.

Seiring dengan semangat otonomi daerah sekarang ini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam membangun dan

menciptakan keberlanjutan daerahnya, sehingga menuntut penggalan potensi daerah (*resource endowment*) semaksimal mungkin, untuk dapat menentukan keberlanjutan daerah tersebut.

Setiap tahapan pembangunan, antara lain dicirikan oleh pengorganisasian tata ruang kegiatan ekonomi dan sosial yang akan memberi tekanan pada kebijakan regional. Daerah-daerah mempunyai sistem pengelolaan sumber dayanya sendiri-sendiri, yang akan menunjukkan kemampuannya mengembangkan produktivitasnya (Warpani, 1984:67). Dalam mencapai tujuan pembangunan diperlukan banyak dialog antara pihak pemerintah dan golongan-golongan yang mewakili kepentingan masing-masing (*stakeholder*) untuk mengemukakan preferensi mereka. Hasilnya diharapkan akan membuahkan upaya-upaya pembangunan yang mengarah pada peningkatan efisiensi, pemerataan dan keberlanjutan serta memberi panduan pada alokasi sumber daya. Terjadinya kelangkaan berbagai sumber daya, sering memerlukan sumber daya dari luar, seperti barang-barang modal dan keterampilan untuk diinvestasikan guna mengembangkan infrastruktur ekonomi, sosial dan menjaga lingkungan kota dan daerah.

Upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu kota atau wilayah memerlukan berbagai kegiatan investasi. Kegiatan tersebut akan melibatkan hubungan-hubungan interdependensi antara kegiatan manusia dengan sesamanya melalui suatu pemanfaatan sumber daya, sehingga dari hasil aktivitas tersebut diharapkan dapat diperoleh manfaat atau nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dimasa sekarang maupun masa-masa yang akan datang secara berkelanjutan (*sustainability*).

Secara ekonomi, sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh Hicks, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang menghasilkan pendapatan dan kemudian dipergunakan menjadi barang-barang yang dikonsumsi pada masa kini, jangan sampai mengganggu potensi pendapatan (dari sumber daya modal) untuk generasi yang akan datang, yang dapat menurunkan kapasitas dari sumber daya tersebut. Pendapatan yang berbasis kepada pengurusan modal, seperti *natural capital* tidak akan mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Anwar, 1999:5).

Demikian juga halnya dengan keberlanjutan suatu kota dan wilayah. Disadari memang, bahwa tidak semua wilayah mempunyai sumber daya yang dapat menopang kehidupan dan keberlanjutannya. Demikian banyak bentuk kota yang mencirikan karakteristik kota tersebut, seperti kota tambang, kota industri, kota wisata dan lain sebagainya, yang terutama menunjukkan dominasi suatu kegiatan di kota tersebut, baik kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi. Kota tambang adalah kota yang aktivitas ekonomi dan sosialnya didominasi oleh kegiatan pertambangan. Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota dengan ciri tersebut, dimana kegiatan ekonominya didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara, sehingga terkenal dengan sebutan *Kota Tambang*.

Kota Sawahlunto yang tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan, sehingga tak pelak lagi semua perikehidupan masyarakat dan daerahnya sangat tergantung dengan aktivitas tersebut. Sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebesar 5.049 orang. Bandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya 50.875 orang dan jumlah rumah tangga sebanyak 12.875 rumah tangga. Diperkirakan hampir separuh penduduk Kota Sawahlunto menggantungkan hidupnya dari hasil pertambangan

batubara tersebut. Memang secara umum dampak dan hasil yang didapat dari pertambangan ini sangat signifikan bagi masyarakat. PDRB perkapita relatif sangat tinggi, mencapai Rp 9,1 juta jauh di atas PDRB perkapita Propinsi Sumatera Barat dan Nasional yang hanya Rp 4,5 juta dan Rp 5,5 juta (tahun 1999) dan kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan mencapai Rp 220,9 milyar (Wirawan, 2001:155).

TABEL I.1
PERAN SEKTOR KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PDRB
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 1997 DAN 2000
BERDASARKAN HARGA KONSTAN 1993 (JUTAAN RUPIAH)

NO	SEKTOR EKONOMI	P D R B			
		1997	Peran (%)	2000	Peran (%)
1	Pertanian	8,757.12	3,66	8,242.58	4,24
2	Pertambangan	115,820.07	48,46	72,845.15	37,48
3	Industri Pengolahan	18,676.72	7,81	18,125.34	9,33
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1,145.21	0,48	882.22	0,45
5	Bangunan	12,126.26	5,07	10,623.29	5,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,572.11	8,61	16,710.99	8,60
7	Angkutan dan Komunikasi	15,961.84	6,68	14,313.48	7,36
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,354.02	3,50	7,800.55	4,01
9	Jasa-Jasa	37,574.67	15,72	44,825.61	23,06
	Jumlah PDRB	238,988.02	100	194,369.21	100

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto. 2000

Data PDRB Kota Sawahlunto tahun 2000 di atas memperlihatkan bahwa peranan sektor pertambangan terhadap total PDRB sangat besar, yaitu mencapai 48,46 persen tahun 1997, namun menurun menjadi 37,48 persen tahun 2000. Ini diakibatkan semakin berkurangnya produksi batubara dari tahun ke tahun, seiring dengan menipisnya cadangan batubara yang ada, namun secara keseluruhan peranannya masih sangat besar.

Usaha pertambangan batubara merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Cadangan batubara Kota Sawahlunto yang ada sudah sangat menipis. Perkiraan cadangan batubara tertambang tahun 2002 tinggal sebesar 1,8 juta ton dengan volume produksi pertahun 1 juta ton, maka sekitar Tahun 2003 ini cadangan batubaranya akan habis (Ibid, Wirawan:156).

PT. Bukit Asam yang memegang kuasa pertambangan selama ini telah mengantisipasi kehabisan cadangan tambang tersebut dengan melakukan efisiensi produksi dan membuat kebijakan pensiun dini terhadap hampir separuh karyawannya yang berjumlah 1.373 orang. Sementara asset-asset bergerak, seperti mobil dan alat-alat berat lainnya telah ditarik ke Tanjung Enim Sumatera Selatan (Mimbar Minang, 2002). Dari kondisi ini perlu disiasati sumber penggerak perekonomian yang lain, agar keberlanjutan Kota Sawahlunto dapat terus terjamin.

Hubungan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar tambang dikenal sebuah ungkapan "*ghost town*". Ungkapan ini untuk menggambarkan matinya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat, karena terhentinya sebuah aktivitas pertambangan. Komunitas atau masyarakat tiba-tiba menjadi sepi, sehingga disebut sebagai *ghost town* (Zulkarnain, 1999:4).

Berhentinya kegiatan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto bukanlah akhir dari eksistensi kota ini, namun yang diperlukan adalah inovasi, kreativitas dan kerja keras. Banyak daerah dan kota-kota yang miskin sumber daya alam, namun bisa lebih maju dari daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Dalam dunia yang semakin modern ini pengembangan sumber daya manusia lebih utama dari sumber daya alam, sehingga sumber daya untuk pembangunan lebih dapat diciptakan (Opcit, Mimbar Minang).

Kegiatan pertambangan dilihat dari sudut spasial, akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan fisik kotanya. Perkembangan kota akan terhambat secara fisik karena adanya areal pertambangan. Menurut Bintarto (1978), ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik suatu kota, seperti daerah perbukitan, lautan dan rintangan-rintangan alam lainnya. Ini dapat menghentikan laju perkembangan area kota. Di samping faktor topografi, geologi, geomorfologi dan tanahnya. Permasalahan kepemilikan tanah merupakan masalah tersendiri bagi Kota Sawahlunto, karena 35 persen lebih wilayahnya dikuasai oleh Kuasa Pertambangan Ombilin, tanah negara hanya 0,11 persen dan sisanya merupakan tanah ulayat (Sawahlunto dalam Angka, 2000:15).

Memperhatikan fenomena tersebut, kiranya menarik dan perlu dibuat suatu kajian arahan pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang, sehingga saat aktivitas pertambangan tidak dapat menghasilkan lagi, Kota Sawahlunto kelak memiliki konsep pengembangan kota yang sesuai dengan aktivitas basis ekonominya.

1.2 Perumusan Masalah

Kota Sawahlunto yang tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan batubara, sehingga peranan sektor ini terhadap perekonomian kotanya secara keseluruhan sangat besar. Sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebesar 5.049 orang. Dalam PDRB peranannya mencapai 37,48 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 1997 yang mencapai 48,46 persen. Sedangkan PDRB perkapita relatif sangat tinggi, mencapai Rp 9,1 juta jauh di atas PDRB perkapita Propinsi Sumatera Barat dan Nasional yang hanya Rp 4,5 juta dan Rp 5,5 juta (tahun 1999) dan kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan mencapai Rp 220,9 milyar.

Pendapatan masyarakat yang demikian tinggi tidak dibelanjakan kembali di tempat asal pendapatan tersebut diperoleh (Kota Sawahlunto), namun dihabiskan di luar daerah, seperti Kota Padang, Bukit Tinggi, Solok dan sebagainya. Padahal tingkat konsumsi masyarakatnya tergolong tinggi. Ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana perbelanjaan dan jenis barang yang diperdagangkan. Dampak akhirnya adalah mengalirnya asset yang seharusnya ditanam kembali di Kota Sawahlunto ke daerah lain, sehingga secara tidak langsung akan sangat merugikan.

Usaha pertambangan batubara khususnya, merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Cadangan batubara Kota Sawahlunto yang ada sudah sangat menipis, tahun 2003 ini cadangan batubaranya akan habis. Sementara peran sektor pertambangan selama ini secara keseluruhan sangat dominan.

Sebagai langkah antisipatif, dengan memanfaatkan bekas-bekas lobang penggalian tambang dan bangunan-bangunan kuno peninggalan Hindia Belanda, telah dicanangkan Visi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020. Namun agak berlebihan kiranya, karena Kota Sawahlunto bukanlah suatu kota yang memiliki basis pariwisata yang panjang dan memadai. Selama ini yang menjadi daerah tujuan dan prioritas pariwisata di Sumatera Barat adalah Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Solok dan 50 Kota, sehingga promosi pariwisata untuk Propinsi Sumatera Barat lebih banyak untuk daerah-daerah tersebut.

Seperti daerah-daerah lain yang mempunyai lahan pertanian yang luas dan subur, Kota Sawahlunto tidak memilikinya. Luas wilayah yang sempit (27.344 ha atau 273 km²) dan terdapatnya areal pertambangan batubara seluas 16.000 ha, menyulitkan

pengembangan sektor ini. Demikian pula dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka ada beberapa isu yang mengemuka, antara lain berupa sektor-sektor ekonomi penunjang keberlanjutan kota pascatambang yang dapat dikembangkan, dampak perkembangan keruangan Kota Sawahlunto pascatambang dan apa yang dapat dilakukan bagi pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang.

Secara lebih spesifik dalam penelitian ini akan dirumuskan masalah, yaitu Bagaimanakah Arah Pengembangan Ekonomi dan Keruangan Kota Sawahlunto Pascatambang? Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian (*research question*) yang dapat diangkat adalah :

- (a) Sektor-sektor ekonomi apakah yang dapat menunjang keberlanjutan pembangunan Kota Sawahlunto, sebagai akibat bergesernya peran sektor pertambangan batubara dalam perekonomian kota ini, yang mana cadangan tambangnya akan habis tahun 2003 ini ?
- (b) Bagaimana perkembangan spasial Kota Sawahlunto akibat adanya pergeseran sektor ekonomi tersebut ?
- (c) Bagaimana arahan pengembangan ekonomi dan keruangan Kota Sawahlunto pascatambang itu nantinya ?

Dari permasalahan-permasalahan itulah kiranya diperlukan suatu kajian terhadap Arahan Pengembangan Ekonomi dan Keruangan Kota Sawahlunto Pascatambang.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan arahan pengembangan ekonomi dan keruangan Kota Sawahlunto pascatambang, yang hasilnya diharapkan dapat memberi masukan dalam usaha memecahkan permasalahan pembangunan saat ini.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan studi di atas adalah :

- (a) Identifikasi karakteristik Kota Sawahlunto sebagai kota tambang dengan perbandingan kota-kota bekas tambang di dunia.
- (b) Identifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan sebagai alternatif yang dapat menunjang keberlanjutan Kota Sawahlunto pascatambang,
- (c) Identifikasi dan analisis terhadap arah perkembangan ruang Kota Sawahlunto sebagai implikasi dari aktivitas ekonomi unggulan alternatif yang bisa dikembangkan sebagai ekonomi basisnya,
- (d) Menentukan hirarki dan pembagian wilayah perencanaan Kota Sawahlunto sesuai wilayah pengaruhnya,
- (e) Menyusun konsep arahan pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansial bertujuan untuk membatasi materi pembahasan yang berkaitan dengan identifikasi wilayah. Sedangkan ruang lingkup spasial berusaha membatasi lingkup wilayah kajian agar didapatkan hasil sesuai tujuan penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Permasalahan yang diangkat harus jelas dan fokus, untuk itu penulis akan membatasi lingkup materi penelitian ini pada peran sektor pertambangan dalam perkembangan wilayah, sektor-sektor ekonomi strategis non-tambang yang ada dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta sub-sub sektornya dan arah pengembangan wilayahnya dilihat dari sektor tersebut, disertai dengan pola keruangannya dan akhirnya dapat dibuat suatu strategi pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang. Pada analisis ekonomi (LQ, Shift-Share dan Multiplier) nantinya, sub-sektor pertambangan batu bara tidak diperhitungkan dalam sektor pertambangan.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Secara umum penelitian ini berada dalam wilayah administratif Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat. Dipilihnya Kota Sawahlunto sebagai objek penelitian dalam penulisan tesis ini, karena kota ini diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam perkembangannya, seandainya aktivitas pertambangan batubara yang ada habis dan berhenti. Sebagaimana diketahui bahwa peranan sektor ini sangat besar terhadap perekonomian Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto sebagai objek studi mempunyai luas 27.344 ha atau 273 km² terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Barangin, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Silungkang serta terdapat 37 buah desa dan kelurahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup wilayah (spasial) penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2.








**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN RENCANAAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCAKAMBANG

PETA ORIENTASI KOTA SAWAHLUNTO

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten/Kota
-  Jalan
-  Ibu Kota Propinsi
-  Sawahlunto
-  Ibu Kota Kabupaten/Kota

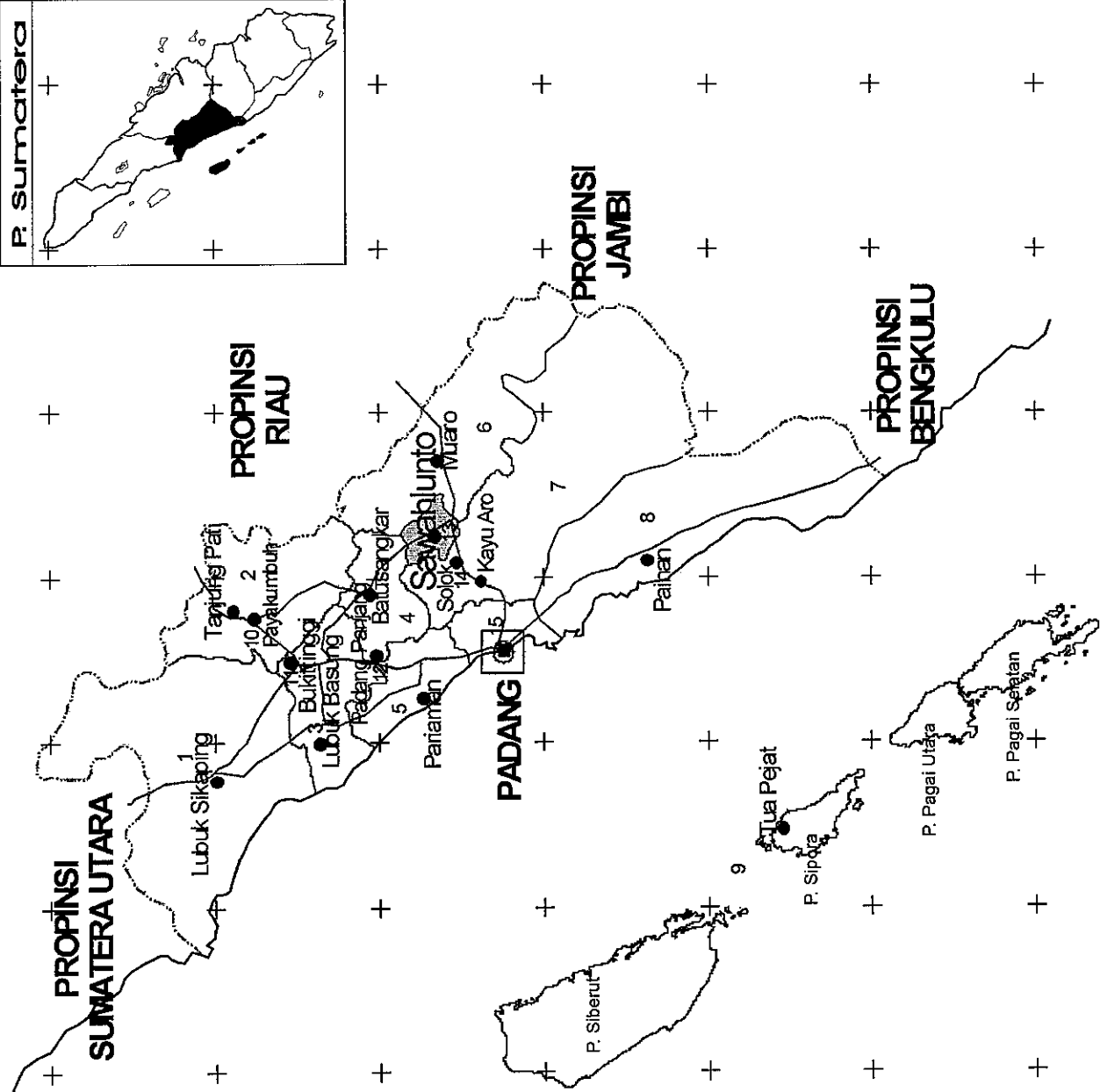
- 1 = Kab. Pasaman
- 2 = Kab. 50 Kota
- 3 = Kab. Agam
- 4 = Kab. Tanah Datar
- 5 = Kab. Padang Pariaman
- 6 = Kab. Sawahlunto Sijunjung
- 7 = Kab. Solok
- 8 = Kab. Pesisir Selatan
- 9 = Kab. Kepulauan Mentawai
- 10 = Kota Payakumbuh
- 11 = Kota Bukittinggi
- 12 = Kota Padang Panjang
- 13 = Kota Sawahlunto
- 14 = Kota Solok
- 15 = Kota Padang

Nomor Gambar : 1.1
Halaman : 12

SKALA 1 : 250.000



Sumber : Didah, 2008





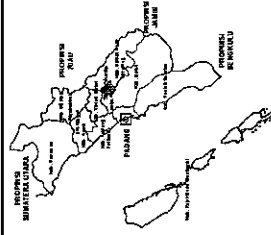
**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCA TAMBANG**

PETA ADMINISTRASI KOTA SAWAHLUNTO

KETERANGAN :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Kota
- Kecamatan
- Desa



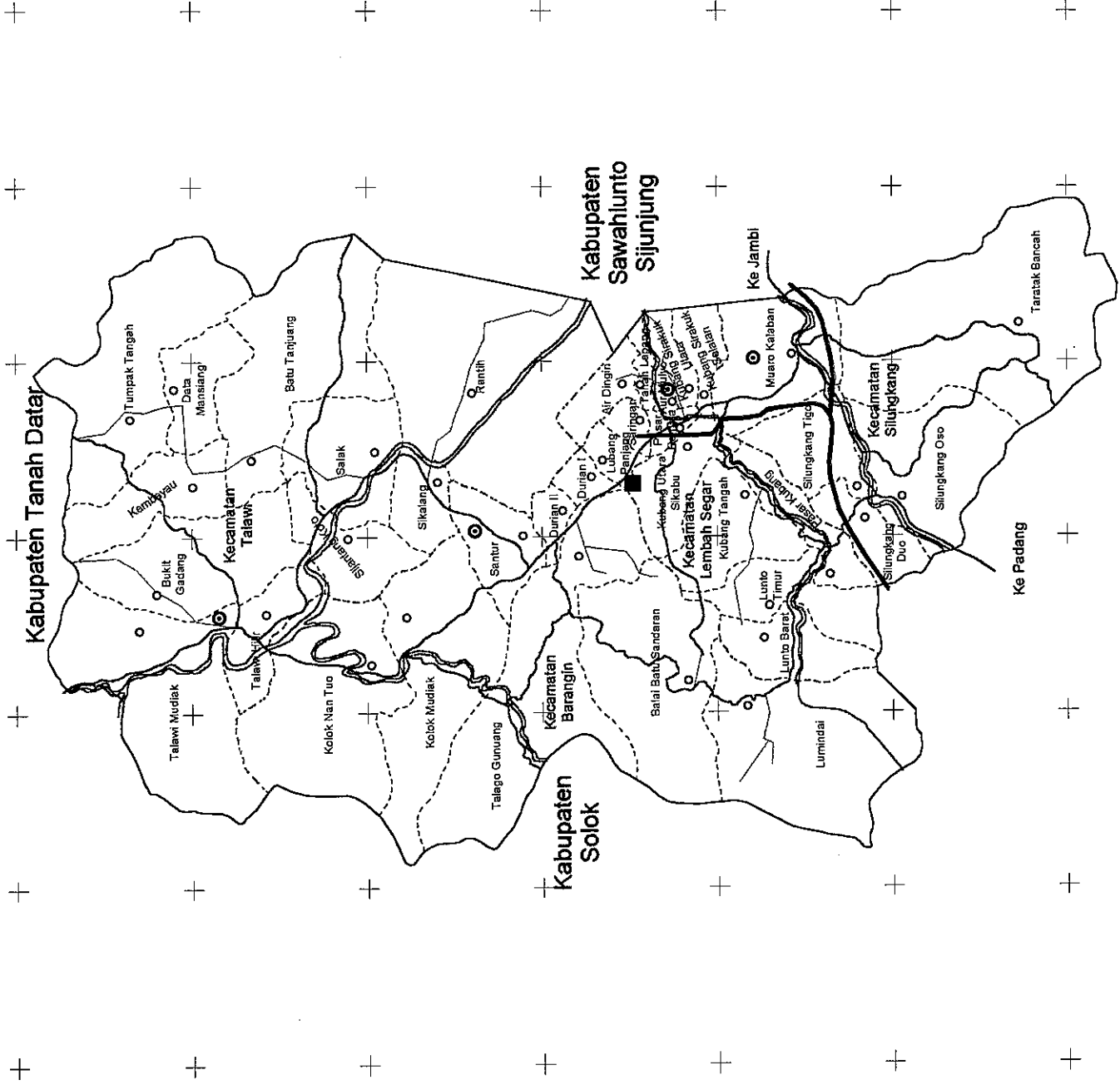
Nomor Gambar : 1.2
Halaman : 13



Utara



Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto



1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran studi ini dilandasi oleh adanya kegiatan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto. Menurut sejarah perkembangannya, Kota Sawahlunto itu sendiri ada dan tumbuh karena kegiatan pertambangan batubara semenjak zaman Hindia Belanda, karena itulah proporsi peran sektor pertambangan dalam perkembangan kota ini dan dalam perekonomian demikian besar. Tidak demikian halnya dengan peran sektor lain yang relatif lebih kecil.

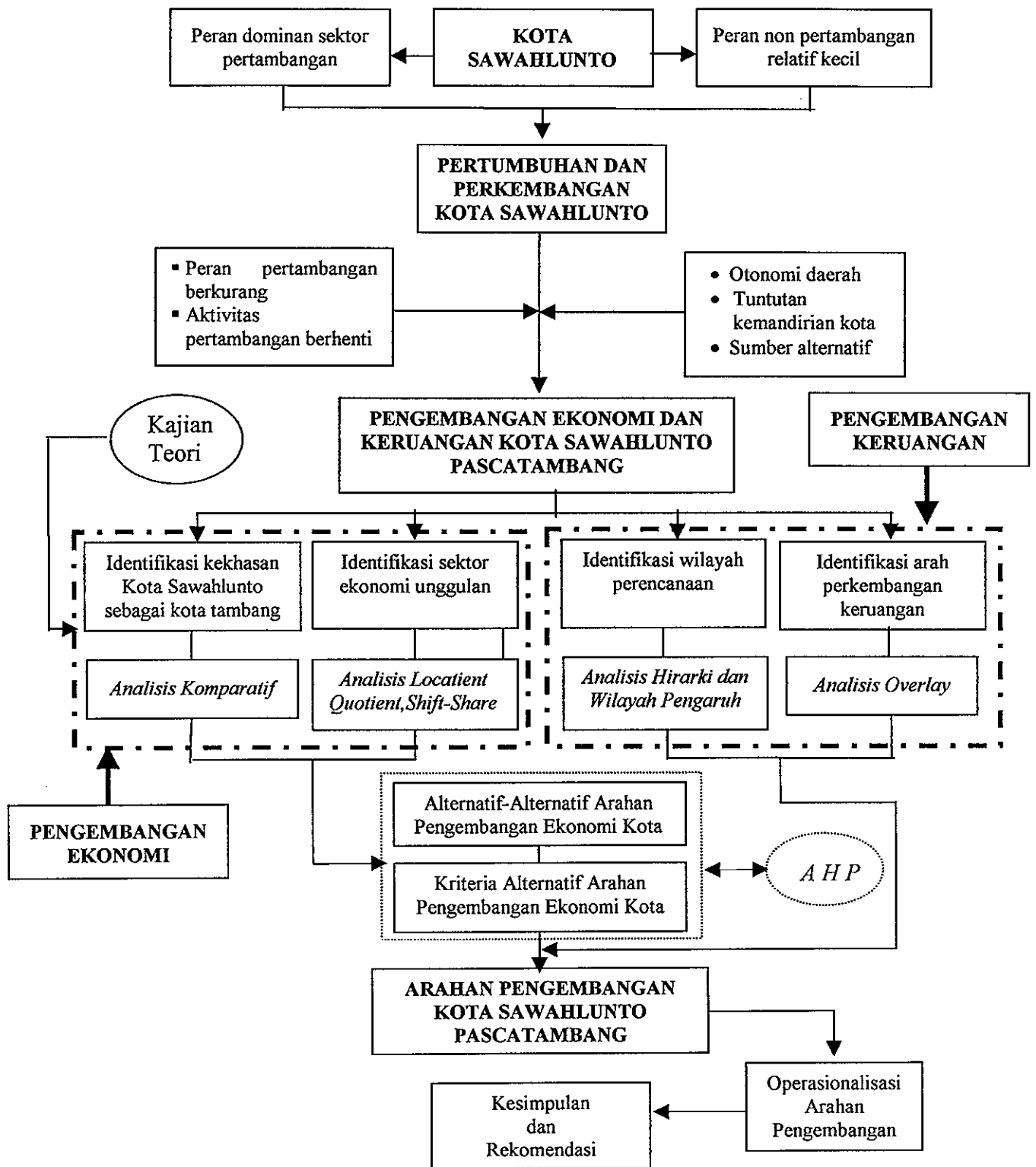
Seiring perkembangan zaman dengan adanya globalisasi, modernisasi dan otonomi daerah, maka tuntutan daerah sebagai ujung tombak pembangunan untuk mencukupi desakan sumber pendanaan pembangunannya, telah semakin meningkatkan kegiatan eksploitasi batubara tersebut. Untuk sementara, memang dapat menopang pembangunan daerah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tapi pada kenyataannya, cadangan batubara yang ada kian menipis dan habis, sehingga perannya dalam perekonomian kian menurun dan mengancam keberlanjutan kota ini. Pada sisi lain tuntutan kemandirian kota dalam pembangunan demikian besar, sehingga menuntut adanya sumber penggerak alternatif dalam pembangunan kota secara keseluruhan. Sementara itu, paradigma pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang demikian hangat saat ini menuntut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih bertanggung jawab untuk masa depan.

Ketergantungan terhadap sektor primer yang bersifat *non renewable* tidaklah menguntungkan dalam jangka panjang, jika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Pendapatan masyarakat memang meningkat, tapi tidak dibelanjakan lagi di Kota Sawahlunto, sehingga dampak jangka panjangnya adalah kurangnya pendanaan pembangunan bagi keberlanjutan Kota Sawahlunto nantinya.

Berdasarkan kondisi inilah akan dianalisis arah pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang, dilihat dari aspek ekonomi dan keruangannya. Inti dari arah pengembangan tersebut adalah identifikasi terhadap kekhasan Kota Sawahlunto sebagai kota tambang, identifikasi terhadap sektor-sektor ekonomi strategis lain dan identifikasi terhadap arah perkembangan keruangannya.

Identifikasi sektor ekonomi strategis dilakukan dengan Analisis Location Quotient dan Shift-Share. Dalam perhitungannya sub-sektor pertambangan batubara tidak digunakan dan dikesampingkan. Sedangkan untuk melihat arah perkembangan spasial sebagai dampak pergeseran peran sektor perekonomian dilakukan analisis overlay, yaitu dengan menumpangtepatkan peta-peta terkait selama kurun waktu analisis tahun 1995-2001. Namun sebelumnya untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih detail, dilakukan analisis hirarki dan wilayah pengaruh, sehingga akan membagi wilayah Kota Sawahlunto sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan atas struktur hirarki dan wilayah pengaruh tersebut.

Dari hasil analisis ini diharapkan akan ditemukan alternatif konsep pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang. Selanjutnya dianalisis lagi dengan menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan legitimasi terhadap konsep tersebut. Kemudian didapatkan hasil akhir berupa kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan di Kota Sawahlunto khususnya dalam perencanaan pembangunannya.



GAMBAR 1.3
SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN
ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG

Sumber : Hasil Analisis, 2003

1.6 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Studi

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya adalah pendekatan basis ekonomi (*economic based approach*) dan pendekatan keruangan (*spatial approach*). Pendekatan basis ekonomi adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor ekonomi basis (ekspor), sehingga sektor inilah yang nantinya dijadikan sebagai strategi dasar dalam pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan dampak ruang dari sektor ekonomi basis tersebut.

Pendekatan-pendekatan tersebut akan menghasilkan alternatif-alternatif strategi pengembangan wilayah nantinya. Alternatif-alternatif yang didapatkan tersebut akan diuji lagi dengan menggunakan pendekatan perencanaan (*planning approach*), yaitu melakukan proses hierarki analisis (AHP). AHP diterapkan dengan melakukan pembobotan terhadap persepsi-persepsi para stakeholder Kota Sawahlunto. Alternatif dengan bobot tertinggi yang akan dijadikan sebagai dasar strategi pengembangan wilayahnya nantinya.

1.6.2 Metoda Penelitian

Metoda penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Nazir (1988), metoda penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan

teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka metoda penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk memahami fenomena sosial, berupa serangkaian kegiatan atau upaya menjangring informasi secara mendalam dari permasalahan yang ada dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, digunakan pula metoda kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengumpulan data instansional di Kota Sawahlunto, berupa data kuantitatif, seperti PDRB, penduduk, fasilitas dan utilitas dan sebagainya serta AHP (Analitical Hierarchy Process) untuk menentukan keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan keadaan saat ini di Kota Sawahlunto. Sementara metoda kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati.

1.6.3 Jenis dan Kebutuhan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan-tulisan, seperti buku laporan, peraturan-peraturan, dokumen dan sebagainya, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara mendalam. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

A. Data Primer :

Kebutuhan Data	Kegunaan	Sumber Data	Teknik Analisis	Tahun
▪ Data potensi kota	Untuk mengetahui potensi kota	✓ Data primer : • Wawancara Bappeda	• Statistik Asosiatif	2001
▪ Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto secara umum	Untuk mengetahui arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto	✓ Data Primer : • Bappeda	• Statistik Asosiatif	2002-....
▪ Kebijakan PT BA UPO terhadap pertambangan batubara	Untuk mengetahui kebijakan PT BA UPO terhadap perkembangan pertambangan	✓ Data Primer : • PT BA UPO	• Statistik Asosiatif	2002-....
▪ Kebijakan PT KAI, PT PLN, PT SP dan perusahaan jasa angkutan batubara	Untuk mengetahui kebijakan dan langkah antisipatif perusahaan tersebut terhadap habisnya tambang	✓ Data Primer : • PT KAI • PT PLN • PT SP • PT Karbindo	• Statistik Asosiatif	2002-....
▪ Kebijakan pelaku-pelaku ekonomi di Kota Sawahlunto	Untuk mengetahui perkembangan, peran, langkah kedepan dari pelaku pelaku ekonomi tersebut	✓ Data Primer : • PT Gapersil • Perusahaan keramik, ayam buras, kerupuk ubi, batu bata	• Statistik Asosiatif	2002-....

B. Data Sekunder

Kebutuhan Data	Kegunaan	Sumber Data	Teknik Analisis	Tahun
• Data PDRB Kota Sawahlunto dan Propinsi Sumatera Barat	Untuk menganalisis sektor ekonomi Strategis Kota Sawahlunto	✓ Data sekunder : ▪ BPS	• Statistik Deskriptif	1995-2001
• Data Fasilitas dan Utilitas Kota Sawahlunto	Untuk menganalisis hierarki kota dan pola penyebarannya.	✓ Data sekunder : ▪ BPS ▪ Bappeda	• Statistik Deskriptif	2001
▪ Data Kependudukan	Untuk mengetahui pola penyebaran, kepadatan	✓ Data sekunder : ▪ BPS	• Statistik Deskriptif	2001
▪ Data potensi kota	Untuk mengetahui potensi kota	✓ Data sekunder : ▪ Bappeda	• Statistik Deskriptif	2001
▪ Data sumbangan sektor pertambangan batubara	Untuk mengetahui peran batubara terhadap perekonomian	✓ Data sekunder : • Dispenda • PT BA UPO	• Statistik Deskriptif	2001

Sumber : Hasil Analisis

Karena penelitian ini mengarah kepada kebijakan dan konsep pembangunan wilayah, maka data yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari instansi-instansi pemerintah di Kota Sawahlunto, sehingga interaksi dengan masyarakat hanya dalam bentuk observasi pada sektor ekonomi strategis yang ada hubungan langsung dengan masyarakat dan pengusaha, yaitu untuk mengetahui keinginan dan kebijakan yang mereka ambil terhadap usahanya ke depan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survai, yaitu suatu teknik yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Teknik survai merupakan bagian dari metoda penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.

Survai dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden yang dalam hal ini adalah pimpinan-pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, pihak legislatif dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pertambangan batubara (PT BA UPO, PT KAI, PT PLN/PLTU, PT Semen Padang dan perusahaan-perusahaan angkutan batubara) serta pelaku-pelaku ekonomi yang selama ini dianggap berperan bagi perekonomian Kota Sawahlunto, yang dilakukan dengan wawancara. Umumnya, pengertian survai dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel atas populasi yang mewakili seluruh populasi, mengingat waktu yang sangat terbatas dan materi yang sangat luas, sehingga perlu dibatasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan seluruh propinsi. Survai tersebut dilakukan melalui :

- a) Wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan, terutama dengan para pengambil kebijakan yang ada di Kota Sawahlunto. Teknik ini digunakan secara simultan dan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.
- b) Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada, buku-buku, studi-studi yang telah dilakukan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan analisis permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Data yang telah didapatkan, baik data sekunder maupun data primer, selanjutnya diolah ke dalam bentuk tabel-tabel hasil dari kompilasi data sekunder dan data teknis di lapangan, sehingga dapat dihasilkan suatu kumpulan data yang siap dianalisis. Dalam metoda pengumpulan data perlu disusun indeks sebagai ukuran gabungan yang disusun untuk mengukur suatu variabel tertentu dari hasil penelitian di lapangan.

1.6.5 Teknik Sampling

Pengambilan sampel (*sampling*) adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh item yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili seluruh itemnya. Sebagian item yang dipilih disebut dengan sampel-sampel (*samples*). Sedangkan seluruh item yang ada disebut dengan universe atau populasi (*population*). Dengan meneliti sebagian dari populasi yang ada, diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang dapat menggambarkan seluruh populasi yang bersangkutan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil dan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dalam penelitian ini. Sampel diambil dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan sektor pertambangan batubara (pihak eksekutif dan legislatif di Kota Sawahlunto, PT Bukit Asam UPO, PT KAI, PT PLN, Stakeholder) dan pelaku-pelaku ekonominya (pengusaha). Untuk itu sampel dipilih sedemikian rupa, sehingga satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih.

Sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka jumlah sampel yang diambil adalah 20 responden sebagai narasumber dalam AHP yang dilakukan, yaitu :

1. Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto (dua responden),
2. Anggota DPRD (dua responden),
3. Ketua Bappeda (satu responden),
4. Kepala Dinas Tata Kota (satu responden),
5. Kepala Dinas Kimpraswil (satu responden),
6. Kepala BPN (satu responden),
7. Kepala Kantor Pendapatan Daerah (satu responden),
8. Kepala UMA UNDP BUILD (satu responden),
9. Pimpinan PT BA UPO (satu responden),
10. Pimpinan PT KAI (satu responden),
11. Pimpinan PT PLN/PLTU Sijantang (satu responden),
12. Pimpinan KADINDA (satu responden),
13. Pimpinan PT Gapersil (satu responden),
14. LSM (Ketua Forum Kota) (satu responden)
15. Kepala Nagari Lunto, Kubang, Silungkang dan Talawi (empat responden)

1.6.6 Metoda dan Alat Analisis

Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1995:9). Dengan demikian metoda analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut juga merupakan gabungan atau perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk mengukur data berupa angka atau bentuk kualitatif yang di-angka-kan berkenaan dengan karakteristik sektor-sektor ekonomi strategis yang ada di Kota Sawahlunto. Sedangkan pendekatan kualitatif dipergunakan untuk memberikan penjelasan verbal terhadap informasi, gambar, skema dan lain-lain berkenaan dengan analisis sektor ekonomi strategis, keruangan dan peran sektor pertambangan secara keseluruhan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian ini, dimana akan ditentukan karakteristik Kota Sawahlunto, identifikasi sektor ekonomi strategis dan identifikasi arah perkembangan keruangan, maka terdapat alat analisis tersendiri terhadap masing-masing aspek tersebut, yaitu :

- (a) Analisis komparatif adalah analisis yang membandingkan suatu fenomena dengan fenomena lain pada suatu lokasi atau lokasi lain yang berbeda. Pada kasus Kota Sawahlunto dengan kekhasan sebagai kota tambang, analisis ini digunakan untuk membandingkan fenomena karakteristik kota-kota lain yang memiliki kesamaan dengan Kota Sawahlunto, seperti kawasan wisata Sunway Lagoon di Selangor Malaysia yang merupakan kawasan bekas tambang timah, Kota Rhondda Valley di Wales dan Nova Scotia di Kanada yang merupakan kota bekas tambang batubara.

(b) Analisis terhadap identifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) digunakan analisis Ekonomi Basis, yaitu *Location Quotient (LQ)* dan *Analisis Shift-Share*. Formula untuk menentukan sektor basis dengan metoda LQ adalah (Warpani, 1984:68) :

$$LQ = \frac{Si / Ni}{S / N} = \frac{Si / S}{Ni / N} \quad (3)$$

Dimana :

- Si = Jumlah buruh sektor ekonomi i di daerah yang diselidiki
- S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki
- Ni = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya
- N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas

Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah :

- Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan
- Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan
- Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Sedangkan formula untuk menentukan analisis pergeseran (Shift-Share) adalah :

$$PEK = KPW + KPP + KPK \quad (4)$$

Dimana :

- PEK = Pertumbuhan Kinerja Ekonomi Kota Sawahlunto
- KPW = Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (Prop. Sumatera Barat)
- KPP = Komponen Pertumbuhan Proporsional
- KPK = Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Ma'rif, 2000)

(c) Analisis terhadap arah perkembangan keruangan digunakan metoda *overlay (metoda tumpang tepat)*, namun sebelumnya dilakukan perhitungan hirarki Kota Sawahlunto dengan analisis *skalogram guttman* dan *influence area* dengan menggunakan analisis *reilly's law of retail gravitation*.

1. Analisis Skalogram Guttman, merupakan pendekatan yang didasarkan atas kelengkapan jenis fasilitas pelayanan kota. Metoda ini menggunakan matrik data dasar yang berisikan variabel-variabel fasilitas. Namun untuk analisis pengembangan Kota Sawahlunto ini dimasukkan variabel lain berupa jumlah penduduk, rencana kebijakan pemerintah terhadap wilayah tersebut dan aksesibilitas, sehingga hasil hirarkinya lebih realistis. Tahapan analisis ini adalah sebagai berikut :

- Mengelompokkan variabel fasilitas, jumlah penduduk, kebijakan dan aksesibilitas sesuai dengan keperluan.
- Mengurutkan variabel yang ditentukan menjadi faktor penting guna membedakan hirarki masing-masing wilayah, pada frekuensi yang ditemukan pada baris paling atas.
- Memberikan tanda (1) pada sel yang menyatakan ketersediaan variabel dan tanda (0) pada sel yang tidak memperlihatkan ketersediaan.
- Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi ketersediaan variabel, dimana semakin banyak ketersediaan variabel, maka unit perencanaan tersebut berada pada baris paling atas.
- Langkah terakhir adalah mengidentifikasi tingkat atau hirarki yang diinterpretasikan berdasarkan persentase ketersediaan fasilitas pada suatu wilayah. Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi hirarkinya.

Setelah langkah-langkah tersebut, maka perlu dilakukan pengujian terhadap kelayakan penggunaan analisis skalogram ini, yaitu dengan menghitung nilai Kr (*Koefisien Reprodusibilitas*) yang menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukur dengan rumus (Rondinelli, 1985) :

$$Kr = 1 - \frac{\Sigma e}{N.K} \quad (5)$$

Keterangan :

- Kr = Koefisien Reprodusibilitas
- e = Jumlah kesalahan (error)
- N = Jumlah observasi
- K = Jumlah kesalahan yang diharapkan

Nilai Kr yang layak adalah > dari 0,9.

2. Analisis wilayah pengaruh

Analisis wilayah pengaruh digunakan untuk mengukur luasan pengaruh wilayah yang direncanakan dengan menggunakan *Reilly's Law of Retail Gravitation* (Blair, 1995:86). Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar suatu wilayah terpengaruh oleh perkembangan wilayah lain. Perhitungan *Reilly's Law of Retail Gravitation* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\int_a^b = \frac{D_{ab}}{\left[1 + \sqrt{\frac{P_b}{P_a}} \right]} \quad (6)$$

dimana :

\int_a^b : skope wilayah pengaruh a terhadap b

D_{ab} : jarak dari wilayah a ke b, dimana b merupakan kota pesaing terdekat

P_a : jumlah penduduk di wilayah a (Pusat)

P_b : jumlah penduduk di wilayah b

Dalam perkembangannya model ini hanya cocok diterapkan pada daerah yang relatif datar, yang sebetulnya menggambarkan tingkat kelancaran aksesibilitas di daerah yang datar, namun untuk kasus Kota Sawahlunto yang bergelombang tingkat aksesibilitas relatif lancar, sehingga model ini tetap digunakan.

- 3 Metoda overlay dilakukan dengan membandingkan perkembangan wilayah dan keruangan selama kurun waktu tertentu. Tumpang tepat dilakukan terhadap peta penggunaan lahan akhir tahun analisis (*present land use*) dengan peta dasar selama kurun waktu 1995 sampai dengan tahun 2001. Disertai dengan jenis kegiatan dan peta built-up area, sehingga didapatkan peta detail arah perkembangan keruangan.
- (d) Untuk mempertimbangkan pendapat beberapa pihak pengambil keputusan di Kota Sawahlunto, maka dipergunakan alat analisis AHP (*Analitycal Hierarchy Process*), yang merupakan salah satu metoda analisis untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahannya (Saaty, 1993).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari kegiatan studi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang akan menguraikan :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang perlunya dilakukan penelitian ini, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup substansial dan spasial, landasan pemikiran pembahasan dan metodologi penelitian

Bab II Teori Pengembangan Wilayah dan Kota, yang akan menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan konsep pembahasan untuk mengkaji materi, yang

meliputi : Regenerasi Kota, Gambaran Kota-Kota Wisata Tambang, Pengertian dan Fungsi Kota, Pola Perkembangan Kota, Strategi Pengembangan Wilayah dengan menggunakan Teori Economic Base berupa Analisis Location Quotient dan Analisis Shift-Share.

Bab III Gambaran Umum Kota Sawahlunto, yang berisikan sejarah, gambaran fisik, kondisi perekonomian dan keruangan Kota Sawahlunto selama ini.

Bab IV Analisis, yang berisikan pembahasan terhadap arahan pengembangan ekonomi dan keruangan Kota Sawahlunto pascatambang

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, yang berisikan kesimpulan hasil penulisan dan rekomendasi.

B A B II

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA

2.1 Regenerasi Kota

Regenerasi kota merupakan suatu proses atau siklus mulai dari pertumbuhan (*growth*), penurunan (*decline*), perbaikan (*recovery*) dan berlanjut (*sustainable*), demikian kompleksnya proses ini, terutama memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar agar dapat terjadi regenerasi tersebut (Berry Ed, 1993:2). Memang, perjalanan sejarah kota-kota di dunia tidak terlepas dari kemajuan dan kemunduran, tergantung pada keberadaan elemen-elemen pembentuk dan pemberi arah perkembangan kotanya. Kota yang direncanakan, cenderung lebih berkembang dibanding kota dadakan yang muncul karena suatu kegiatan tertentu, seperti kegiatan pertambangan dan usaha-usaha lain. Sedikit kota yang mempunyai kebudayaan yang tinggi senantiasa dimulai dengan sebuah rencana. Perencanaan kota yang baik merupakan unsur pokok yang bisa menentukan keberlanjutannya.

Kemunduran kota-kota dapat disebabkan oleh konflik, jumlah penduduk merosot, lapangan kerja kurang, habisnya sumber daya yang menjadi andalan di kota tersebut dan perkembangan terhenti. Banyak kota di Amerika Serikat yang mengalami kemunduran, seperti Kota Pullman yang terkenal dengan kota perusahaannya, yang dibangun untuk menampung pekerja-pekerja Pullman Car Company (Gallion, 1994:244-245). Namun, karena perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, kota ini akhirnya ditinggalkan dan mengalami kemunduran. Demikian juga kota-kota tambang yang ditinggalkan seiring berhentinya kegiatan pertambangan di kota itu.

Hal tersebut menyadarkan Pemerintah Federal AS, dimulailah program pembaharuan dan pengelolaan kemunduran kota, seperti yang dilakukan oleh Presiden

Nixon. Program ini merupakan suatu hal yang relatif baru bagi perencana kota pada saat itu. Banyak kota di wilayah Snowbelt dan Rustbelt, yang kebanyakan bekas kota industri berat yang ketinggalan zaman dan daerah-daerah yang menderita karena iklim yang tidak ramah dan gejolak-gejolak kecenderungan ekonomi, mengakibatkan kota-kota tersebut mengalami kemunduran (Catanese, 1996:35).

Kota-kota tambang juga banyak mengalami hal demikian, seperti Kota Rhondda Valley di Wales dan Kota Nova Scotia di Kanada, namun kemunduran belum tentu berarti kehancuran, karena beberapa kota dapat bangkit kembali dan memperbaiki taraf hidupnya, meskipun dengan jumlah penduduk sedikit. Cara yang ditempuh adalah melakukan pemeliharaan terhadap apa-apa yang baik di kota tersebut, sambil mendorong dilakukannya perubahan dan pembaharuan pada apa-apa yang nampaknya tidak bisa digunakan lagi. Pada hakekatnya hal ini berarti, bahwa para perencana tidak bisa lagi mengandalkan prinsip-prinsip dan standar-standar yang diperoleh dari pengalaman, selama pertumbuhan tidak terbatas. Saat ini, para perencana harus menggunakan berbagai metoda untuk meningkatkan mutu kota-kota, sambil mengatasi kemundurannya (ibid:36). Jadi inti dari kemajuan dan mengatasi masalah perkotaan adalah perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kecenderungan perencanaan kota di Amerika Serikat mengalami evolusi seiring dengan perkembangan peradabannya, hal-hal pokok perencanaan kotanya adalah :

- a) Kemitraan antara pemerintah dan swasta,
- b) Pengendalian pertumbuhan dan pengelolaan kemunduran,
- c) Pelestarian peninggalan sejarah dan pemakaian kembali yang disesuaikan,
- d) Perencanaan daerah lingkungan (neighborhood planning),
- e) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur,
- f) Pengaturan keuangan secara ketat,
- g) Pemanfaatan teknologi.

Pada umumnya regenerasi kota-kota di negara-negara Eropa dan Amerika adalah suatu proyek atas inisiatif pemerintah. Tujuan dari regenerasi kotanya tidak lain adalah (1) keadilan sosial, yang berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat yang kekurangan tidak merasa dirugikan dengan adanya perubahan yang terjadi, (2) keseimbangan alam, yaitu berkaitan dengan kemampuan mempertahankan keanekaragaman ekologi, dan (3) Meminimalisasi buangan, yang berkaitan dengan konservasi bangunan-bangunan tua yang mampu memberikan nilai ekonomis (Falk dalam Berry Ed, 1993:163).

2.2 Perkembangan Kota-Kota Khusus

Perkembangan kota-kota di dunia tidak sama, tergantung pada lokasi dan sumber daya yang menopang keberadaannya. Ada kota-kota yang tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan di kota tersebut, yang dinamakan sebagai kota yang memiliki karakter khusus, namun ada juga kota yang perkembangannya sudah direncanakan dari awal, sebagaimana kota-kota pada umumnya. Dalam tulisan ini ada beberapa kota khusus yang akan dijadikan acuan terhadap analisis pengembangan Kota Sawahlunto.

2.2.1 Kota Rhondda Valley

Kota Rhondda Valley terkenal sebagai pusat pertambangan batubara di Wales (Inggris) sejak tahun 1812. Kota yang terletak di antara dua lembah ini, yaitu Rhondda Fawr (Big Rhondda) dan Rhondda Fach (Small Rhondda), berada 15 mil sebelah Timur Cardiff, dilalui oleh jalan utama Swansea, Bridgend, Cardiff dan Newport.

Kegiatan pertambangan batubara di kota ini ditutup tahun 1990. Lebih dari 170 tahun aktivitas pertambangan batubara telah meningkatkan pemasukan bagi Kerajaan

Inggris. Selama kurun waktu 1947-1990 sekitar 117 buah perusahaan pertambangan menghentikan aktivitasnya. Perusahaan-perusahaan tersebut mengalihkan kegiatannya pada bidang jasa-jasa dan industri-industri ringan. Ini pada awalnya direncanakan untuk mengurangi pengangguran, namun pada kenyataannya kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat menampung limpahan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan pertambangan, sehingga pengangguran tetap tinggi. Sebagian besar pekerja meninggal saat bekerja di pertambangan dan lainnya pergi meninggalkan kota ini mencari penghidupan di daerah-daerah lain. Suatu ironi, bahwa kota yang kaya dan selalu menjadi perhatian sebelumnya akhirnya menjadi kota tragedi, yang tinggal hanya perempuan dan anak-anak. Penduduk yang pada awal abad ke-20 berjumlah 168.000 orang, sekarang tinggal sekitar 68.000 orang saja.

Melihat Kota Rhondda Valley saat ini yang sudah mengalami perubahan luar biasa. Kota yang sebelumnya merupakan kota mati yang ditinggalkan penghuninya, sekarang menjadi salah satu kota yang terkenal di dunia, dengan sisa-sisa peninggalan perusahaan pertambangan yang masih dipertahankan. Orang akan merasa sedih melihat kejamnya kegiatan pertambangan, lebih dari 100.000 orang meninggal di areal pertambangan Rhondda. Untuk mengenang hal tersebut dibangunlah Rhondda Heritage Park yang menggambarkan seolah-olah kita berada di zaman pertambangan awal abad ke-20.

Big Pit merupakan National Mining Museum of Wales yang dibangun untuk mengenang kejayaan pertambangan Rhondda dengan tour bawah tanahnya yang memanfaatkan lorong bekas pertambangan batubara. Jadi, dengan perencanaan dan pengelolaan yang terencana menjadikan Kota Rhondda sebagai kota tujuan wisata dengan kekhasan sebagai kota wisata tambang.

2.2.2 Kota Nova Scotia

Nova Scotia merupakan salah satu propinsi dan sekaligus kota di Canada, dikelilingi oleh empat perairan, yaitu Samudera Atlantik, Teluk Fundy, Selat Northumberland dan Teluk St. Laurent dengan luas 55.491 km², terdiri dari daratan, pelabuhan dan pantai. Sebelumnya merupakan penghasil tambang terbesar, terutama batubara dan gypsum, yaitu mencapai 85 persen dari total output Kanada (www.mines)

Posisi yang strategis telah menyebabkan kota ini menjadi salah satu kota yang maju, walaupun aktivitas tambang berhenti. Simbol sebagai kota tambang tetap dipertahankan dan menjadi *landmark*. Bekas-bekas pertambangan dijaga dan dijadikan sebagai objek yang menarik bagi para wisatawan.

Museum Industri Nova Scotia dibangun untuk mengenang sejarah pertambangan batubara. Museum yang dilengkapi dengan plaza semakin menarik bagi pengunjung untuk mendatanginya. Selain itu pengunjung juga disuguhi atraksi wisata berupa Samson Walking Trail. Tempat menarik lain yang dibangun untuk mengenang kekejaman aktivitas pertambangan batubara adalah Memorial Park di Pictou County, dimana terdapat bangunan-bangunan tua bekas kegiatan tambang yang tetap dipertahankan dan dipugar. Namun, yang tetap menopang perkembangan kota ini adalah posisi geografisnya yang menguntungkan dan ketergantungan terhadap produk pertambangan relatif kecil, karena terdapatnya lahan pertanian dan peternakan yang subur dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas penunjang ekonominya.

Sekarang kota ini menjadi kota industri penting di Kanada, sebagai penghasil perikanan, industri kertas dan pertanian. Komoditi ekspor yang utama adalah arbei, apel dan sayur-sayuran. Fasilitas-fasilitas fisik juga lengkap, seperti pelabuhan, transportasi

udara, jalan, kawasan industri, fasilitas pendidikan dan latihan, telah menjadikan kota ini sebagai tempat yang menarik dalam bisnis.

2.2.3 Kota Petaling Jaya dan Sungei Besi

Petaling Jaya merupakan salah satu kota di Negara Bagian Selangor Malaysia yang memiliki kawasan bekas tambang timah dan sekarang telah disulap menjadi kawasan wisata yang terkenal dengan nama Sunway Lagoon. Sunway Lagoon memiliki lokasi yang sangat strategis, berada di jantung Kota Petaling Jaya yang merupakan sub-urban Kuala Lumpur dan dapat ditempuh dalam waktu 35 menit dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang. Sunway terhubung dengan empat jalan tol, dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam dari Singapura dengan menggunakan mobil.

Kota wisata terpadu Sunway Lagoon dengan luas 800 ha terdiri dari hotel resort bintang lima dengan 441 kamar, taman bermain *theme park* termasuk *surf-wave pool* terbesar di dunia, *Sunway Pyramid* yang merupakan kawasan pusat perbelanjaan terbesar dengan 250 gerai termasuk arena *ice-scating*, 48 *lane* bowling dan 10 layar bioskop serta *Sunway Medical Centre* yang juga dijual sebagai paket wisata (Kompas, 8 Mei 2003).

Di samping Sunway Lagoon, terdapat pula kawasan The Mines Wonderlands yang terdapat di Kota Sungei Besi. The Mines Wonderlands merupakan taman rekreasi tambang yang modern, dimana terdapat danau bekas tambang timah terbesar di dunia. Berbagai atraksi yang luar biasa terdapat di sini, baik yang natural maupun yang buatan. Pagelaran Musical Fountain merupakan yang paling terkenal. Aliran air yang memancarkan cahaya beraneka warna dikombinasikan secara serentak dengan irama musik yang dimainkan. Atraksi lain berupa parade raksasa binatang-binatang animasi, seperti lumba-lumba, gurita, kura-kura laut, buaya, angsa dengan gerakan-gerakan yang

menarik melintasi danau. Yang paling mengagumkan adalah Snow House, di mana pengunjung dapat menikmati suasana musim dingin. Mines Wonderlands juga menawarkan olah raga air, meluncur serta piknik di pantai.

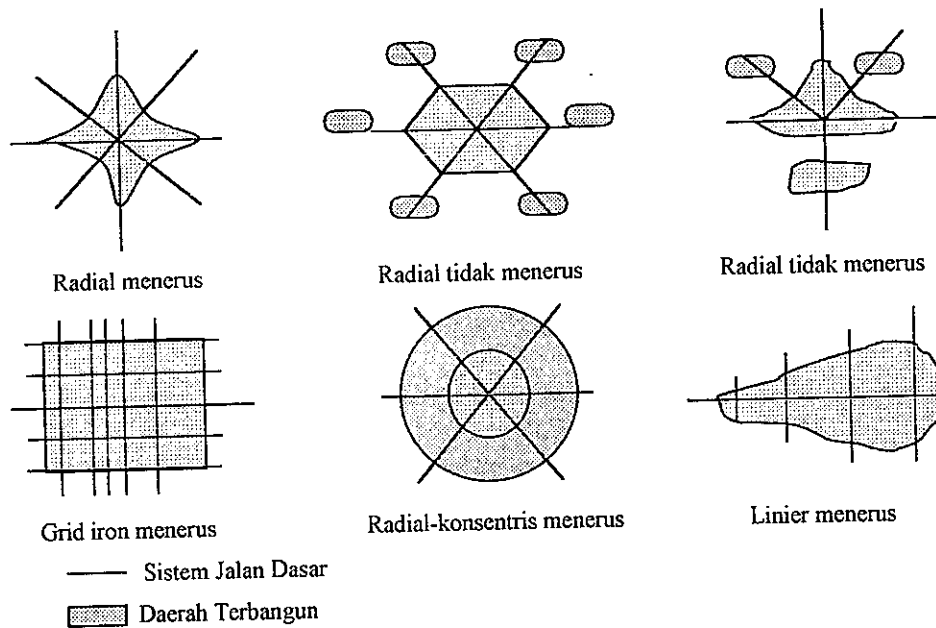
Sebelumnya kawasan-kawasan ini memiliki deposit timah yang besar, yang sudah beroperasi sejak abad ke-16 saat kolonialis Inggris masih berkuasa. Pemanfaatan sisa-sisa pertambangan menjadi potensi besar bagi pengembangan wisata Kota Petaling Jaya, sehingga mampu menghasilkan devisa yang besar bagi Negara Bagian Selangor dan Malaysia umumnya untuk menjadi negara tujuan wisata utama di Asia.

2.3 Pola Perkembangan Kota Secara Umum

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Tekanan perubahan keadaan tersebut biasanya didasarkan pada waktu yang berbeda dan untuk menganalisis ruang yang sama. Perkembangan kota menurut J.H. Goode, dipandang sebagai fungsi jumlah penduduk, penguasaan alat atau lingkungan, kemajuan teknologi dan kemajuan dalam organisasi sosial (Daldjoeni, 1998).

Perkembangan kota dapat dilihat dari aspek zone-zone yang berada dalam wilayah perkotaan. Dalam konsep ini Bintarto menjelaskan perkembangan kota tersebut terlihat dari penggunaan lahan yang membentuk zone-zone tertentu di dalam ruang perkotaan (Bintarto, 1978).

Bentuk kota secara keseluruhan mencerminkan posisinya secara geografis dan karakteristik tempatnya. Pola perkembangan kota di atas tanah datar terlihat pada gambar berikut :



GAMBAR 2.1
POLA UMUM PERKEMBANGAN PERKOTAAN

Sumber : Branch, 1996 : 52

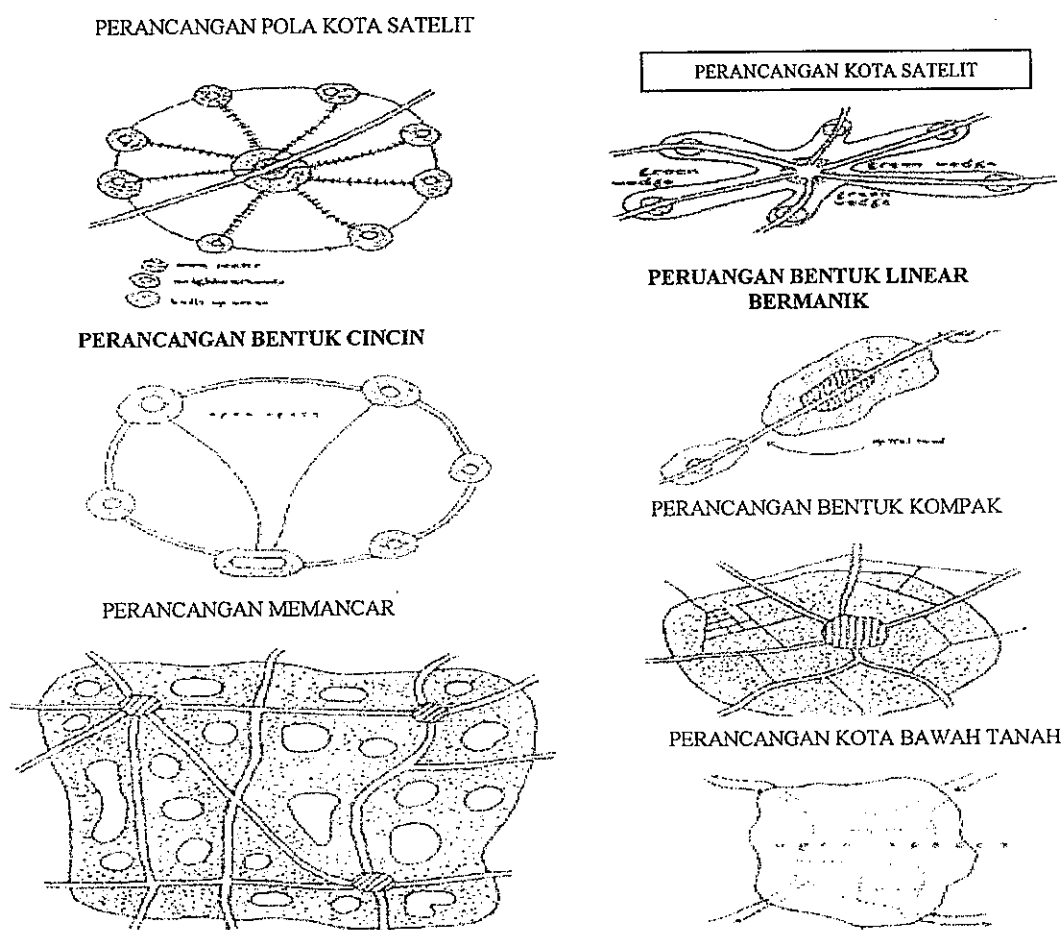
Selanjutnya J.W. Alexander menyatakan bahwa karena keadaan topografi tertentu atau karena perkembangan sosial ekonomi tertentu akan terjadi perkembangan kota yang mempunyai pola menyebar, pola sejajar dan pola merumpun. Pola menyebar (*dispersed pattern*) dari perkotaan terjadi pada keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen. Pola sejajar (*linier pattern*) dari perkotaan terjadi sebagai akibat adanya perkembangan sepanjang jalan, lembah, sungai atau pantai. Pola merumpun (*clustered pattern*) dari perkotaan terjadi pada agak datar, tetapi terdapat beberapa relief lokal yang nyata dan seringkali berkembang berhubungan dengan pertambangan (Jayadinata, 1999:179).

Berdasarkan pada penampakan morfologi kota serta jenis penyebaran areal perkotaan yang ada, Hudson mengemukakan 7 (tujuh) alternatif bentuk kota (Yunus, 2001:133-141), yaitu :

- (a) Bentuk satelit dan pusat-pusat baru (*satelite and neighbourhood plans*), kota utama dengan kota-kota kecil akan dijalin hubungan fungsional yang efektif dan efisien,
- (b) Bentuk stellar atau radial (*stellar or radial plans*), tiap lidah dibentuk pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan dan yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan olah raga bagi penduduk kota,
- (c) Bentuk cincin (*circuit linier or ring plans*), kota berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar, dan dibagian tengah dipertahankan sebagai daerah hijau terbuka,
- (d) Bentuk linier bermanik (*bealded linier plans*), pusat perkotaan yang lebih kecil tumbuh di kanan kiri pusat perkotaan utamanya, pertumbuhan kotanya hanya terbatas di sepanjang jalan utama, sehingga pola umumnya linier, di pinggir jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan di belakangnya permukiman penduduk,
- (e) Bentuk inti/kompak (*the core or compact plans*), perkembangan kota biasanya lebih didominasi oleh perkembangan vertikal, sehingga memungkinkan konsentrasi bangunan padaareal kecil,
- (f) Bentuk memencar (*dispersed city plans*), dalam kesatuan morfologi yang besar dan kompak terdapat beberapa *urban centre*, dimana masing-masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi khusus dan berbeda satu dengan yang lain,
- (g) Bentuk kota bawah tanah (*underground city plans*), struktur perkotaannya dibangun di bawah permukaan bumi, sehingga kenampakan kotanya tidak dapat diamati di permukaan bumi, di daerah atasnya berfungsi sebagai jalur hijau dan pertanian yang tetap hijau.

2.4 Pengembangan Wilayah

Wilayah (*region*) dalam pengertian geografi menurut Jayadinata (2000:13), merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dibedakan dari wilayah lain. Wilayah geografi dapat mengandung wilayah geologi (*geological region*), wilayah tubuh tanah (*soil region*), wilayah ekonomi (*economic region*) dan sebagainya. Batas wilayah geografi ini tidak berimpit, sehingga batasnya dapat dibuat dengan tepat. Wilayah geografi ini sering disebut sebagai wilayah formal (*formal region*).



GAMBAR 2.2
BEBERAPA ALTERNATIF BENTUK KOTA

Sumber : Yunus, 2001:133-141

Selain istilah wilayah formal terdapat istilah wilayah fungsional (*functional region*), yang didefinisikan sebagai suatu bagian dari permukaan bumi, di mana beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan, yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan penduduk. Kadang-kadang wilayah seperti ini sering disebut wilayah organik, misalnya pada suatu pegunungan, penduduk dari suatu gunung hidup dari kehutanan, di lerengnya dari perkebunan dan pertambangan, di kakinya dari pertanian dan peternakan dan di dataran dari perdagangan, industri dan pelayanan, sehingga masing-masing penduduk wilayah tersebut dapat saling mengisi kebutuhan hidupnya.

Belum ada kesamaan pandangan para ahli tentang perbedaan pengertian wilayah dan kota, namun pengertiannya akan lebih jelas jika dilihat dari karakteristik fungsional dari wilayah dan kota itu sendiri. Kota lebih dicirikan oleh penduduknya yang heterogen dengan dominasi mata pencaharian pada sektor non pertanian, sedangkan wilayah lebih dilihat dari unit fungsionalnya yang bersifat homogen, misalnya wilayah perkotaan, yang di dalamnya termasuk kota itu sendiri dengan wilayah hinterlandnya, wilayah pertanian dan sebagainya.

Selanjutnya dalam tulisan ini, pengertian kota lebih dilihat dari aspek administratifnya, sedangkan dalam pengertian wilayah, maknanya lebih luas, karena berkaitan dengan interaksi ekonomi dan keruangan, serta interaksi dengan daerah lain.

Perencanaan dan pengembangan suatu wilayah biasanya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut, ini menurut teori *resource endowment* (Perloff, 1960). Dalam teori ini dinyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas

yang dihasilkan dari sumber daya itu, yang dalam jangka pendek merupakan asset untuk memproduksi barang dan jasa.

Menurut North (1955), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya, sedangkan menurut Myrdal (1957), terdapat dua kekuatan yang bekerja pada pertumbuhan ekonomi, yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Kekuatan efek penyebaran (*spread effect*) mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, kekuatan efek balik negatif (*backwash effect*) biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari daerah tidak berkembang ke daerah berkembang.

Berdasarkan teori pengembangan wilayah, ada dua pendekatan yang umum dipakai, yaitu konsep pengembangan wilayah dari atas (*development from above*) dan konsep pengembangan dari bawah (*development from below*). Konsep pengembangan dari atas paling banyak digunakan, baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama (terpilih) pada lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh bagian wilayah.

Konsep Pengembangan dari Bawah adalah suatu proses pembangunan yang menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil, memobilisasi sepenuhnya kemampuan dan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan bersama dalam ekonomi, sosial dan politik. Konsep ini merupakan kebalikan dari konsep pengembangan dari atas.

Keterkaitan antara pusat dan hinterland terdapat hubungan simbiosis dan mempunyai fungsi yang spesifik, sehingga keduanya tergantung secara internal. Pusat berfungsi sebagai pusat permukiman, pelayanan, industri dan perdagangan, sedangkan

wilayah hinterland berfungsi sebagai penyedia barang dasar, daerah pemasaran dan pusat pertanian. Wilayah tersebut mempunyai hierarki berdasarkan jumlah penduduk, jumlah fasilitas dan pelayanan.

2.5 Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah

2.5.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan

Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan merupakan strategi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang/merata. Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan strategi ini paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah.

Ada beberapa strategi pengembangan wilayah dengan konsep pusat-pusat pertumbuhan ini (Parr, 1999), yaitu:

(a) Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*),

Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, kesejahteraan penduduk di bawah rata-rata, serta rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada. Strategi ini dilakukan untuk menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional. Tujuannya adalah mencegah modal ke luar wilayah, serta mencegah tingginya populasi di daerah tersebut. Hasil yang kemudian diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonominya.

(b) Mendorong dekonsentrasi wilayah,

Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah, serta bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan yang dilakukan adalah pada wilayah non-metropolitan, untuk menekan perannya yang sudah terlalu besar. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah perlunya mempertimbangkan faktor lokasi pengembangan, bahwa tidak semua lokasi layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

(c) Memodifikasi sistem kota-kota,

Tujuan strategi ini adalah untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan yang memiliki hierarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

(d) Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah,

Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Selanjutnya ia mengungkapkan beberapa karakteristik dari strategi pusat-pusat pertumbuhan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a) Mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan populasi dalam suatu wilayah pada sebagian lokasi atau pusat yang telah direncanakan pada satu periode tertentu,
- b) Dibutuhkan pembatasan jumlah lokasi-lokasi atau pusat-pusat yang dirancang sebagai pusat,

- c) Diperlukan seleksi/diskriminasi keruangan di antara lokasi-lokasi yang ada,
- d) Modifikasi struktur keruangan terhadap lapangan pekerjaan dan populasi dalam wilayah.

Selanjutnya terdapat beberapa kerangka batasan dalam pembuatan keputusan dalam kaitannya dengan perencanaan ekonomi wilayah, batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut (ibid) :

- a) Diagnosis yang harus hati-hati terhadap permasalahan wilayah serta artikulasi yang jernih terhadap konsistensi tujuan berdasarkan perencanaan yang realistis, juga berdasarkan pada keterbatasan yang menyangkut kelayakan ekonomi dan teknis, ketersediaan sumber daya dan penerimaan secara politik,
- b) Mengetahui secara mendalam tentang aktivitas ekonomi dalam wilayah, termasuk mengetahui sejauh mana struktur hubungan antara sektor ekonomi dengan struktur ruang wilayahnya,
- c) Apresiasi terhadap pertumbuhan eksisting serta antisipasi terhadap penyebaran pertumbuhan, apakah itu di antara wilayah dalam lingkup nasional, antara kawasan dengan wilayah atau dalam suatu sistem kota,
- d) Identifikasi yang memadai terhadap instrumen kebijakan yang ada, termasuk kapasitas dari struktur administrasi,
- e) Penelitian yang hati-hati terhadap resiko dan kemungkinan kesuksesan yang berhubungan dengan aspek sektoral dan keruangan,
- f) Pengertian terhadap operasional dari keterkaitan dan interaksi di antara beberapa elemen yang terkait.

Kemudian ada 3 (tiga) dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan :

(1) Konsentrasi prasarana kota pada pusat pertumbuhan,

Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial. Dalam konteks belanja publik ada sebuah justifikasi terhadap hal tersebut, yaitu tipe prasarana yang dibatasi pada fasilitas yang memiliki skala pelayanan yang luas. Untuk prasarana transportasi termasuk di dalamnya pembangunan baru dan peningkatan jalan dengan fokus pada pusat pertumbuhan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya. Prasarana yang berskala luas ini akan menimbulkan eksternalitas, sehingga akan membuat daerah menjadi lebih atraktif bagi perusahaan dalam konteks lokasi dan menstimulasi masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan. Untuk melengkapi prasarana tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya.

(2) Konsentrasi aktivitas perekonomian (*aglomerasi*)

Konsentrasi / aglomerasi aktivitas perekonomian di pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). Hal ini akan dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung ke dalam pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi. Konsentrasi aktivitas ekonomi ini sangat bergantung pada kelengkapan prasarana kota.

(3) Kutub yang direncanakan berdasarkan keunggulan komperatifnya,

Hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan pusat pertumbuhan dengan melihat aspek keunggulan komperatif daerah, kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Bagaimanapun juga rasionalitas dari strategi pusat pertumbuhan memunculkan dua pola yang berbeda, pertama adalah struktur ruang wilayah mengalami perubahan yang radikal dengan pertumbuhan pada kutub yang direncanakan yang disertai oleh redistribusi utama dari populasi dan pekerja dengan gaji murah (*low-cost labor*) ke dalam pusat dan dengan menimbulkan efek ke sektor lainnya, yaitu perdagangan dan jasa. Semua itu akan mendorong masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan dan meningkatkan kinerja ekonomi wilayahnya.

2.5.2 Pengembangan Ekonomi Lokal

Pada awalnya, sesuai dengan sejarah perencanaan pembangunan, di mana ada konsep pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara *development from above*, *development from below* dan *selective spatial closure*, *agropolitan* tidak memberikan hasil yang diinginkan dan sulit diimplementasikan, maka lahirlah konsep *local economic development*.

Konsep pengembangan ekonomi lokal berusaha memadukan konsep-konsep tersebut, dengan mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen *endogenous development* dalam kehidupan sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas (Ma'rif : 2000).

Pengembangan ekonomi lokal mendasari konsepnya pada pengembangan kewirausahaan lokal serta tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal, kerja

sama pemerintah lokal dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Konsep ini pada dasarnya beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan yang ada di wilayah tersebut, meliputi industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal dan lainnya. Masalahnya adalah bagaimana memobilisasi potensi-potensi kelembagaan tersebut dan menjadikannya sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah.

Terdapat banyak fungsi yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi, skala ekonomis, pasar, situasi ekonomi, kemampuan pemerintah pusat dan daerah, serta situasi yang kondusif.

Dalam bahasa akademis, perekonomian lokal dapat dibagi menjadi dua sektor perekonomian, yaitu *sektor basis* dan *non basis*. Kegiatan pada sektor basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke luar batas wilayah perekonomian. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah yang bersangkutan.

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa bertambah banyak sektor basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan dari luar daerah ke dalam daerah yang bersangkutan, sehingga akan menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor non basis, demikian pula sebaliknya. Sektor basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama (*prime mover role*) perekonomian wilayah melalui *efek multiplier*. Dengan demikian suatu daerah dapat berkembang apabila mampu mengembangkan sektor basisnya (Glasson, 1977), serta penanaman

modal pada industri-industri lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dari industri-industri sektor basis (Kadariah, 1985).

Suatu daerah akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang menjadi sektor basisnya. Bagi daerah yang tidak memiliki sektor basis, maka akan lambat dalam pertumbuhan ekonominya. Sedangkan kerugiannya apabila suatu daerah tergantung pada satu kegiatan basis, maka perekonomian sangat rentan terhadap gejolak.

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal pada intinya mengemukakan bagaimana mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, sejauh mana industri tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian lokal serta bagaimana keberlanjutannya pada masa yang akan datang. Menurut Coffey and Polase dalam Blair (1985) proses berkembangnya perekonomian lokal pada dasarnya meliputi empat tahap : *pertama*, tumbuhnya kewiraswastaan (*entrepreneurship*) lokal ; *kedua*, lepas landasnya (*take off*) perusahaan-perusahaan lokal ; *ketiga*, berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut keluar lokalitas, dan *keempat*, terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang mengakar pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan-keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut.

Local economic development sebagai model, menekankan pada bagaimana merumuskan *endogeneous development policies* dengan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan. Indikator yang sering digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut.

2.5.3 Strategi Pengembangan Ekonomi

2.5.3.1 Location Quotient Analysis (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan *sektor basis* atau *leading sektor*. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Teknik analisis ini belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu daerah dalam sektor yang teridentifikasi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari daerah tersebut adalah (Warpani, 1984:68) :

$$LQ = \frac{S_i / N_i}{S / N} = \frac{S_i / S}{N_i / N} \quad (1)$$

- Dimana :
- S_i = Jumlah buruh sektor kegiatan ekonomi i di daerah yang diselidiki
 - S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki
 - N_i = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya
 - N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas

Itu jika menggunakan data buruh atau tenaga kerja. Demikian pula jika menggunakan data lain, seperti PDRB.

Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah :

- a) Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan
- b) Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan
- c) Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Asumsi metoda LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan wilayah acuan. Asumsi lainnya adalah permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Keunggulan :

Location Quotient merupakan suatu alat analisa yang digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Karena demikian sederhananya, LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari tiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.

Kelemahan :

Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis ini adalah masalah *time lag*. Hal ini diakui, bahwa *base multiplier* atau pengganda tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan *time lag* antara respon dari sektor basis terhadap permintaan dari luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah *time lag* ini, namun dalam jangka panjang masalah ini pasti terjadi.

Pengganda basis dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Budiharsono, 2001:31) :

$$\text{Pengganda basis} = \frac{\text{Total tenaga kerja}}{\text{Tenaga kerja sektor basis}} \quad (2)$$

atau

$$\text{Pengganda basis} = \frac{\text{Perubahan total tenaga kerja}}{\text{Perubahan tenaga kerja basis}} \quad (3)$$

atau

$$\Delta T = (1/(1 - dl)) \Delta X, \quad (4)$$

dimana :

- T = total tenaga kerja
- X = jumlah tenaga kerja pada sektor basis
- $1/(1-dl)$ = multiplier. (Ma'rif : 2000)

Pada umumnya jika dilakukan dengan hati-hati dan menggunakannya dengan hati-hati pula, maka model ekonomi basis ini merupakan alat yang baik untuk mengeksplorasi, mengevaluasi dan memberikan dugaan permintaan basis untuk masa mendatang dan memprediksi tenaga kerja, pendapatan, populasi, investasi, kebutuhan pelayanan masyarakat dan sebagainya.

Menurut teori ini, sektor ekspor merupakan sektor yang paling penting dalam pembangunan daerah, karena (1) ekspor akan secara langsung menimbulkan kenaikan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah, (2) pengembangan ekspor

akan menimbulkan permintaan atas produksi industri lokal (*residential industry*), yaitu industri di daerah yang memproduksi untuk memenuhi pasaran di daerah tersebut. Walaupun sebetulnya ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan daerah, yaitu penambahan penduduk dan modal yang besar ke daerah tersebut.

Dalam perkembangannya, teori ekspor base dikembangkan lagi oleh Perlof dan Wingo ke dalam *teori resource base* yang didasarkan pada pengalaman empirik sejarah perkembangan daerah di Amerika Serikat (Sukirno, 1982). Teori ini menganggap bahwa di samping ekspor, peranan kekayaan alam suatu daerah juga menentukan perkembangan daerah tersebut.

2.5.3.2 Shift – Share Analysis

Metoda ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan (wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih kurun waktu.

Analisis ini bertolak pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen :

1. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor

tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.

3. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Dengan demikian apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi kota adalah PEK, maka persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut (Ma'rif, 2000:3):

$$\boxed{PEK = KPW + KPP + KPK} \quad (11)$$

Atau :

$$PEK = \left[\frac{Y^*}{Y} - 1 \right] + \left[\frac{Y'i}{Yi} - \frac{Y^*}{Y} \right] + \left[\frac{y'i}{yi} - \frac{Y'i}{Yi} \right] \quad (12)$$

Di mana :

- Y^* = indikator ekonomi acuan akhir tahun kajian
- Y = Indikator ekonomi acuan awal tahun kajian
- $Y'i$ = Indikator ekonomi acuan sektor i akhir tahun kajian
- Yi = Indikator ekonomi acuan sektor i awal tahun kajian
- $y'i$ = Indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i akhir tahun kajian
- yi = Indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i awal tahun kajian

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus :

$$\boxed{PN = KPP + KPK} \quad (13)$$

Selain data pendapatan dapat juga dipergunakan data kesempatan kerja.

Keunggulan :

- (1) Digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi
- (2) Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah terhadap wilayah acuan
- (3) Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- (4) Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja)

Kelemahan :

- (1) Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama,
- (2) Pergeseran posisi sektor dianggap linier.

2.5.4 Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah

Strategi pembangunan berbasis wilayah merupakan sebuah alternatif bagi rencana pengembangan wilayah yang selama ini selalu bersifat *top-down*. Strategi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ardani, 1992:7) :

- 1) Strategi dan sistem pemrograman dibuat fleksibel dengan melakukan proses feed-back berkesinambungan yang inheren agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perekonomian yang selalu berubah. Tidak seperti rencana pembangunan lima tahunan konvensional yang memiliki kerangka jangka panjang yang kaku,
- 2) Strategi ini disiapkan untuk melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan pengembangan perekonomian wilayah, seperti pemerintah daerah, Kadin, perusahaan swasta, lembaga keuangan, koperasi, asosiasi, LSM, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan sebagainya. Untuk merumuskan strategi, dibuatlah suatu komite strategi,

- 3) Mekanisme *self-generate* yang berkesinambungan dilakukan dengan cara, dimana program selalu dibuat berdasarkan strategi dan hasil dari implementasi program dijadikan masukan untuk strategi lebih lanjut,
- 4) Agar lebih praktis, penekanan dilakukan pada proses maupun hasil-hasil perencanaan, implementasi dan feed-back.

Strategi pembangunan ekonomi berbasis wilayah ini mendasarkan kegiatannya pada *sumber daya andalan* yang ada pada wilayah tersebut. Tentunya sumber daya tidak sama pada setiap wilayah. Sebetulnya ada beberapa sumber daya yang diberi penekanan dalam pendekatan ini, yaitu :

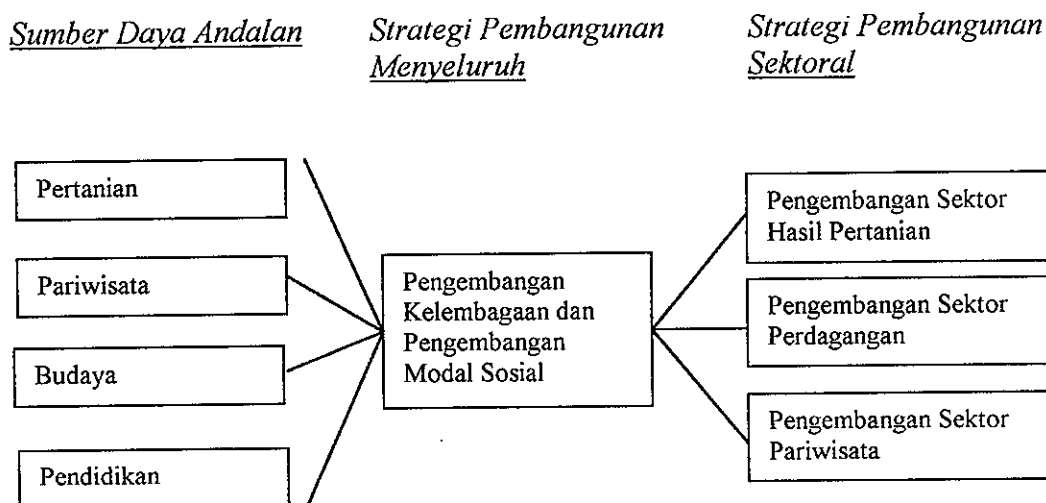
- a) Sumber daya pertanian, termasuk kehutanan dan perikanan,
- b) Sektor pariwisata, termasuk sumber daya alam, kultur, lansekap dan pemandangan kota (*townscape*),
- c) Kebudayaan termasuk status wilayah yang telah ditetapkan,
- d) Sumber daya manusia termasuk lembaga pendidikan dan penelitian.

Perlu diingat bahwa dalam dunia modern yang penuh inovasi, sumber daya manusia semakin dirasakan penting dibanding sumber daya alam, sehingga sumber daya untuk pembangunan lebih dapat diciptakan. Arah pembangunan tergantung pada kondisi setempat, tetapi pedoman umum untuk mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Penciptaan lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan,
- b) Kesenambungan sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembangaan,
- c) Pembangunan desa dan kota yang seimbang melalui hubungan timbal balik,

- d) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pengembangan kemampuan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,
- e) Peningkatan kultur setempat.

Setiap wilayah dapat mencari simbol masing-masing yang menarik untuk menggambarkan arah pembangunannya dalam rangka mengkonsolidasikan kegiatan pembangunan dan juga untuk mempromosikan wilayahnya di dalam negeri ataupun di luar negeri (*region sales*). Secara lebih spesifik strategi pembangunan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR 2.3
STRATEGI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA LOKAL YANG DIANDALKAN

Sumber : Ardani, 1992:9

Pengembangan modal sosial harus diarahkan untuk kesinambungan sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan dari bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Sebagai tambahan, pembangunan harus juga mempertimbangkan preservasi dan penataan lansekap dan pemandangan kota (*townscape*) untuk mempertahankan identitas masing-masing wilayah yang akan mendorong masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan wilayah. Jaringan dari berbagai tipe modal sosial harus ditetapkan untuk mendukung berbagai tipe kegiatan pembangunan ekonomi. Contohnya, berkaitan dengan alur informasi atau alur pergerakan, alur “horizontal” antar ibukota pada tingkat yang sama semakin penting di samping alur “vertikal” konvensional yang hanya menghubungkan antar ibukota pada level yang berbeda.

2.5.5 Pengembangan Wilayah Berbasis Kompetisi

Paradigma baru dalam strategi pengembangan wilayah adalah memenangkan persaingan antar wilayah. Persaingan antar wilayah merupakan fenomena tersendiri dalam dinamika perekonomian dewasa ini (Alkadri, 1999). Eksistensi suatu wilayah akan ditentukan oleh kemampuan menciptakan basis keunggulan dalam persaingan ekonomi antar wilayah.

Terdapat tiga pilar pengembangan wilayah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Ketiga pilar ini merupakan basis untuk memenangkan persaingan antar wilayah. Sementara itu, ada pula tiga fenomena yang berperan penting dalam peningkatan intensitas persaingan antar wilayah, yakni trend perdagangan global (*global trade*), kemajuan teknologi (*technology progress*) dan perubahan dalam sistem kemasyarakatan (*society system*).

Fenomena-fenomena tersebut menuntut adanya suatu paradigma baru dalam pengembangan wilayah, jika tidak ingin tersisih dari persaingan. Pembangunan ekonomi yang selama ini yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan keunggulan komperatif berupa kekayaan alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah, tidak akan menjamin keberlanjutan wilayah tersebut.

Paradigma baru pembangunan harus dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya saing yang tinggi. Porter

dalam Alkadri (1999) menggambarkan bahwa faktor keunggulan komperatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus, yaitu *inovasi*. Suatu wilayah bisa meraih keunggulan daya saing melalui empat hal, yaitu :

- a) Keunggulan faktor produksi,
- b) Keunggulan inovasi,
- c) Kesejahteraan masyarakat dan
- d) Besarnya investasi.

2.6 Pengembangan Ruang Terpadu

Pendekatan terpadu (*integrated*) merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan di wilayah pusat kota (kota utama) dan desentralisasi yang menekankan pada penyebaran investasi pada wilayah belakang (perdesaan). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan yang dilaksanakan berdasarkan pertumbuhan berimbang. Argumen mengenai pendekatan terpadu dalam lingkup spasial dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan (Rondinelli, 1985:1-2)

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wilayah secara merata ini, ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut (ibid:52-60) :

- (a) Strategi harus diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi pertumbuhan perkonomian wilayah. Tujuannya agar secara langsung dapat meningkatkan produktifitasnya, memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk wilayah belakang.

- (b) Investasi yang cenderung dipusatkan di kota utama harus didesentralisasikan ke wilayah-wilayah yang mampu berfungsi sebagai pusat-pusat fasilitas pelayanan, pemasaran, distribusi dan transformasi bagi penduduk sekitarnya. Ini dimaksudkan agar wilayah perdesaan memiliki akses seluas-luasnya bagi usaha pengembangannya. Dengan demikian wilayah perkotaan dan perdesaan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi,
- (c) Dalam kerangka tata ruang regional, permukiman ditempatkan dalam suatu sistem yang secara fungsional saling berkaitan dan terintegrasi. Sistem tersebut pada prinsipnya merupakan sistem pusat-pusat pelayanan yang disusun secara hierarkhis berdasarkan karakteristik fungsi dan peranan permukimannya. Fungsi dan peran permukimannya ditentukan berdasarkan kegiatan pelayanan dan lingkup pelayanannya.

2.7 Konsep Spasial dalam Lingkup Wilayah

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep inilah yang tidak ada dalam teori ekonomi, sehingga dikatakan analisis ekonomi berada pada alam tanpa ruang (*spaceless world*). Padahal dalam konsep ilmu ekonomi telah dapat diterangkan tentang “apa”, “berapa”, “bagaimana”, “untuk siapa” dan “bila mana” dalam konteks produksi. Namun belum menjelaskan “di mana” aktivitas produksi tersebut dilaksanakan.

Konsep ruang atau spasial mempunyai beberapa unsur, yaitu : (1) jarak, (2) lokasi, (3) bentuk dan (4) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dengan segala kekayaannya membutuhkan

organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah.

Whittlessey dalam Budiharsono (2001:13) memformulasikan pengertian tata ruang berdasarkan : (1) unit areal konkrit, (2) fungsionalitas di antara fenomena, dan (3) subyektifitas dalam penentuan kriteria. Kemudian Hartchorne mengintroduksi unsur hubungan fungsional diantara fenomena, yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang Struktur fungsional bersifat subyektif, karena dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan kriteria subyektif.

Menurut Hanafiah (1996) konsep jarak mempunyai dua pengertian, yaitu jarak absolut dan jarak relatif yang mempengaruhi konsep jarak absolut dan relatif. Konsep jarak dan ruang relatif ini berkaitan dengan hubungan fungsionalitas di antara fenomena dalam struktur fungsional tata ruang. Dasar dan konsep ruang relatif adalah jarak relatif. Jarak relatif merupakan fungsi dari pandangan atau persepsi terhadap jarak. Dalam konsep ruang absolut, jarak diukur secara fisik, sedangkan dalam konsep ruang relatif, jarak diukur secara fungsional berdasarkan unit ongkos, waktu dan usaha. Ide mendasar dari konsep ruang relatif adalah persepsi terhadap dunia nyata, yang mana akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, psikologi dan sebagainya.

2.8 Aspek-Aspek Pengembangan Wilayah

Perkembangan suatu kota dan wilayah, ditentukan atas empat aspek utama, yaitu *aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek lingkungan* (Widyaningsih, 2001). Keempat aspek inilah yang dijadikan dasar kriteria terhadap Analysis Hierarchy

Process (AHP) strategi pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang. Dari keempat aspek ini dapat dijabarkan lagi menjadi sub-sub kriteria, yaitu :

(1) Sub kriteria berdasarkan aspek ekonomi terdiri dari :

- *Pendapatan daerah (PAD)*, merupakan hal pokok yang diperlukan menuju kemandirian wilayah menyongsong otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk itu daerah harus memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan berinovasi mencari sumber lain.
- *Pendapatan masyarakat*. Daerah yang mandiri dan maju akan diperlihatkan oleh kemakmuran masyarakatnya (*social welfare*) ditandai dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari *saving*, *investasi* dan *produktivitas* yang tinggi.
- *Kesempatan kerja*. Daerah yang maju akan menarik datangnya tenaga kerja, karena tingkat upah dan kesempatan kerja yang tinggi.

◆ Sub kriteria berdasarkan aspek sosial budaya, terdiri dari :

- *Kelembagaan*, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pengelolaan daerah, yaitu struktur kelembagaan yang profesional dan kaya fungsi.
- *Pendidikan*. Tingkat pendidikan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan.

(2) Sub kriteria berdasarkan aspek fisik, terdiri dari :

- *Tata guna lahan*. Pola tata guna lahan meliputi pengaturan penggunaan tanah dan ruang. Kepastian penggunaan tata guna lahan merupakan faktor keteraturan struktur kota baik fisik maupun non-fisik.

- *Ketersediaan prasarana dan sarana*, menjadi faktor penunjang perkembangan daerah. Ini akan menciptakan kelancaran aksesibilitas dan menarik investasi.
- *Hubungan antar daerah*. Keberadaan suatu daerah akan tergantung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, tidak ada daerah yang maju tanpa keterkaitan dengan yang lain. Hubungan komplementer yang saling menguntungkan akan berdampak terhadap kemajuan daerah.

(3) Sub kriteria berdasarkan aspek lingkungan, terdiri dari :

- *Kelestarian lingkungan*,

2.9 Rangkuman Kajian Teori

Teori-teori yang telah dikemukakan di atas, dapat dirangkum sesuai dengan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian ini, sehingga secara teoritis dapat menjawab pertanyaan penelitiannya. Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dilakukan adalah :

1. **Pusat-pusat pertumbuhan**, yang bertujuan membangkitkan daerah terbelakang, mendorong dekonsentrasi wilayah, memodifikasi sistem kota-kota dan mencapai keseimbangan perkembangan wilayah,
2. **Pengembangan ekonomi lokal**, yang pada dasarnya menganggap bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan yang ada di wilayah tersebut, meliputi semua *stakeholder* yang ada,
3. **Pengembangan ekonomi basis**, yaitu dengan mengembangkan sektor-sektor basis yang ada pada wilayah penelitian (Kota Sawahlunto) dengan terlebih dahulu menentukan sektor tersebut melalui analisis LQ dan Shift-Share,
4. **Pengembangan wilayah berbasis kompetisi**, merupakan suatu pendekatan yang didasarkan atas kebutuhan untuk memenangkan persaingan antar wilayah, yaitu

didasarkan atas ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta inovasi,

5. **Pembangunan ekonomi berbasis wilayah**, merupakan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dengan betul-betul berdasarkan sumber daya andalan yang ada pada wilayah tersebut dengan melibatkan semua stakeholder,
6. **Pengembangan ruang terpadu**, yang bertujuan mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi yang ada dengan keruangannya, terutama daerah pusat dengan hinterlandnya.

Dari berbagai teori pengembangan wilayah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah menyangkut aspek-aspek berikut, yaitu *aspek ekonomi, sosial budaya, fisik dan lingkungan*.

Konsep-konsep yang dikembangkan tersebut tentunya perlu mendapat legitimasi dari para stakeholder yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk itu dilakukan metoda Analytical Hierarchy Process, yang merupakan suatu metoda analisis yang dipakai untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan melalui cara yang sederhana, kreatif, fleksibel akan tetapi tetap menjamin konsistensi keputusan yang diambil.

B A B III

GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

3.1 Sejarah Kota Sawahlunto

Sawahlunto adalah salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat, berada di jajaran Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Riwayat kehadirannya berbeda dari kota dan daerah lain di propinsi ini. Kota seperti Payakumbuh, Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang dan Solok terbentuk karena adanya perkembangan komunitas Minangkabau, sedangkan Sawahlunto terbentuk oleh usaha pertambangan batubara pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1887, Sawahlunto mulai menjadi permukiman pekerja tambang ketika uang sebesar 5,5 juta gulden ditanamkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membangun berbagai fasilitas perusahaan tambang batubara. Permukiman ini terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang.

Investasi besar-besaran untuk aktivitas pertambangan ini, terutama untuk membangun jalur kereta api dari Sawahlunto ke Padang, akhirnya membuat Sawahlunto menjadi daerah yang terbuka dan dikenal luas saat itu. Tahun 1894, jalur kereta api mulai dioperasikan, sehingga usaha pertambangan batubara terus meningkat dari hanya puluhan ribu ton menjadi ratusan ribu ton per-tahun, dari usaha yang rugi menjadi usaha dengan laba besar.

Tahun 1918, Sawahlunto dikategorikan sebagai *Gemeentelijk Ressort* atau *Gemeente* dengan luas wilayah 779 ha, hal ini berkaitan dengan puncak keberhasilan kegiatan pertambangan tersebut. Pada tahun 1930 wilayah ini berpenduduk 43.576 orang, diantaranya 564 orang adalah Bangsa Belanda (Eropa). Walaupun demikian Sawahlunto belum sempat menjadi *Stadsgemeente*, yang penyelenggaraan

pemerintahannya dilakukan oleh *Burgemeester* (Walikota) dan *Stadsgemeenteraad* (DPRD).

Sejak tahun 1940 sampai dengan akhir tahun 70-an produksi tambang batubara Ombilin merosot tajam, kembali hanya puluhan ribu ton, karena kurangnya perhatian pemerintah. Sawahlunto pun mengalami kemerosotan yang diindikasikan oleh menurunnya jumlah penduduk menjadi 13.561 orang pada sensus 1980. Akhirnya dengan menambah beberapa fasilitas, perubahan manajemen dan penerapan teknologi baru, usaha pertambangan meningkat kembali sejak awal tahun 80-an. Produksinya meningkat melebihi satu juta ton pertahun pada akhir tahun 90-an. Penduduk Sawahlunto juga meningkat menjadi 15.279 orang menurut sensus tahun 1990, namun demikian laju pertumbuhan penduduk yang hanya 1,2 % pertahun masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 1,62 % dan tidak tampak mempunyai korelasi dengan peningkatan produksi batubara.

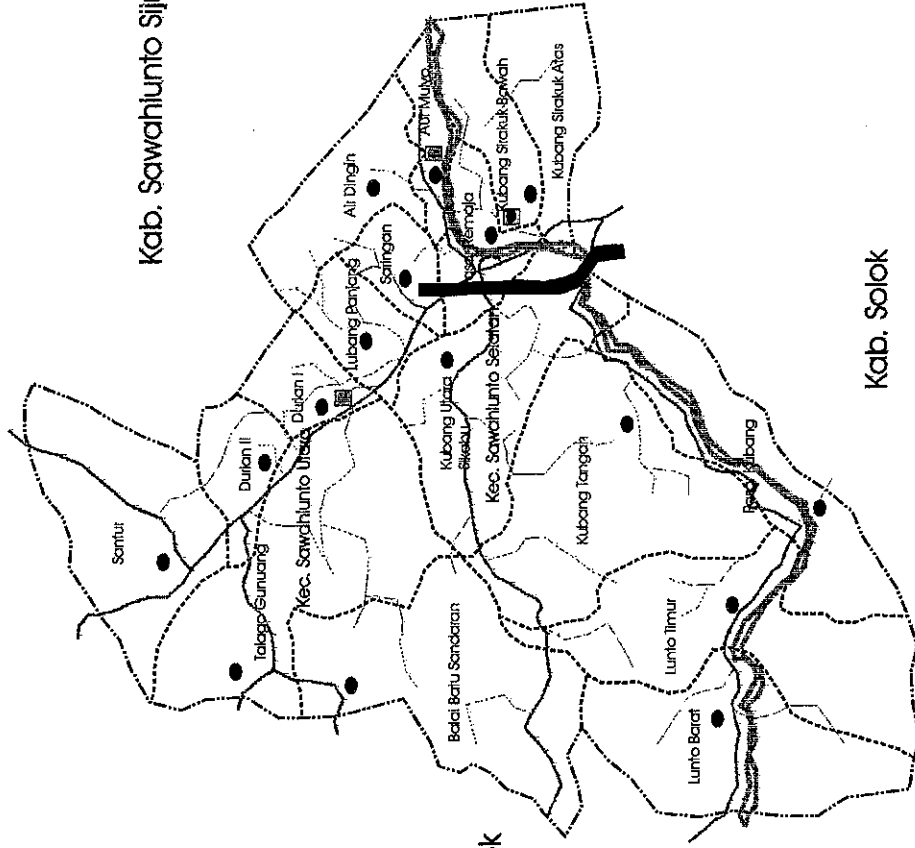
Tahun 1990 wilayah administrasi Sawahlunto diperluas dari hanya 779 ha menjadi 27.344 ha yang membawa konsekuensi jumlah penduduknya meningkat. Berdasarkan hasil survai penduduk antar sensus 1995, penduduk Sawahlunto menjadi 55.095 orang. Walaupun demikian Sawahlunto tidak dengan sendirinya menjadi kota yang lebih besar, seperti pada kota-kota yang dimekarkan. Bentangan alam yang berbukit-bukit telah menyebabkan Sawahlunto menjadi semacam federasi beberapa kota kecil dan permukiman perdesaan. Pertumbuhan penduduk ternyata hanya bersifat sementara, karena berdasarkan sensus tahun 2000, penduduk Sawahlunto menunjukkan gejala penurunan, hanya 50.668 orang, artinya selama lima tahun telah terjadi penurunan sebesar 8 %. Penyebab utamanya adalah karena sebagian perumahan pegawai PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PT BA UPO) dipindahkan keluar

wilayah Kota Sawahlunto. Dari sisi ini terlihat jelas bahwa kegiatan pertambangan batubara signifikan terhadap perkembangan penduduk Kota Sawahlunto.

Aktivitas pertambangan batubara Ombilin selama ini mempengaruhi Kota Sawahlunto melalui lima cara, yaitu **pertama** melalui kewajiban perusahaan tambang batubara untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah kota berupa pajak, retribusi dan iuran, **kedua** melalui prasarana, fasilitas dan pelayanan yang dikembangkan dan dikelola perusahaan, **ketiga** melalui para karyawan dan pekerjanya yang bermuim dan membelanjakan pendapatannya serta menumbuhkan budaya Kota Sawahlunto, **keempat** melalui kontrak atau subkontrak suatu paket kegiatan kepada perusahaan lokal dan **kelima** melalui kegiatan sosial perusahaan pertambangan.

Selama lebih seratus tahun aktivitas penambangan, telah menghasilkan ± 30 juta ton batubara selama ini dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Walaupun demikian, masa depan penambangan batu bara Ombilin ini belum jelas, karena cadangan yang tersedia hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. Dapat tidaknya eksploitasi tersebut tergantung pada harga, permintaan pasar dan penguasaan teknologi. Selain itu penyelenggaraan pertambangan juga mengalami re-orientasi oleh berkembangnya semangat desentralisasi. Apapun yang terjadi dengan pertambangan Ombilin, pemerintah dan masyarakat Kota Sawahlunto bertekad menjadikan Kota ini sebagai kota wisata berbasis pertambangan.

Kab. Sawahlunto Sijunjung



Kab. Sawahlunto Sijunjung

Kab. Solok



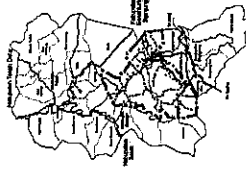
PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
 KOTA SAWAHLUNTO PASCAMBANG

PETA
 KOTA SAWAHLUNTO SEBELUM PERLUASAN TAHUN 1990

KETERANGAN :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Kota
- Kecamatan
- Kelurahan



Nomor Gambar : 3.1
 Halaman : 66



Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto

3.2 Gambaran Umum Wilayah Kota Sawahlunto

3.2.1 Kondisi Fisik

Secara astronomis Kota Sawahlunto terletak pada : 00.34-00.46 LS dan 100.41-100.49 BT, antara jajaran Bukit Barisan di wilayah Propinsi Sumatera Barat, pada elevasi 250 s/d 600 meter dari permukaan laut, 104 km di sebelah Timur Kota Padang, 134 km di sebelah Selatan Kota Bukit Tinggi dan dilalui oleh jalan raya Lintas Sumatera. Wilayah administrasi Kota Sawahlunto seluas 27.334 ha berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Solok di sebelah Barat dan Selatan, Kabupaten Tanah Datar di sebelah Utara dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung di sebelah Timur. Kota Sawahlunto terdiri atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Talawi, Barangin, Lembah Segar dan Silungkang.

Bentang alam Kota Sawahlunto terbentuk oleh perbukitan terjal, perbukitan landai dan dataran. Perbukitan terjal merupakan bentang alam yang dominan. Perbukitan ini dicirikan oleh bukit membulat dengan lereng curam sampai terjal. Kondisi ini sebagaimana dikatakan Bintarto (1978) merupakan kendala bagi pengembangan wilayah dan penataan ruangnya. Perbukitan landai terletak di tengah Kota Sawahlunto, sebarannya sempit dan memanjang sejajar Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Pola arah Sesar Sawahlunto hampir sama dengan pola Sesar Besar Sumatera yang memanjang dari Teluk Semangka di Propinsi Lampung sampai ke Aceh.

Lahan Kota Sawahlunto yang bisa dimanfaatkan dengan sedikit kesukaran teknis dan aman tanpa rekayasa, hanya seluas 5.183 ha atau 18,5 % dari luas wilayahnya. Secara lebih rinci kondisi kemiringan wilayah adalah sebagai berikut :

TABEL III.1
LUAS KOTA SAWAHLUNTO MENURUT KEMIRINGAN

Kecamatan	Kemiringan dan Luas Wilayah (dalam ha)					Jumlah
	0-2 %	2-15 %	15-25 %	25-40 %	> 40 %	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.430	2.136	8.855
Lembah Segar	240	358	694	1.856	2.110	5.285
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber: Agenda 2020 Pemerintah Kota Sawahlunto, 2002

Kota Sawahlunto dialiri oleh Sungai Batang Ombilin di Kecamatan Talawi dan anak sungainya, yaitu Batang Malakutan yang mengalir dari Kabupaten Solok ke Timur melewati Kecamatan Barangin akhirnya bertemu dengan Sungai Batang Ombilin. Anak sungai yang lain adalah Batang Lunto di Kecamatan Barangin, mengalir dari Barat menuju Timur dan membelah Kota Lama Sawahlunto di Kecamatan Lembah Segar dan bermuara di Batang Ombilin. Sungai Batang Sumpahan berhulu di Kecamatan Barangin kemudian bertemu dengan Sungai Batang Lunto sebagai anak sungainya, sedangkan Sungai Lasi yang berhulu di Kabupaten Solok mengalir menyusur sepanjang jalan raya lintas sumatera, Solok ke Sijunjung melalui Kota Sawahlunto di Kecamatan Silungkang dan bertemu dengan Batang Ombilin di Sungai Indragiri. Jadi Kota Sawahlunto adalah daerah hulu Sungai Indragiri yang bermuara di Selat Malaka Propinsi Riau.

3.2.2 Penyebaran Penduduk dan Pola Perkotaan

Survai penduduk antar sensus tahun 1995 mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Sawahlunto adalah 55.090 orang, sedangkan pada sensus penduduk tahun 2000 tercatat sebesar 50.668 jiwa, yang artinya selama lima tahun jumlah penduduknya telah menurun sebesar 8 %. Hal ini disebabkan terutama oleh dipindahkannya sebagian perumahan pegawai Unit Pertambangan Ombilin ke Padang Sibusuk yang berada di luar wilayah administratif Kota Sawahlunto.

Sekitar 27 % dari keseluruhan penduduk terkonsentrasi di sepuluh wilayah kelurahan yang luas keseluruhannya hanya 2 % dari seluruh luas wilayah Kota Sawahlunto dan merupakan wilayah kota lama sebelum perluasan. Kawasan kota lama yang luasnya 5,84 km² dan ditempati oleh 13.731 orang. Berarti kepadatan penduduknya mencapai 2.354 orang per-km² (23 orang/ha). Penduduk selebihnya yang berjumlah 41.359 orang tersebar di wilayah perdesaan yang secara keseluruhan luasnya 267,50 km² atau kepadatan rata-rata hanya 154 orang per-km².

Wilayah Kota Sawahlunto menampung tiga kota kecil, yaitu Silungkang, Talawi dan kota lama Sawahlunto (yang termasuk sebagian dari wilayah Kecamatan Lembah Segar dan Barangin). Kota kecil ini dihubungkan oleh jalan regional dan terikat dalam satu wilayah administrasi, tetapi dipisahkan oleh lembah dan bukit. Pola perkembangan kotanya adalah *pola linier*, dimana perkembangannya berada di sepanjang jalan utama dari Muaro Kalaban di Kecamatan Silungkang sampai ke Kecamatan Talawi. Silungkang terkenal sebagai pusat tenun dan industri kerajinan, yang dilalui oleh jalan raya lintas sumatera dan pada kolonial dikenal sebagai basis pemberontakan komunis tahun 1927. Talawi adalah pusat pelayanan perdesaan dan pertanian, yang terkenal sebagai tempat kelahiran dan makam Pahlawan Pergerakan Nasional Mr. Muhammad Yamin. Kecamatan Talawi ini mempunyai dataran paling luas, sedangkan kota lama Sawahlunto merupakan kota tambang yang dibangun dan berkembang oleh adanya tambang batubara Ombilin.

Sebetulnya Pemerintah Kolonial Belanda telah merancang dan merencanakan pola perkotaan atas tiga bagian, yaitu *pertama* Kota Sawahlunto yang merupakan pusat pelayanan kegiatan tambang dan permukiman para administrator, profesional dan pimpinan perusahaan, *kedua* permukiman buruh tambang di Kampung Surian dan

ketiga tempat pengekapan pekerja paksa atau lebih dikenal sebagai orang rantai di Sungai Durian.

Sebagai pusat pelayanan tambang dan bermukim kalangan atas pegawai tambang, Sawahlunto telah dirancang dengan sempurna sebagaimana layaknya suatu kota. Jaringan jalan, penataan bangunan, *open space*, sistem drainase dan sanitasi disiapkan dan ditata dengan memperhatikan kaidah tata kota yang layak untuk ditinggali. Sungai Batang Lunto yang membelah kota dibuat menjadi kanal kota dengan tebing dibangun dari tembok penahan dan diapit jalan. Dasar kanal dibuat bertangga dengan bendung kecil, sehingga arus sungai terkendali.

Gaya arsitektur Kota Sawahlunto pada awalnya ada dua macam, yaitu arsitektur kolonial atau *gaya indische* dan arsitektur pecinan. Kantor pertambangan Ombilin, fasilitas penginapan, tempat berkumpul (*societeit*) dan hiburan, gereja, sekolah, toko, tempat tinggal pejabat dan pimpinan perusahaan dibangun dengan gaya *indische*. Kemudian dapat pula dijumpai toko-toko dengan arsitektur pecinan.

Keindahan kehidupan Kota Sawahlunto dimasa lalu disebabkan karena di tempat ini tinggal administratur dan profesional Belanda yang berjumlah hampir seribu orang (Kuswartojo, 2001). Status sosial yang tinggi, telah mampu mendorong tumbuhnya berbagai fasilitas pelayanan kota.

Sekarang ini, lapisan menengah ke atas masyarakat Sawahlunto sebagian besar terdiri dari pegawai negeri dan pegawai Unit Pertambangan Ombilin. Kenyataannya, lapisan ini kurang dapat mendorong berkembangnya fasilitas dan pelayanan kota. Pelayanan pendidikan, rekreasi, pergaulan sosial dan kebutuhan rumah tangga dipasok langsung dari Kabupaten Solok atau Kota Padang. Kondisi ini menandakan perubahan

fungsi kota dari kota dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat lapisan menengah ke atas menjadi pusat pelayanan perdesaan.

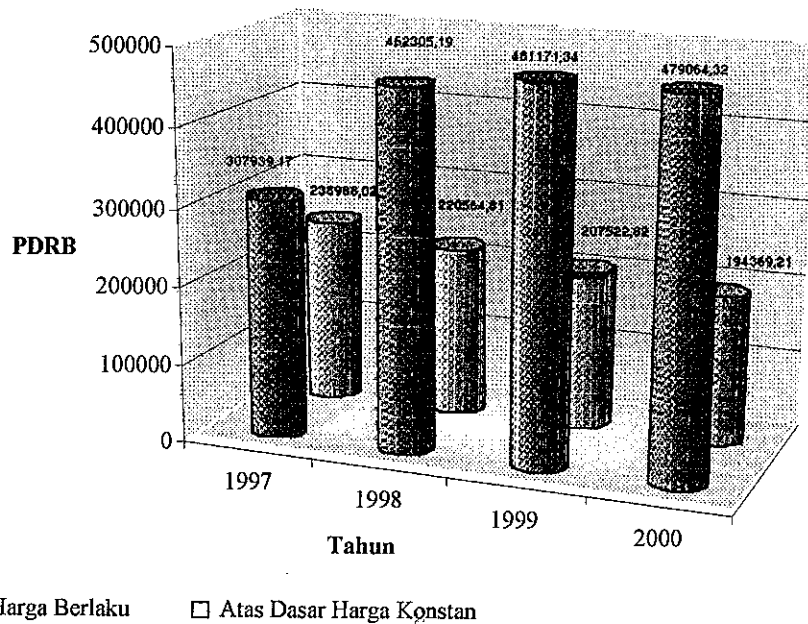
3.2.3 Kondisi Perekonomian Kota Sawahlunto

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2000 secara umum telah berangsur secara perlahan kearah perbaikan. Ini ditandai dengan pertumbuhan yang positif diberbagai sektor perekonomian, walaupun belum secara maksimal dapat pulih dari krisis multi dimensi yang telah melanda negeri ini sejak beberapa tahun terakhir.

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2000 masih mengalami penurunan yaitu sebesar 6,34 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan yang sangat drastis pada sektor pertambangan dan penggalian khususnya subsektor pertambangan non migas (batubara) yaitu sebesar 20,91 persen. Sektor lain yang mengalami penurunan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran khususnya subsektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 5,58 persen yang merupakan dampak dari penurunan volume produksi batubara, sedangkan sektor lain pada umumnya di tahun 2000 telah mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Kota Sawahlunto menurut harga berlaku tahun 2000 secara nominal adalah sebesar 479,06 milyar rupiah yaitu mengalami penurunan sebesar 2,11 milyar rupiah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 481,17 milyar rupiah. Sedangkan tingkat inflasi untuk tahun 2000 adalah sebesar 6,30 persen, relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang mencapai 10,62 persen.

Bila dilihat tanpa pengaruh batubara maka perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 3,80 persen yaitu dari 122,39 milyar rupiah pada tahun 1999 menjadi 127,04 milyar rupiah pada tahun 2000. Dan bila dilihat menurut harga berlaku maka PDRB Kota Sawahlunto mengalami peningkatan secara

nominal sebesar 25,85 milyar rupiah yaitu dari 270,50 milyar rupiah pada Tahun 1999 menjadi 296,35 milyar rupiah di tahun 2000.



GAMBAR 3.2
PERKEMBANGAN PDRB KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 1997-2000

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000

3.2.3.1 Pertumbuhan Sektoral

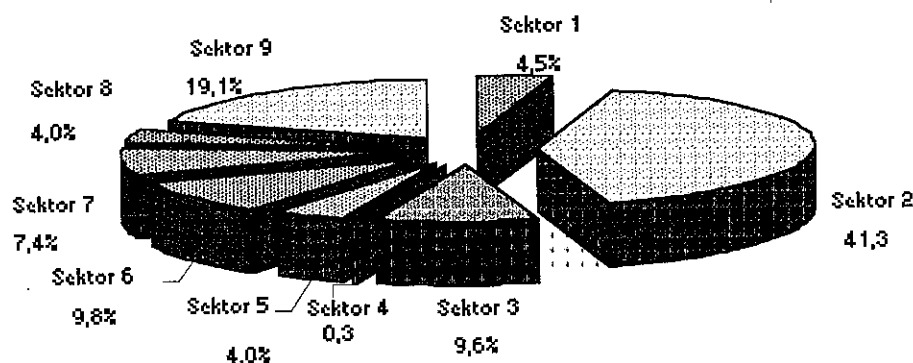
Perubahan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari perubahan masing-masing sektor dan subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian tersebut. Secara keseluruhan perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 6,34 persen (dengan batubara), sedangkan tanpa batubara mengalami peningkatan sebesar 3,80 persen. Bila dilihat masing-masing sektor, maka pada tahun 2000 ini terjadi penurunan yang cukup tajam pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 18,22 persen. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya subsektor pertambangan non migas (batubara) yang mencapai -20,91 persen. Sektor lain yang mengalami penurunan

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran khususnya subsektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 5,58 persen yang merupakan dampak dari penurunan volume produksi batubara.

Sedangkan sektor lain pada umumnya mengalami pertumbuhan, pertumbuhan terbesar terjadi disektor pengangkutan dan komunikasi yaitu mencapai 11,11 persen dan diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 6,17 persen sedangkan sektor lainnya pertumbuhan rata-rata di bawah empat persen, tapi masih belum mampu meningkatkan perekonomian Kota Sawahlunto secara umum.

3.2.3.2 Peranan Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan

Karakteristik perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan daerah lain di Propinsi Sumatera Barat, karena perekonomian di Kota Sawahlunto sampai tahun 2000 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sub-sektor pertambangan non migas (batubara) sedangkan daerah lain pada umumnya masih didominasi oleh sektor pertanian.



Keterangan :

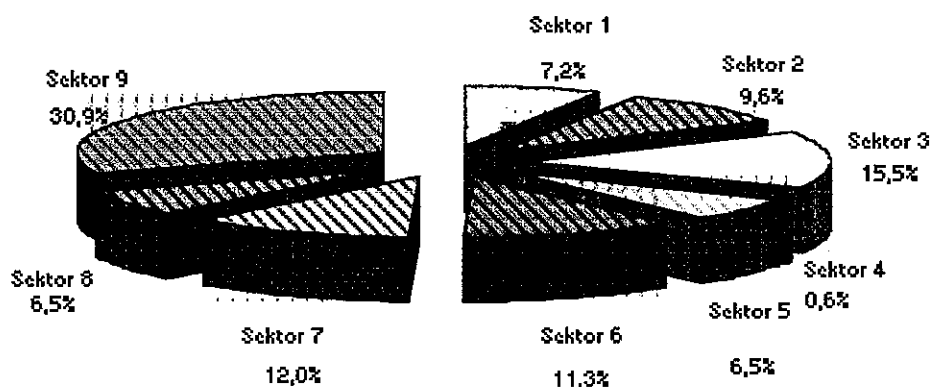
- | | |
|--|--|
| Sektor 1 : Pertanian | Sektor 6 : Perdagangan, Hotel dan Restoran |
| Sektor 2 : Pertambangan dan Penggalian | Sektor 7 : Pengangkutan dan Komunikasi |
| Sektor 3 : Industri Pengolahan | Sektor 8 : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan |
| Sektor 4 : Listrik, Gas dan Air Bersih | Sektor 9 : Jasa-Jasa |
| Sektor 5 : Bangunan | |

GAMBAR 3.3
KONTRIBUSI (%) SEKTOR-SEKTOR DALAM PEMBENTUKAN PDRB
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2000 (DENGAN BATUBARA)

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto Th 2000

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tahun 2000 mencapai 41,28 persen, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami penurunan sebesar 4,64 persen. Besarnya kontribusi sektor ini tidak terlepas dari kontribusi subsektor pertambangan non migas (batubara) yang mencapai 35,36 persen. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor jasa-jasa yaitu sebesar 19,14 persen. Sedangkan sektor lain kontribusinya masih dibawah 10 persen.

Bila ditinjau dengan mengeluarkan kontribusi batubara, maka sektor yang paling dominan membentuk PDRB Kota Sawahlunto tahun 2000 adalah sektor jasa-jasa (30,94 persen), sektor industri pengolahan (15,45 persen), pengangkutan dan komunikasi (12,01 persen) dan perdagangan dan restoran (11,32 persen). Keadaan ini tidak mengalami perubahan yang berarti bila dibandingkan dengan kontribusi masing-masing sektor pada tahun 1999. Sementara sektor pariwisata khususnya yang berbasis wisata tambang belum memberikan dampak terhadap perekonomian Kota Sawahlunto.



Keterangan :

Sektor 1 : Pertanian	Sektor 6 : Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sektor 2 : Pertambangan dan Penggalian	Sektor 7 : Pengangkutan dan Komunikasi
Sektor 3 : Industri Pengolahan	Sektor 8 : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Sektor 4 : Listrik, Gas dan Air Bersih	Sektor 9 : Jasa-Jasa
Sektor 5 : Bangunan	

GAMBAR 3.4
KONTRIBUSI (%) SEKTOR-SEKTOR DALAM PEMBENTUKAN PDRB
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2000 (TANPA BATU BARA)

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto tahun 2000

Selama kurun waktu 1995-2001 peran sektor pertambangan terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL III.2
KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 1995-2001

Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB (%)						
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	3,77	4,11	4,03	3,55	4,00	4,48	4,54
2. Pertambangan	50,96	43,24	41,75	46,87	45,92	41,28	34,74
3. Industri	7,18	8,08	8,43	8,53	8,58	9,56	9,81
4. Listrik, gas dan air minum	0,35	0,62	0,45	0,25	0,32	0,35	0,36
5. Bangunan	5,16	6,69	6,43	3,78	3,66	3,99	5,74
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,44	8,64	8,54	9,28	9,58	9,79	8,72
7. Angkutan dan Komunikasi	5,72	6,50	7,15	6,26	6,48	7,43	7,45
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,15	3,46	3,45	3,72	3,74	3,99	4,26
9. Jasa-Jasa	15,26	18,65	19,77	19,80	17,74	19,14	24,20
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha 1997-2001, BPS Kota Sawahlunto

Walaupun menunjukkan indikasi penurunan seiring menipisnya cadangan batubara, namun perannya sangat dominan.

3.2.3.3 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang berasal dari hasil penghitungan antara total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, angka ini menunjukkan nilai rata-rata PDRB perorang pertahun. Tetapi angka ini tidak bisa digunakan sebagai suatu ukuran/indikator kemakmuran penduduk suatu daerah, kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut.

Di samping PDRB perkapita terdapat indikator lain yang lebih menggambarkan pendapatan masyarakat yaitu Pendapatan Regional Perkapita, karena Pendapatan Regional Perkapita ini merupakan PDRB yang sudah dikurangi dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto serta ditambah transfer netto kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Dari tabel III.3 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PDRB perkapita Kota Sawahlunto tahun 2000 yang menjadi 9,27 juta rupiah, sedangkan pada tahun 1999 hanya 9,10 juta rupiah. Dan bila dilihat tanpa pengaruh batubara pada tahun 2000 PDRB perkapita telah mencapai 5,74 juta rupiah, mengalami peningkatan yang cukup berarti bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang hanya 5,12 juta rupiah.

TABEL III.3
PDRB PERKAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA
TAHUN 1997-2000 (JUTA)

Uraian	Tahun	Nilai Nominal	
		Dengan Batubara	Tanpa Batubara
PDRB Perkapita	1997	5,727	3,416
	1998	8,504	4,684
	1999	9,104	5,118
	2000	9,273	5,736
Pendapatan Regional Perkapita	1997	5,201	3,100
	1998	7,718	4,241
	1999	8,253	4,627
	2000	8,411	5,189

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000

Pendapatan Regional Perkapita Kota Sawahlunto tahun 2000 adalah sebesar 8,41 juta rupiah (dengan batubara), sedangkan bila tanpa batubara maka Pendapatan Regional Perkapita sebesar 5,18 juta rupiah.

3.2.3.4 Perkembangan Kelompok Sektor PDRB

Berikut disajikan PDRB Kota Sawahlunto yang dibagi menurut kelompok sektor. Kelompok sektor perekonomian dibagi atas tiga kelompok, pembagian ini didasarkan atas input dan output serta asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen. Kelompok sektor perekonomian dibagi atas tiga yaitu Kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier.

Kelompok sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan proses tingkat dasar, yang termasuk kelompok ini adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan. Selanjutnya sektor yang sebahagian besar inputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan kedalam kelompok sekunder, kelompok ini meliputi sektor industri, sektor Listrik, gas dan air bersih, serta sektor bangunan. Sisanya yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa yang dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Sampai tahun 2000 ini, PDRB kelompok sektor Kota Sawahlunto masih didominasi oleh kelompok sektor primer. Dominasinya sudah agak menurun bila dibandingkan dengan tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari Tabel III.4, yaitu dari 49,91 persen pada tahun 1999 menjadi 45,76 persen pada tahun 2000 dan secara nominal turun sebesar 20,97 milyar rupiah. Kelompok sektor tersier yang berada pada urutan kedua memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Sawahlunto mengalami peningkatan sebesar 3,31 persen yaitu dari 37,52 persen pada tahun 1999 menjadi 40,34 persen pada tahun 2000 ini dan secara nominal terjadi peningkatan sebesar 12,75 milyar rupiah. Sedangkan kelompok sekunder pada tahun 2000 hanya memberikan kontribusi

sebesar 13,90 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 12,57 persen.

TABEL III. 4
NILAI TAMBAH DAN KONTRIBUSI KELOMPOK SEKTOR
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 1999-2000

Kelompok Sektor	Nilai Tambah (<i>Juta Rupiah</i>)		Kontribusi (<i>persen</i>)	
	1999	2000	1999	2000
Primer	240.173,24	219.205,77	49,91	45,76
Sekunder	60.481,35	66.590,24	12,57	13,90
Tersier	180.516,75	193.268,32	37,52	40,34
Total	481.171,34	479.064,33	100,00	100,00

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000

TABEL III. 5
NILAI TAMBAH DAN KONTRIBUSI KELOMPOK SEKTOR
PDRB 1999-2000 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993

Kelompok Sektor	Nilai Tambah (<i>Juta Rupiah</i>)		Pertumbuhan (<i>persen</i>)	
	1999	2000	1999	2000
Primer	97.014,78	81.087,73	-12,09	-16,42
Sekunder	28.784,97	29.630,85	0,11	2,94
Tersier	81.723,07	83.650,63	0,32	2,36
Total	207.522,82	194.369,21	-5,91	-6,34

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000

Tabel. III.5 menyatakan bahwa dua kelompok sektor yaitu kelompok sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 2,94 persen dan 2,36 persen. Peningkatan kedua kelompok sektor ini tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2000 ini karena terjadi penurunan

yang sangat drastis pada kelompok sektor primer yang mencapai 16,42 persen, sehingga secara umum terjadinya penurunan produktivitas perekonomian sebesar 6,34 persen.

3.2.3.5 Posisi Perekonomian Kota Sawahlunto terhadap Sumatera Barat

PDRB Kota Sawahlunto pada tahun 2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 2,14 persen terhadap PDRB Sumatera Barat, peranan ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang mencapai 2,33 persen. Penurunan peranan ini disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada sektor dominan di Kota Sawahlunto yaitu sektor pertambangan dan penggalan khususnya subsektor pertambangan non migas (batubara).

Bila dilihat secara sektoral, maka sektor yang paling dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan penggalan yaitu sebesar 24,72 persen, sedangkan sektor lain relatif kecil peranannya.

TABEL III.6
POSISI PEREKONOMIAN KOTA SAWAHLUNTO TERHADAP
PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT TAHUN 2000

Sektor	PDRB berlaku Sumatera Barat	PDRB berlaku Sawahlunto	Peranan (%)
1. Pertanian	5.096,12	21,47	0,42
2. Pertambangan	800,03	197,74	24,72
3. Industri Pengolahan	2.944,09	45,78	1,55
4. Listrik, Gas, dan Air bersih	295,86	1,69	0,57
5. Bangunan	1.027,38	19,12	1,86
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.043,96	46,88	1,16
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.020,01	35,58	1,19
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.098,87	19,10	1,74
9. Jasa-jasa	4.041,49	91,97	2,27
Total	20.690,90	479,07	2,14

Sumber : Laporan PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2000

3.2.3.6 Potensi Wisata Kota Sawahlunto

Potensi pariwisata Kota Sawahlunto sebetulnya dilihat dari alasan masa lalu. Warisan sejarah bertebaran di kota ini, ada banyak bangunan lama dengan arsitektur yang bernilai sejarah dan masih terpelihara dengan baik sampai sekarang. Lobang tambang yang membentang di bawah perut kota ini merupakan lorong panjang yang meninggalkan catatan sejarah dan menarik untuk dijelajahi.

Komponen-komponen wisata tambang yang ada dan bisa dikembangkan antara lain berupa :

(1) Tapak atau situs tambang dalam dan tambang terbuka,

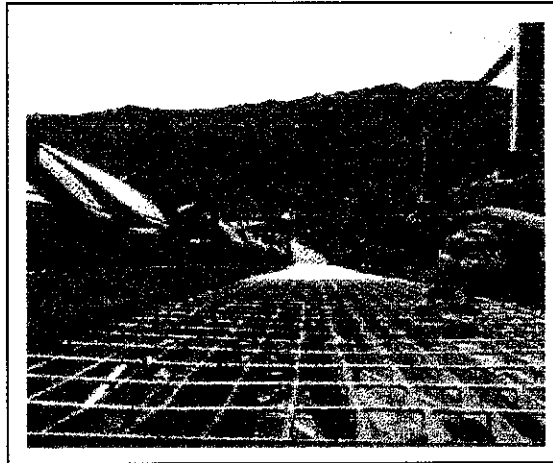
Situs tambang dalam berupa lobang dan lorong bawah tanah dengan berbagai instalasinya. Situs tambang terbuka akan menjadi danau buatan yang dimasa datang dapat dikembangkan menjadi taman tambang dan kawasan resort.



GAMBAR 3.5
SITUS TAMBANG TERBUKA YANG AKAN MENJADI DANAU BUATAN
DAN KEGIATAN TAMBANG DALAM

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto, 2001

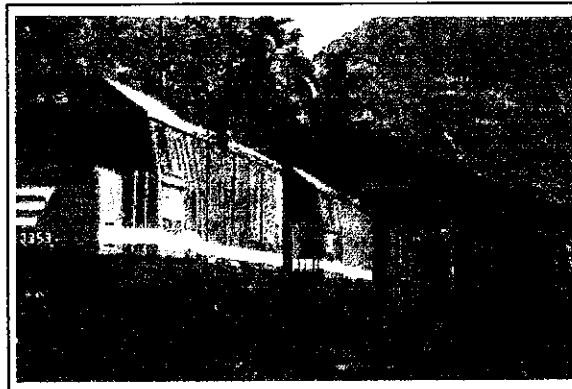
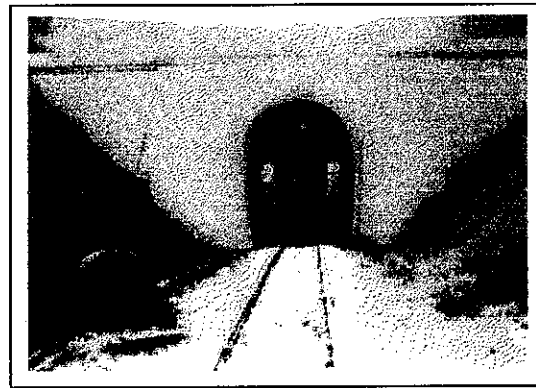
(2) Pemrosesan dan pengolahan hasil tambang, yaitu instalasi pencucian dan pemecahan (*sizing*) batubara.



GAMBAR 3.6
INSTALASI PEMROSESAN BATUBARA

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto, 2001

- (3) Pengangkutan hasil tambang, berupa cara pemuatan, gerbong kereta khusus dan jalur angkutan kereta api yang melalui terowongan.



GAMBAR 3.7
INSTALASI PENGANGKUTAN BATUBARA

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto, 2001

(4) Produk sosial budaya oleh kegiatan tambang,

Ada banyak peralatan dan perlengkapan kehidupan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batubara, seperti dapur umum, tempat tinggal orang rantai, bangunan *societeit* dan sebagainya. Tatanan permukiman dan gedung dengan berbagai gaya arsitekturnya yang dirancang dan disiapkan mengikuti tata nilai dan selera pengelola tambang. Industri kerajinan yang tumbuh dalam kaitannya dengan tambang dan batubara dan juga berbagai kesenian yang muncul dan bertahan oleh keanekaan asal-usul pekerja tambang batubara. Sejarah kehidupan buruh tambang sendiri termasuk upaya untuk menggerakkan perlawanan terhadap Pemerintahan Belanda.



GAMBAR 3.8
KESENIAN TRADISIONAL YANG TETAP BERTAHAN

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto, 2001

Potensi pariwisata berupa wisata sejarah terdapat pada Desa Talawi Mudiak, Kolok Nan Tuo, Kolok Mudiak, Talago Gunung, Balai Batu Sandaran, Kubang Utara Sikabu, Kubang Sirakuk, Saringan, Lunto, Silungkang Tigo dan Taratak Bancah. Wisata alam dan panorama terdapat di Desa Rantih, Durian II, Talago Gunung, Sijantang Koto, Tumpak Tengah, Data Mansiang, Kumbayau, Bukik Gadang, Air Dingin, Kubang

Sirakuk, Lumindai, Aur Mulyo, Kubang dan Silungkang Oso. Namun potensi-potensi tersebut belum dijamah, sampai sekarang baru sekedar identifikasi.

Keberagaman (pluralisme) merupakan kekayaan tersendiri bagi Kota Sawahlunto dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Pluralisme ini tetap berkembang dengan baik sampai sekarang. Sekurang-kurangnya ada empat etnik yang cukup memberikan warna pada kehidupan masyarakat dan budaya di kota ini, yakni masyarakat Minangkabau, Jawa, Sunda dan Batak. Menariknya, hubungan antar etnik ini sampai sekarang dapat berjalan dengan harmonis dan bersifat dinamis, dalam pengertian bahwa masing-masing etnik bisa memelihara dan mengembangkan identitas budayanya.

Kehadiran berbagai etnik tersebut, baik menetap maupun yang hanya sementara, tidak hanya meninggalkan jejak budaya, tetapi juga sejarah kemanusiaan yang menarik, seperti perjuangan kuli-kuli tambang yang tragis dan penuh tragedi. Di sela-sela tumbuhnya budaya tambang yang keras, lahir pula sosok manusia yang meskipun menjadi dewasa di luar Sawahlunto, tetapi melalui pemikiran-pemikiran yang dikembangkannya kemudian memberi pengaruh luas kepada bangsanya. DR. Soedjatmoko, diakui sebagai seorang cendekiawan besar Indonesia, Prof. Moh. Yamin merupakan founding father bangsa Indonesia yang keduanya lahir di Sawahlunto.

Bukan hanya itu, di tengah keberagaman masyarakat dan budaya ini, di Kota Sawahlunto juga terdapat potensi lain yang tidak kalah pentingnya. Di kota ini terdapat sentra-sentra kerajinan tangan dan makanan. Siapa yang tidak pernah mendengar industri kerajinan tenunan Silungkang. Sejak lama Nagari Silungkang dikenal sebagai penghasil tenunan songket sampai ke mancanegara. Demikian pula dengan industri

kecil lainnya, seperti kerajinan lidi kelapa di Desa Kumbayau, kerupuk di Nagari Kubang dan buah-buahan di Talawi.

Tidak lengkap kiranya jika tidak diidentifikasi potensi sektor lain yang akan mendukung pariwisata, yaitu berupa :

a) Sumber Daya Alam

Kondisi alam Kota sawahlunto yang berbukit, lembah yang dalam, kemiringan tinggi dan tanahnya labil telah menyebabkan masyarakatnya terpaksa menyesuaikan diri dengan kondisi alam seperti itu. Kebanyakan penduduk telah memilih bermukim di bagian yang ketinggian dengan kemiringan antar 25% - 40%, sementara daerah yang datar dan lembah-lembah yang subur dijadikan sebagai lahan pertanian dan persawahan. Di sekitar lahan permukiman atau pada daerah-daerah yang sulit mendapatkan air, ditanami dengan tanaman perkebunan, seperti kelapa, kayu manis, merica dan, enau, rambutan, durian, sawo, pepaya dan pisang, sehingga terciptalah pola penggunaan lahan seperti sekarang. Ini terdapat terutama di Kecamatan Talawi (Desa Tumpak Tengah, Bukit Gadang, Kumbayau, Talawi Mudiak dan Tumpak Tengah), sebagian Kecamatan Lembah Segar (Desa Lunto Barat/Timur dan Kubang) di Kecamatan Barangin (Desa Lumindai, Balai Batu Sandaran, Talago Gunuang dan Kolok). Sedangkan di Kecamatan Silungkang di Desa Taratak Bancah. Dari segi penggunaan lahan yang telah terjadi saat ini dibandingkan dengan keadaan topografi wilayahnya, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa peluang perluasan usaha pertanian sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi hasil pertanian harus dilakukan secara intensifikasi penggunaan lahan. Untuk menjaga kelestarian kawasan lindung dari

serobotan masyarakat, maka perlu diupayakan pengalihan orientasi usaha dari pertanian ke usaha kerajinan dan pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

b) Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto tahun 2001 adalah 50.875 orang dengan laju pertumbuhan 0,67 % pertahun. Dari jumlah sebanyak itu, penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas (Angkatan Kerja Partisipatif) terdapat sebanyak 30.130 orang atau lebih kurang 55,86 persen dari total penduduk. Sedangkan yang sudah bekerja, baik di sektor primer, sekunder dan tersier sebesar 19.708 orang. Jumlah angkatan kerja adalah 24.143 orang, yang belum mendapat pekerjaan sebanyak 3.203 orang dan sisanya masih dalam jenjang pendidikan.

c) Infrastruktur

Untuk menunjang kelancaran arus barang dan manusia antar pusat-pusat perekonomian dengan daerah sekitarnya serta daerah hinterland, tentunya perlu ditunjang dengan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Prasarana transportasi yang terdapat di Kota sawahlunto adalah transportasi angkutan jalan raya dan kereta api yang sekarang tidak berfungsi lagi karena habisnya cadangan tambang batubara. Angkutan jalan raya sampai saat ini memiliki panjang jaringan jalan 269,35 km, yang terdiri dari jalan negara 8,15 km, jalan propinsi 27,09 km dan jalan kota 234,11 km. Bila total panjang jalan ini dibagi dengan jumlah penduduk per-kilometer persegi, maka diperoleh tingkat ketersediaan atau daya dukung jaringan transportasi sebesar 1,3. Ini sudah sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Solok yang hanya 0,20. Dalam era globalisasi saat ini untuk menunjang kelancaran arus informasi tentunya harus didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana informasi berupa jaringan telepon. Membandingkan jumlah

satuan sambungan yang tersedia sebanyak 1.997 ss, jumlah pelanggan terdapat sebanyak 1.812 ss, maka indeks daya dukung atau ketersediaan telepon sebesar 1,10. Kapasitas sambungan yang tersedia belum terpakai habis, masih tersisa sebanyak 185 sambungan lagi (ibid). Selain itu dari ketersediaan sarana listrik dengan ketersediaan tenaga listrik terpasang sebanyak 200.000 KW, dibandingkan dengan konsumsi listrik sebesar 8.629 KWH setahun, ini berarti indeks daya dukungnya sebesar 23,28. Dari angka ini ketersediaan tenaga listrik sudah sangat mendukung bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto.

3.3 Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto

3.3.1 Rencana Pengembangan Wilayah

a. Pusat Pengembangan Kota

Pusat pengembangan kota di masa yang akan datang ditempatkan di Santur. Kegiatan-kegiatan utama yang ada dan perlu dikembangkan adalah : (a) Perdagangan grosiran, (b) Perdagangan lokal, (c) Perkantoran pemerintah, (d) Terminal lokal, (e) Pendidikan dengan skala regional, (f) Perumahan/pemukiman. Cakupan pelayanannya meliputi Kolok Tuo, Kolok Tengah, Kolok Mudik, Santur, Talago Gunung.

b. Sub Pusat Utama Kota I (SUB PUK I)

Berada di wilayah Desa Muaro Kalaban dan sekitarnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan adalah : (a) Perdagangan, (b) Industri dan pergudangan, (c) Terminal regional. Wilayah pelayanan meliputi Muaro Kalaban, Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo dan Taratak Bancah.

c. Sub Pusat Utama Kota II (SUB PUK II)

Sub PUK II merupakan pusat kota lama yaitu Sawahlunto. Kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan adalah pertokoan dan perdagangan lokal/regional. Wilayah pelayanannya meliputi Rantih, Sungai durian, Sapan, Kampung Surian, Lubang Panjang, Kebun Jati, Lubang Tembok, Gunung Timbago, Air Dingin, Sukosari, Sidomulyo, Tanah Lapang, Pasar Remaja, Pondok Batu, Kampung Teleng, Mudik Air, Aur Tajung, Kubang Sirakuk Atas, Pondok Kapur, Kubang Sirakuk Bawah, Kubang Utara, Kubang Barat dan Pasar Kubang.

d. Sub Pusat Utama Kota III (SUB PUK III)

Berada di Desa salak dan sekitarnya. Kegiatan utama yang akan dikembangkan di daerah ini adalah industri dan pemukiman. Cakupan wilayah pelayanannya meliputi Datar Mansiang, Tigo tanjung, Sijantang Koto, Salak dan Sikalang.

e. Sub Pusat Utama Kota IV (SUB PUK IV)

Berada di Desa Talawi Mudik dan sekitarnya. Kegiatan yang akan dikembangkan : (a) Perdagangan Lokal, (b) Pendidikan regional, (c) Perindustrian dan (d) Pariwisata. Wilayah pelayanannya meliputi Talawi Mudik, Talawi Hilir, Batu Kualii, Bukit Gadang, Kumbayau, Tumpuk Tengah dan Kumanih Ateh.

f. Sub Pusat Utama Kota V (SUB PUK V)

Terletak di desa Lumindai dan sekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan adalah : (a) Industri pertanian dan Kerajinan Tangan, (b) Perdagangan lokal dan (c) Permukiman. Wilayah pelayanan meliputi Desa Lumindai, Balai Batu Sandaran, Lunto Barat dan Lunto Timur.

Rencana Pengembangan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Peta Rencana Pusat Pengembangan Kota Sawahlunto.



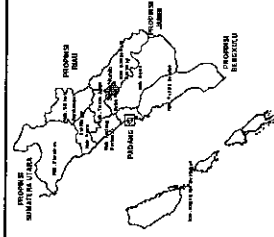
**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG**

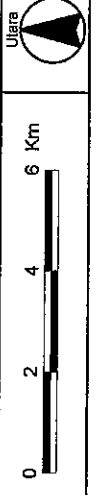
**PETA RENCANA PENGEMBANGAN
KOTA SAWAHLUNTO**

KETERANGAN :

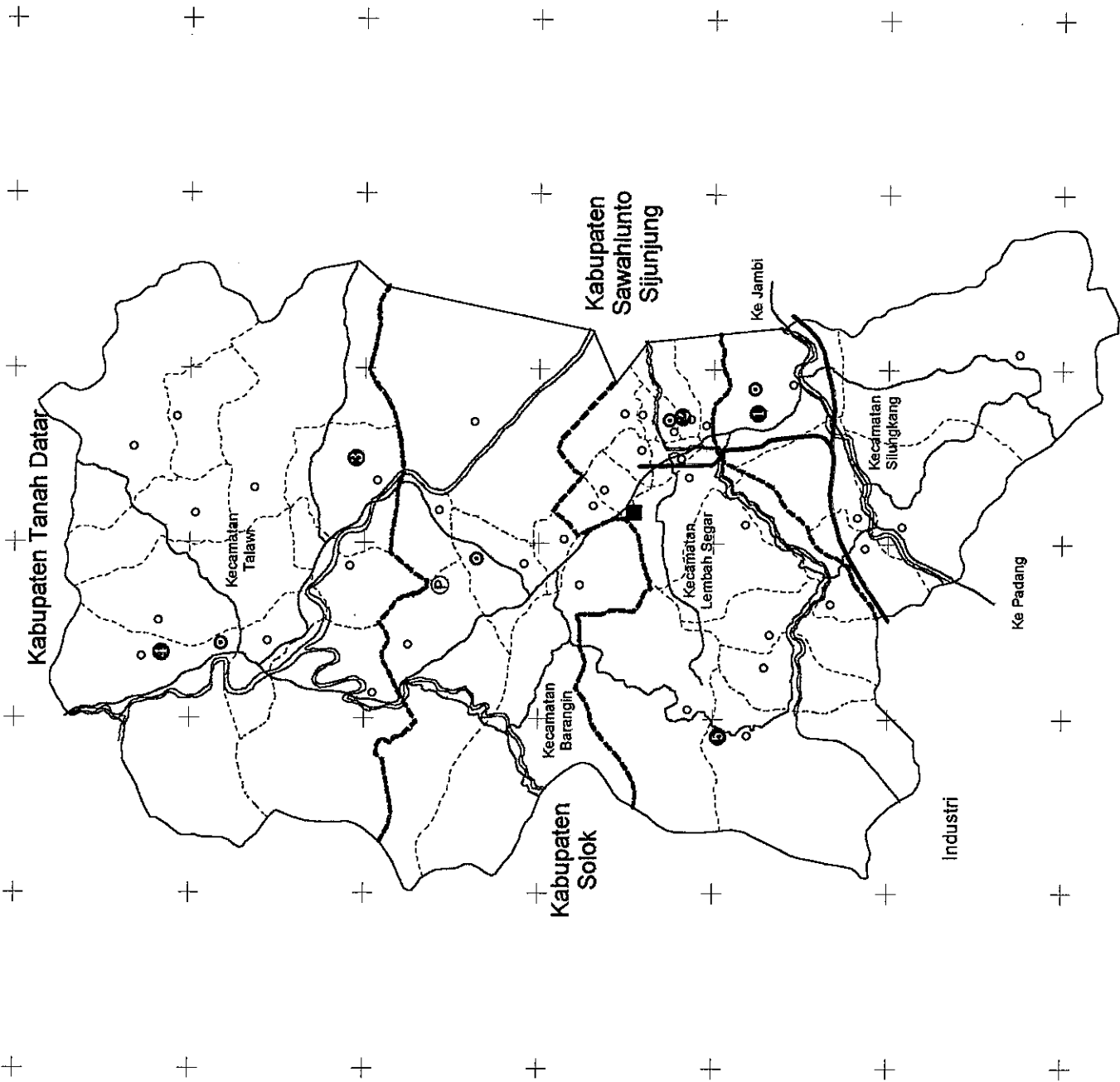
	Batas Kabupaten		Jalan
	Batas Kecamatan		Rel Kereta Api
	Batas Desa		Sungai
	Sub PUK I		Sub PUK IV
	Sub PUK II		Sub PUK V
	Sub PUK III		PPK



Nomor Gambar : 3.9
Halaman : 88



Sumber : RTRW Kota Sawahlunto, 1995



3.3.2 Rencana dan Eksisting Tata Guna Lahan

Kebijaksanaan mengenai Perencanaan Tata Ruang Kota Sawahlunto sesuai dengan RTRW tersebut secara garis besar membagi wilayah pengembangan kota berdasarkan pengelompokan kawasan (*zoning*) yang terdiri dari satu buah Pusat Utama Kota (*Santur*) dan lima buah Sub Pusat Utama Pengembangan Kota (*Muaro Kalaban, Pasar Remaja (Pusat Kota yang lama), Salak, Talawi Mudik dan Lumindai*). Akan tetapi apakah pembagian wilayah (*zoning*) yang ada sekarang masih tetap relevan untuk dipakai sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan kota ke depan tentu tergantung pada kebutuhan kota terhadap ruang efektif yang dapat dimanfaatkan.

Di satu sisi banyak terjadi perubahan peruntukan dan pemanfaatan ruang, baik dengan atau tanpa seizin pihak Pemda, sementara di sisi lain dengan akan diimplementasikannya *UU No.22 Tahun 1999* tentang desentralisasi dan Otonomi Daerah dan *UU No. 25 Tahun 1999* tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001, pihak Pemda Kota Sawahlunto secara otomatis tentu memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan di wilayah administratifnya dan mengelola seluruh aset-aset daerah yang termasuk di dalam wilayah administratifnya itu, seperti misalnya Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT.BA-UPO.

Kota Sawahlunto dengan luas 27.344,7 Ha terdiri dari empat kecamatan dengan 37 buah desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 55.522 jiwa (Data BPS, 1998). Jika ditinjau dari jumlah penduduk, maka Kota Sawahlunto termasuk dalam kategori kota kecil (kurang dari 100.000 penduduk). Akan tetapi dari segi luas wilayah (setelah pemekaran wilayah administratif tahun 1990), merupakan kota dengan luas wilayah

nomor dua setelah Kota Padang, akan tetapi luas lahan efektif yang baru dapat dimanfaatkan untuk permukiman kota hanya 2.014 Ha (*NKLHD Kota Sawahlunto, 1999*).

Dari seluruh total luas wilayah kota, jumlah luas wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi PT. BA-UPO seluruhnya adalah 15.499,3 Ha (56,3 % dari total luas wilayah Kota Sawahlunto) dengan rincian sebagai berikut : *DU 17* seluas 2.331,4 Ha dan *DU 143* seluas 12.947,9 Ha yang meliputi daerah Tanah Hitam, Kandi, Simaung, Sapan Dalam, Sawah Rasau V, Sawah Luhung, Sugar dan Sigalut (*Laporan Pengawasan Pertambangan PT.BA-UPO Kotamadya Sawahlunto, Deptamben Prop.Sumbar, 1996*).

Dari gambaran yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Penataan Ruang Kota Sawahlunto ke depan, sesuai dengan semangat otonomi daerah diperkirakan akan banyak menemui kendala, tantangan dan permasalahan baru, terutama bila dikaitkan dengan belum terakomodasinya secara penuh peran serta para petaruh (*stakeholder*), masyarakat, ornop (*organisasi non-pemerintah*), pengusaha serta unsur masyarakat lainnya. Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya bertendensi pada sasaran di masing-masing sektor dan kurang mengacu pada rencana tata ruang yang sudah disusun dan disepakati bersama sehingga cenderung menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pola pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan dan peruntukan ruang. Untuk itu, perlu disadari pula bahwa masalah penataan ruang kota sesungguhnya bukan merupakan tugas instansi tertentu saja, akan tetapi merupakan masalah seluruh komponen kota yang harus dipahami dan diatasi secara bersama-sama.



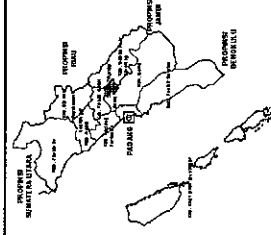
**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCA TAMBANG**

**PETA TATA GUNA LAHAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2001**

KETERANGAN :

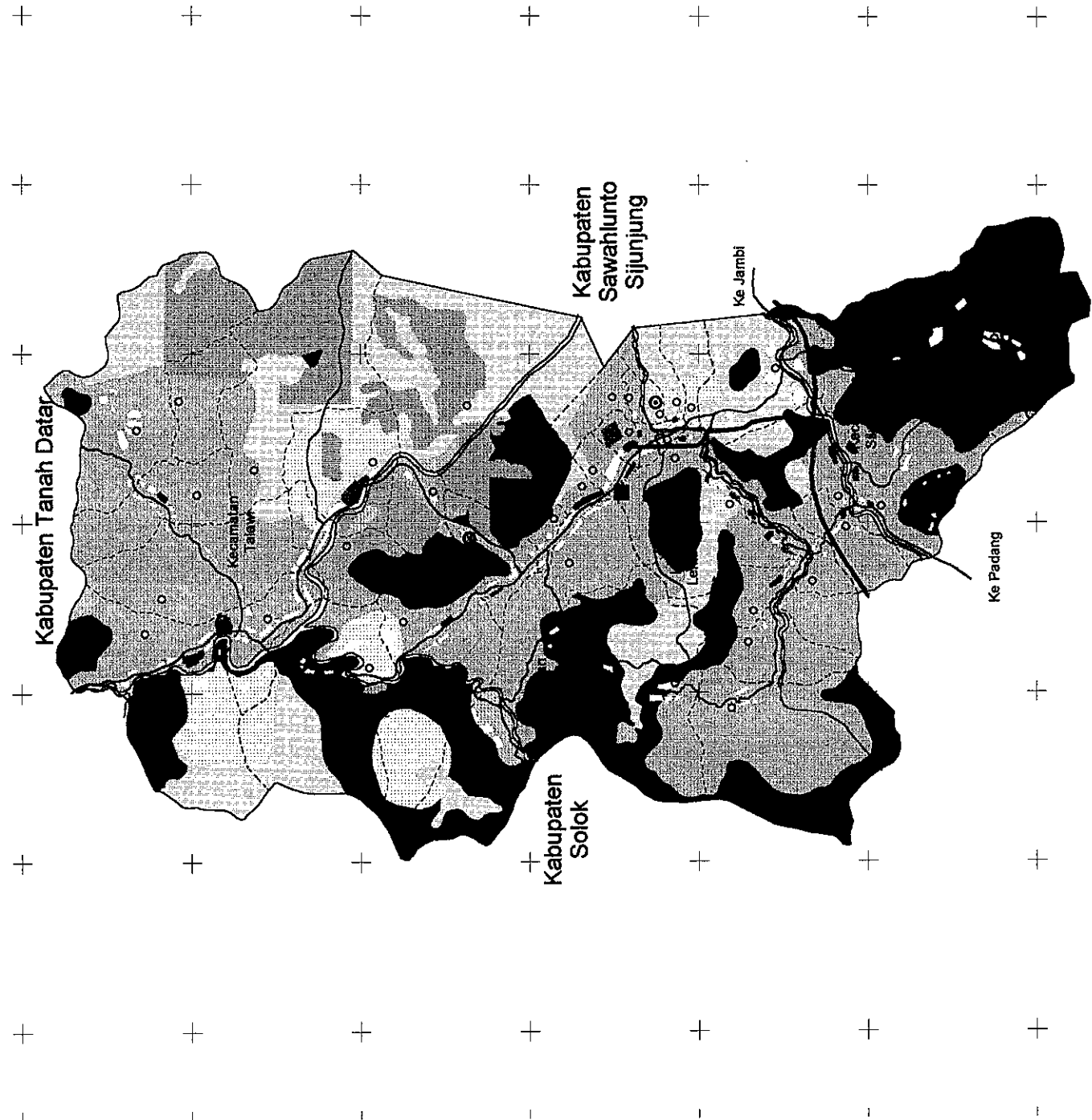
	Batas Kabupaten		Jalan
	Batas Kecamatan		Rel Kereta Api
	Batas Desa		Sungai
TGL Tahun 2001			
	Hutan		Perdagangan
	Industri		Perkebunan
	Kampung		Sawah
	Kebun Campuran, Tegalan, Ladang		Tanah Kosong
	Perairan Darat		Pertambangan



Nomor Gambar : 3.10
Halaman : 91



Sumber : BPN Kota Sawahlunto



3.3.3 Alokasi Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang Kota Sawahlunto lebih banyak untuk kawasan lindung, karena kondisi alamnya yang berbukit-bukit, kemiringan tinggi dan tanahnya labil.

Alokasi pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut :

TABEL III.7
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO

Fungsi Kawasan	Arahan Pemanfaatan Ruang	Kawasan/Sub PUK					
		Pusat	PUK I	PUK II	PUK III	PUK IV	PUK V
A. Kawasan Lindung :							
1. Kawasan Hutan Lindung	Tidak untuk budidaya		V	V		V	V
2. Kawasan Resapan Air	Budidaya wisata, dilindungi	V	V		V		V
3. Kawasan Sempadan Sungai	Pariwisata, perikanan	V	V	V	V		
4. Kawasan Cagar Budaya	Wisata sejarah/budaya	V		V			
5. Kawasan Rawan longsor	Tidak untuk budidaya	V	V	V			V
B. Kawasan Budidaya :							
1. Hutan Produksi	Pariwisata, tanaman tahunan	V	V	V		V	V
2. Perkebunan	Perkebunan, agrowisata					V	
3. Pertanian Lahan Basah	Padi, agrowisata, pertanian	V				V	V
4. Pertanian Lahan Kering	Tanaman semusim, agrowisata	V	V	V	V	V	V
5. Peternakan	Ternak besar dan kecil		V	V		V	V
6. Perikanan	Perikanan darat, tambak	V	V			V	V
7. Perindustrian	Kegiatan industri		V		V	V	
8. Permukiman	Kegiatan permukiman	V	V	V	V	V	V
10. Perdagangan	Pusat & kegiatan perdagangan		V	V		V	
11. Pertambangan	Kegiatan pertambangan			V	V	V	
12. Pariwisata	Kegiatan pariwisata	V	V	V	V	V	V

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto 1995-2000, (diolah)

Aktivitas-aktivitas usaha dan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Sawahlunto tersebut umumnya dilakukan dalam skala kecil dan ruang yang sempit, kecuali sektor pertambangan yang memiliki lahan kuasa pertambangan sampai 15.499,3 ha (56,3 % luas wilayah).

B A B IV

ANALISIS DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG

4.1 Analisis Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang

4.1.1 Kota Sawahlunto Sebagai Kota Tambang

Kota Sawahlunto dari sisi geografis tidaklah strategis sebagaimana kota-kota tambang Rhondda Valley, Nova Scotia dan Petaling Jaya. Kota yang berada di tengah Propinsi Sumatera Barat ini memang dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera, namun hanya sebagian kecil saja, yaitu di Kecamatan Talawi, sedangkan jarak dari Kota Padang sebagai ibukota propinsi cukup jauh \pm 105 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 - 3 jam.

Seperti Kota Rhondda Valley yang dilalui jalan utama dari empat daerah sekitarnya, Kota Nova Scotia yang terletak di tepi pantai, terdapat pelabuhan besar dan Kota Petaling Jaya yang dekat dengan Kuala Lumpur, ibukota Malaysia. Kota Sawahlunto harus diakui agak terpencil dan belum terkenal. Sampai saat ini, jika dilihat dari posisi dan aktivitas ekonomi warganya, maka kota ini merupakan hinterland Kota Solok yang relatif lebih maju sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat selain Kota Bukit Tinggi. Jadi, dari kerangka yang telah diungkapkan tersebut, letak geografis kota-kota itu sangat menentukan keberlanjutannya.

Penanganan dan perencanaan yang sungguh-sungguh dengan investasi besar-besaran, telah membuat kota-kota tersebut menjadi kota yang maju dan mampu memberikan devisa bagi negara. Arah pengembangan kota-kota bekas pertambangan lebih diarahkan untuk tujuan wisata dengan memanfaatkan lokasi dan sejarah pertambangan yang terkenal dengan kekejamannya. Kota Sawahlunto pun sebagai kota

tambang dengan sejarah dan bekas-bekas aktivitas tambang yang masih terjaga tentunya dapat memanfaatkannya sebagai suatu potensi yang bisa dikembangkan.

Wisata dengan wujud tambang memang merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun harus dimengerti bahwa memang wisata semacam ini bukanlah wisata yang bersifat rekreatif dan masal, tetapi lebih kepada wisata yang bersifat edukatif dan pengembangan pribadi. Untuk masyarakat Indonesia mungkin tidak terlalu menarik, sehingga peminatnya akan terbatas.

Wisata tambang (*mines tourism*) termasuk wisata alternatif. Di Eropa dikenal sebagai pariwisata warisan keindustrian (*industrial heritage tourism*), karena tambang, khususnya tambang batubara merupakan salah satu penggerak revolusi industri, yang telah mewariskan industrialisasi dan membuahkan kemakmuran sampai saat ini. Oleh karena itu dapat dimengerti kalau bekas tambang menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menelusuri sejarah dan menambah wawasan.

Dunia pariwisata mengenal beberapa tipe wisatawan, seperti wisatawan antropologis, wisatawan bisnis, wisatawan budaya, wisatawan orang-orang yang sudah tua, wisatawan nostalgia, wisatawan ziarah, wisatawan untuk mencari hiburan, wisatawan untuk berekreasi, wisatawan rohani, wisatawan kaum muda, juga ada wisatawan tanpa tujuan dan banyak tipe wisatawan lainnya (Suwanto, 1997). Kota Sawahlunto sebetulnya dapat memanfaatkan potensi bekas tambangnya sesuai dengan jenis wisatawan yang ada, yaitu berupa wisatawan budaya dan wisatawan nostalgia, sehingga bukanlah menjadi wisata yang bersifat eksklusif.

Demikian banyak prospek yang bisa dikembangkan dengan aktivitas wisata tambang, maka Kota Sawahlunto dengan potensinya harus bisa memanfaatkannya. Beberapa potensi yang bisa dikembangkan antara lain danau bekas tambang di Desa

Rantih, instalasi pemrosesan dan pengangkutan batubara yang melalui beberapa desa mulai dari Desa Salak sampai ke Kelurahan Pasar, bangunan-bangunan bersejarah dan peralatan-peralatan tambang kuno yang harus dilestarikan pada sebuah museum dan didukung oleh atraksi-atraksi wisata baik atraksi budaya dan permainan yang modern serta potensi pertanian, industri dan jasa-jasa lainnya. Kota Sawahlunto cukup kaya dengan industri kerajinan tradisional khususnya kerajinan tenun di Kecamatan Silungkang, yang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang wisata tambang tersebut.

Membandingkan model pengembangan pada kota-kota acuan (Rhondda Valley, Nova Scotia dan Petaling Jaya), maka program yang dilakukan adalah berupa pengembangan pada kawasan tertentu yang punya prospek untuk berkembang. Memperhatikan hal itu, maka kawasan yang punya prospek untuk dikembangkan adalah kota lama Sawahlunto yang kaya dengan situs tambang dan bangunan bersejarah. Sementara itu Desa Salak, Sijantang dan Rantih sebagai kawasan resort dengan memanfaatkan danau bekas pertambangan. Untuk menciptakan keterkaitan dengan kota lama, maka perlu memanfaatkan *conveyor* pengangkutan batubara yang sudah ada dengan memanfaatkan lintasan *conveyor* tersebut sebagai lintasan kereta api mini yang bisa mengangkut penumpang dari kota lama ke kawasan resort danau buatan. Dukungan keindahan alam sepanjang lintasan kereta api mini tersebut akan memberikan daya tarik tersendiri dan menjadi atraksi wisata yang menarik.

4.1.2 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kota Sawahlunto

4.1.2.1 Analisis Ekonomi Basis

Tingkat spesialisasi sektor-sektor perekonomian Kota Sawahlunto dianalisis dengan menggunakan Analisis Location Quotient, yaitu dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-sektor/sub-sektor ekonomi Kota

Sawahlunto dengan PDRB per-sektor/sub-sektor Propinsi Sumatera Barat tahun 2001. Agar didapatkan hasil yang lebih signifikan dan representatif dipakai data PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993.

TABEL IV.1
PERHITUNGAN LQ PER-SUB SEKTOR EKONOMI
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2001

No	Sektor Ekonomi	PDRB Kota Sawahlunto 2001 ADHK 1993 (jutaan rupiah)	PDRB Sumbar 2001 ADHK 1993 (jutaan rupiah)	LQ 2001
1	2	3	4	5
1	Pertanian :	8,606.86	1,645,577.41	0.304
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	4,807.71	859,223.57	0.325
	b. Perkebunan	326.63	261,285.63	0.073
	c. Peternakan	3,357.99	170,607.90	0.143
	d. Kehutanan	-	169,685.53	0.000
	e. Perikanan	114.53	184,774.78	0.036
2	Pertambangan :	10,568.67	393,918.62	0.610
	a. Migas dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Non Migas	-	39,638.19	0.000
	c. Penggalian	10,568.67	354,280.43	0.733
3	Industri Pengolahan :	18,597.95	1,291,039.95	1.900
	a. Industri Migas	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	18,597.95	1,291,039.95	1.900
4	Listrik, Gas dan Air Bersih :	1,044.72	190,982.63	0.318
	a. Listrik	964.20	180,809.98	0.310
	b. Gas	-	-	-
	c. Air Bersih	80.52	10,172.65	0.460
5	Bangunan	10,878.80	304,227.83	0.146
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran :	12,252.72	1,304,924.55	0.736
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	11,371.96	1,248,994.58	0.728
	b. Hotel	39.66	6,815.40	0.338
	c. Restoran	841.10	49,114.57	0.995
7	Angkutan dan Komunikasi	14,137.29	995,328.03	0.825
	A. Angkutan	-	-	-
	a. Kereta Api	3,932.82	45,978.14	4.969
	b. Jalan Raya (Darat)	9,220.07	455,339.48	1.176
	c. Angk. Laut, Sungai & Penyb.	-	335,235.22	0.000
	d. Angkutan Udara	-	16,347.26	0.000
	e. Jasa Penunjang Angkutan	523.16	69,517.41	0.437
	B. Komunikasi	461.24	72,910.52	0.368
8	Keu, Rent dan Jasa Perusahaan :	8,075.02	381,238.64	0.230
	a. Bank	2,768.34	97,162.77	0.655
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	2,167.26	90,214.87	0.396

Bersambung ...

... Lanjutan

1	2	3	4	5
	c. Sewa Bangunan	3,044.04	185,905.40	0.142
	d. Jasa Perusahaan	95.38	7,955.60	0.127
9	Jasa-Jasa :	45,896.75	1,297,102.98	2.056
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	28,195.80	947,244.73	1.729
	b. Swasta :	17,700.95	349,858.25	2.939
	1. Sosial Kemasyarakatan	4,258.29	98,590.73	2.509
	2. Hiburan dan Rekreasi	395.76	14,234.40	1.615
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	13,046.90	237,033.12	3.198
10	Jumlah PDRB	134,341.18	7,804,340.64	

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Dari hasil perhitungan LQ 2001 ini, sektor yang merupakan basis adalah sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Sedangkan sub-sektor masing-masing dari sektor-sektor tersebut juga menjadi sub-sektor basis. Selain itu sub-sektor angkutan kereta api dan angkutan jalan raya juga menjadi sub-sektor basis. Sub-sektor angkutan kereta api menunjukkan tingkat spesialisasi tertinggi dengan nilai LQ sebesar 4,969, namun seiring dengan berhentinya aktivitas pertambangan batubara, sampai saat ini kegiatan angkutan kereta api juga berhenti.

4.1.2.2 Analisis Kinerja Perekonomian Kota Sawahlunto

Untuk mengukur kinerja perekonomian Kota Sawahlunto dilakukan *Analisis Shift-Share*. Di samping akan diketahui pergeseran struktur perekonomiannya, juga diketahui posisi relatif sektor dan sub-sektor ekonomi serta identifikasi sektor-sektor unggulan. Dari data PDRB sebelumnya, dihitung perubahan PDRB Kota Sawahlunto, yaitu antara PDRB tahun 1997 dengan tahun 2001. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

TABEL IV.2
PERUBAHAN PDRB KOTA SAWAHLUNTO ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 1993 TANPA SUB-SEKTOR BATUBARA 1997 DAN 2001

No	Sektor Ekonomi	PDRB 1997	PDRB 2001	Perubahan PDRB
1	2	3	4	5
1	Pertanian :	8,757.12	8,606.86	(150.26)
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	5,781.34	4,807.71	(973.63)
	b. Perkebunan	267.25	326.63	59.38
	c. Peternakan	2,558.83	3,357.99	799.16
	e. Perikanan	149.70	114.53	(35.17)
2	Pertambangan :	10,299.92	10,568.67	268.75
	a. Migas dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Non Migas	-	-	-
	c. Penggalian	10,299.92	10,568.67	268.75
3	Industri Pengolahan :	18,676.72	18,597.95	(78.77)
	a. Industri Migas	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	18,676.72	18,597.95	(78.77)
4	Listrik, Gas dan Air Bersih :	1,145.21	1,044.72	(100.49)
	a. Listrik	1,072.71	964.20	(108.51)
	c. Air Bersih	72.50	80.52	8.02
5	Bangunan	12,126.26	10,878.80	(1,247.46)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran :	12,457.48	12,252.72	(204.76)
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	11,464.40	11,371.96	(92.44)
	b. Hotel	26.62	39.66	13.04
	c. Restoran	966.46	841.10	(125.36)
7	Angkutan dan Komunikasi	15,961.84	14,137.29	(1,824.55)
	A. Angkutan	15,627.97	13,676.05	(1,951.92)
	a. Kereta Api	3,865.68	3,932.82	67.14
	b. Jalan Raya (Darat)	11,140.11	9,220.07	(1,920.04)
	c. Angk. Laut, Sungai & Penyb.	-	-	-
	d. Angkutan Udara	-	-	-
	e. Jasa Penunjang Angkutan	622.18	523.16	(99.02)
	B. Komunikasi	333.87	461.24	127.37
8	Keu, Rent dan Jasa Perusahaan :	8,354.02	8,075.02	(279.00)
	a. Bank	3,563.35	2,768.34	(795.01)
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	1,839.42	2,167.26	327.84
	c. Sewa Bangunan	2,908.08	3,044.04	135.96
	d. Jasa Perusahaan	43.17	95.38	52.21
9	Jasa-Jasa	37,574.67	45,896.75	8,322.08
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	21,340.85	28,195.80	6,854.95
	b. Swasta :	16,233.82	17,700.95	1,467.13
	1. Sosial Kemasyarakatan	5,079.71	4,258.29	(821.42)
	2. Hiburan dan Rekreasi	207.44	395.76	188.32
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	10,946.67	13,046.90	2,100.23
10	Jumlah PDRB	125,353.24	130,058.78	4,705.54

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Dari tabel perubahan ini terlihat bahwa secara umum hanya sektor pertambangan dan sektor jasa-jasa saja menunjukkan peningkatan.

Langkah selanjutnya adalah menghitung komponen masing-masing pertumbuhan, seperti tabel berikut :

TABEL IV.3
HASIL PERHITUNGAN KOMPONEN KPW, KPP, KPK DAN PN

No	Sektor Ekonomi	KPW	KPP	KPK	PN
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian :	-0.02	0.04	-0.08	-0.04
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	-0.02	0.03	-0.18	-0.15
	b. Perkebunan	-0.02	0.17	0.07	0.24
	c. Peternakan	-0.02	0.00	0.33	0.33
	d. Kehutanan	-0.02	-0.03	-	-
	e. Perikanan	-0.02	0.04	-0.26	-0.22
2	Pertambangan :	-0.02	-0.18	0.18	-0.35
	a. Migas dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Non Migas	-0.02	0.37	-	-
	c. Penggalian	-0.02	-0.14	0.18	-0.04
3	Industri Pengolahan :	-0.02	0.01	0.02	0.01
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	-0.02	0.01	0.02	0.01
4	Listrik, Gas dan Air Bersih :	-0.02	0.45	-0.53	-0.07
	a. Listrik	-0.02	0.46	-0.55	-0.09
	b. Gas	-	-	-	-
	c. Air Bersih	-0.02	0.33	-0.21	0.13
5	Bangunan	-0.02	-0.36	0.27	-0.09
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran :	-0.02	0.02	-0.19	-0.17
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	-0.02	0.03	-0.02	0.01
	b. Hotel	-0.02	-0.02	0.52	0.51
	c. Restoran	-0.02	-0.03	-0.08	-0.11
7	Angkutan dan Komunikasi	-0.02	0.03	-0.13	-0.10
	A. Angkutan	-0.02	0.03	-0.14	-0.11
	a. Kereta Api	-0.02	0.73	-0.69	0.03
	b. Jalan Raya (Darat)	-0.02	-0.17	0.01	-0.16
	c. Angk. Laut, Sungai & Penyb.	-0.02	0.45	-	-
	d. Angkutan Udara	-0.02	-0.33	-	-
	e. Jasa Penunjang Angkutan	-0.02	0.03	-0.17	-0.14
	B. Komunikasi	-0.02	0.11	0.28	0.40
8	Keu, Rent dan Jasa Perusahaan :	-0.02	-0.10	0.05	-0.07
	a. Bank	-0.02	-0.30	0.10	-0.21
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	-0.02	0.07	0.12	0.19

Bersambung ...

... Lanjutan

1	2	3	4	5	6
	c. Sewa Bangunan	-0.02	-0.02	0.08	0.06
	d. Jasa Perusahaan	-0.02	-0.23	1.45	1.23
9	Jasa-Jasa	-0.02	0.02	0.22	0.24
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	-0.02	0.09	0.25	0.34
	b. Swasta :	-0.02	0.13	-0.02	0.11
	1. Sosial Kemasyarakatan	-0.02	0.11	-0.25	-0.15
	2. Hiburan dan Rekreasi	-0.02	-0.20	1.13	0.92
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	-0.02	0.17	0.04	0.21

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Analisis Hasil Perhitungan :

- **Dari nilai-nilai KPW**, yang menggambarkan bahwa pertumbuhan Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh kebijakan Propinsi Sumatera Barat secara umum. Kenyataan dengan nilai yang negatif (-0,02), maka pengaruh kebijakan perekonomian Propinsi Sumatera Barat secara umum tidak *signifikan* terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto. Ini disebabkan oleh terlalu besarnya ketergantungan perekonomian Kota Sawahlunto pada sub sektor pertambangan batu bara, sehingga kebijakan perekonomian propinsi yang lebih menekankan pada sektor pertanian tidak efektif terhadap Kota Sawahlunto. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat sangat tergantung dengan sektor pertanian (sektor pertanian menjadi *leading sector* perekonomian mereka), jadi bertolak belakang dengan Kota Sawahlunto.
- **Dari nilai-nilai KPP**, yang menggambarkan perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kota Sawahlunto dengan pertumbuhan agregat. Sektor-sektor yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan sektor tersebut cukup pesat dan punya pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sektor-sektor yang bernilai positif adalah pertanian (0,04), sektor industri pengolahan (0,01), sektor listrik, gas dan air minum (0,45), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,02),

sektor angkutan dan komunikasi (0,03) dan sektor jasa-jasa (0,02). Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut pesat pertumbuhannya dan pengaruhnya terhadap pendapatan kota juga positif, sebaliknya jika negatif. Dengan indikasi pesatnya pertumbuhan sektor-sektor tersebut, tentunya akan memberikan sumbangan yang positif juga terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat. Yang menarik adalah sektor pertambangan yang sebetulnya punya andil terbesar dalam perekonomian Kota Sawahlunto, namun nilai KPP-nya justru negatif (-0,18).

- **Dari nilai-nilai KPK**, sektor-sektor yang mempunyai nilai positif adalah sektor industri pengolahan (0,02), sektor bangunan (0,27), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,05) serta jasa-jasa (0,22). Ini menandakan bahwa sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan daya saing atau punya keunggulan komparatif dibandingkan daerah-daerah lain di Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan sektor-sektor lain memiliki nilai negatif, yang berarti sebaliknya.
- **Dari nilai-nilai PN**, akan diketahui sektor-sektor yang maju dan kurang maju. Sektor yang bernilai positif hanyalah sektor industri pengolahan (0,01) dan sektor jasa-jasa (0,24), jadi hanya sektor inilah yang maju dan yang akan berperan terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Ini relevan juga dengan perannya terhadap perekonomian Kota Sawahlunto, dimana dalam PDRB hanya sektor ini yang meningkat.

Sebagai analisis lanjutan, untuk menemukenali sektor-sektor yang termasuk unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur, maka dibuat penilaian sebagai berikut :

TABEL IV.4
KETERANGAN NILAI-NILAI KPP DAN KPK

Representasi	Nilai KPP	Nilai KPK
Unggul	+	+
Agak Unggul	-	+
Mundur	-	-
Agak Mundur	+	-

Sumber : Ma'rif, 2000, diolah

Dari basis penilaian di atas dibuat analisis seperti tabel berikut :

TABEL IV.5
REPRESENTASI NILAI KPP DAN KPK

No	Sektor Ekonomi	KPP	KPK	Representasi
1	2	3	4	5
1	Pertanian :	0.04	-0.08	<i>Agak mundur</i>
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	0.03	-0.18	<i>Agak mundur</i>
	b. Perkebunan	0.17	0.07	<i>Unggul</i>
	c. Peternakan	0.00	0.33	<i>Unggul</i>
	d. Kehutanan	-0.03	-	-
	e. Perikanan	0.04	-0.26	<i>Agak mundur</i>
2	Pertambangan :	-0.18	0.18	<i>Agak unggul</i>
	a. Migas dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Non Migas	0.37	-	-
	c. Penggalian	-0.14	0.18	<i>Agak unggul</i>
3	Industri Pengolahan :	0.01	0.02	<i>Unggul</i>
	a. Industri Migas	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	0.01	0.02	<i>Unggul</i>
4	Listrik, Gas dan Air Bersih :	0.45	-0.53	<i>Agak mundur</i>
	a. Listrik	0.46	-0.55	<i>Agak mundur</i>
	b. Gas	-	-	-
	c. Air Bersih	0.33	-0.21	<i>Agak mundur</i>
5	Bangunan	-0.36	0.27	<i>Agak unggul</i>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran :	0.02	-0.19	<i>Agak mundur</i>
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	0.03	-0.02	<i>Agak mundur</i>
	b. Hotel	-0.02	0.52	<i>Agak unggul</i>

Bersambung ...

... Lanjutan

1	2	3	4	5
	c. Restoran	-0.03	-0.08	<i>Mundur</i>
7	Angkutan dan Komunikasi	0.03	-0.13	<i>Agak mundur</i>
	A. Angkutan	0.03	-0.14	<i>Agak mundur</i>
	a. Kereta Api	0.73	-0.69	<i>Agak mundur</i>
	b. Jalan Raya (Darat)	-0.17	0.01	<i>Agak unggul</i>
	c. Angk. Laut, Sungai & Penyb.	0.45	-	-
	d. Angkutan Udara	-0.33	-	-
	e. Jasa Penunjang Angkutan	0.03	-0.17	<i>Agak mundur</i>
	B. Komunikasi	0.11	0.28	Unggul
8	Keu, Rent dan Jasa Perusahaan :	-0.10	0.05	<i>Agak unggul</i>
	a. Bank	-0.30	0.10	<i>Agak unggul</i>
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	0.07	0.12	Unggul
	c. Sewa Bangunan	-0.02	0.08	<i>Agak unggul</i>
	d. Jasa Perusahaan	-0.23	1.45	<i>Agak unggul</i>
9	Jasa-Jasa	0.02	0.22	Unggul
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	0.09	0.25	Unggul
	b. Swasta :	0.13	-0.02	<i>Agak mundur</i>
	1. Sosial Kemasyarakatan	0.11	-0.25	<i>Agak mundur</i>
	2. Hiburan dan Rekreasi	-0.20	1.13	<i>Agak unggul</i>
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	0.17	0.04	Unggul

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Jadi sektor yang menjadi unggulan dari perekonomian Kota Sawahlunto adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Sektor bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor yang agak unggul dan sektor pertambangan merupakan sektor yang mundur. Sektor yang lain adalah sektor yang agak mundur.

Dapat disimpulkan bahwa Kota Sawahlunto harus berspesialisasi pada sektor industri pengolahan dan jasa-jasa khususnya sub-sektor jasa perorangan dan rumah tangga, sekaligus merupakan sektor/sub-sektor yang diunggulkan. Konsekuensi sebagai sektor/sub-sektor unggulan adalah dalam setiap kebijakan pembangunan sektor ini harus lebih diprioritaskan, terutama kebijakan-kebijakan yang mendorong perkembangannya, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kemajuan sektor ini. Menciptakan *linkage*

dengan sektor/sub-sektor lain yang mendukung, baik *inward linkage* maupun *outward linkage* dengan daerah lain, terutama dengan Kota Padang, Bukit Tinggi dan Solok.

Sebagai langkah terakhir dalam menentukan tingkat kompetitif Kota Sawahlunto adalah menghitung nilai absolut masing-masing komponen KPW, KPP, KPK dan PEK. PEK ini menggambarkan perubahan atau pertumbuhan kinerja perekonomian Kota Sawahlunto. Hasil perhitungannya seperti tabel berikut :

TABEL IV.6
NILAI ABSOLUT KOMPONEN KPW, KPP, KPK DAN PEK

No	Sektor Ekonomi	KPW	KPP	KPK	PEK
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian :	-139.13	336.59	-347.72	-150.26
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura	-91.85	154.64	-1036.42	-973.63
	b. Perkebunan	-4.25	44.55	19.08	59.38
	c. Peternakan	-40.65	-4.06	843.87	799.16
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	-2.38	6.42	-39.21	-35.17
2	Pertambangan :	-163.64	-1125.58	1557.97	268.75
	b. Non Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-163.64	-1468.22	1900.61	268.75
3	Industri Pengolahan :	-296.72	100.72	117.23	-78.77
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	-296.72	100.72	117.23	-78.77
4	Listrik, Gas dan Air Bersih :	-18.19	519.30	-601.60	-100.49
	a. Listrik	-17.04	494.28	-585.75	-108.51
	b. Gas	-	-	-	-
	c. Air Bersih	-1.15	24.26	-15.09	8.02
5	Bangunan	-192.65	-4367.38	3312.57	-1247.46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran :	-197.92	348.95	-355.79	-204.76
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	-182.14	352.04	-262.34	-92.44
	b. Hotel	-0.42	-0.41	13.88	13.04
	c. Restoran	-15.35	-29.44	-80.56	-125.36
7	Angkutan dan Komunikasi	-253.59	537.00	-2107.96	-1824.55
	A. Angkutan	-248.29	434.14	-2137.78	-1951.92
	a. Kereta Api	-61.42	2811.00	-2682.44	67.14
	b. Jalan Raya (Darat)	-176.99	-1873.11	130.06	-1920.04
	c. Angk. Laut, Sungai & Penyb.	-	-	-	-
	e. Jasa Penunjang Angkutan	-9.88	19.38	-108.51	-99.02
	B. Komunikasi	-5.30	38.11	94.56	127.37

Bersambung ...

... Lanjutan

1	2	3	4	5	6
8	Keu, Rent dan Jasa Perusahaan :	-132.72	132.72	-279.00	-279.00
	a. Bank	-56.61	-1078.73	340.33	-795.01
	b. Lembaga Keuangan Non Bank	-29.22	128.99	228.07	327.84
	c. Sewa Bangunan	-46.20	-49.00	231.16	135.96
	d. Jasa Perusahaan	-0.69	-9.85	62.74	52.21
9	Jasa-Jasa	-596.96	596.96	8322.08	8322.08
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	-339.05	1922.26	5271.74	6854.95
	b. Swasta :	-257.91	2099.78	-374.74	1467.13
	1. Sosial Masyarakat	-80.70	549.05	-1289.77	-821.42
	2. Hiburan dan Rekreasi	-3.30	-42.43	234.05	188.32
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	-173.91	1842.51	431.64	2100.23
	P D R B	-3,945.19	0.00	-40,673.62	-44,618.81

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Dari nilai-nilai hasil perhitungan PEK di atas, sektor yang bernilai positif hanya sektor pertambangan dan sektor jasa-jasa, yaitu sub-sektor jasa pemerintahan dan pertahanan dan sub-sektor jasa swasta (jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga). Ini menggambarkan bahwa hanya sektor ini yang mengalami pertumbuhan.

Selanjutnya untuk analisis secara keseluruhan terhadap sektor ekonomi strategis, dilakukan analisis gabungan dari analisis-analisis di atas dengan melakukan pembobotan terhadap masing-masing kriteria analisis, seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL IV.7
PENENTUAN SEKTOR EKONOMI STRATEGIS KOTA SAWAHLUNTO
TANPA SUB-SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

Sektor	LO		SHIFT-SHARE				Jumlah	Kete- rangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pertanian :		1			2		3	Mundur
a. Tanaman Pangan & Hortikultura		1			2		3	Mundur
b. Perkebunan		1	3				4	Kurang Strategis

Bersambung ...

... Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Peternakan	2		3				5	Strategis
d. Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Perikanan		1			2		3	Mundur
2. Pertambangan :		1		2			3	Mundur
a. Migas dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Non Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Pengecilan		1		2			3	Mundur
3. Industri Pengolahan :	2		3				5	Strategis
a. Industri Tanpa Migas	2		3				5	Strategis
4. Listrik, Gas dan Air Bersih :		1			2		3	Mundur
a. Listrik		1			2		3	Mundur
b. Air Bersih		1			2		3	Mundur
5. Bangunan		1		2			3	Mundur
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran :		1			2		3	Mundur
a. Perdagangan Besar dan Eceran		1			2		3	Mundur
b. Hotel		1		2			3	Mundur
c. Restoran	2					1	3	Mundur
7. Angkutan dan Komunikasi		1			2		3	Mundur
A. Angkutan		1			2		3	Mundur

Bersambung ...

... Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Kereta Api	2				2		4	Kurang Strategis
b. Jalan Raya (Darat)	2			2			4	Kurang Strategis
c. Angk. Laut, Sungai & Penybr	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Jasa Penunjang Angkutan		1			2		3	Mundur
B. Komunikasi		1	3				4	Kurang Strategis
8. Keu, Rent dan Jasa Perusahaan :		1		2			3	Mundur
a. Bank		1		2			3	Mundur
b. Lembaga Keuangan Non Bank		1	3				4	Kurang Strategis
c. Sewa Bangunan		1		2			3	Mundur
d. Jasa Perusahaan		1		2			3	Mundur
9. Jasa-Jasa	2		3				5	Strategis
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	2		3				5	Strategis
b. Swasta :	2				2		4	Kurang Strategis
1. Sosial Kemasyarakatan	2				2		4	Kurang Strategis
2. Hiburan dan Rekreasi	2			2			4	Kurang Strategis
3. Perorangan dan Rumah Tangga	2		3				5	Strategis

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Keterangan :**Bobot :**

- Basis = 2
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 2
- Mundur = 1

Jumlah :

- 5 = Strategis
- 4 = Kurang Strategis
- 3 = Mundur

Hasil analisis sektor ekonomi strategis dengan analisis LQ dan Shift-Share di atas menunjukkan bahwa sektor yang strategis adalah sektor jasa-jasa dan industri pengolahan. Sektor lain tergolong ke dalam sektor yang mundur. Jika diperhatikan nilai masing-masing sub-sektor yang ada, maka *sub-sektor jasa perorangan dan rumah tangga, jasa pemerintahan dan pertahanan* merupakan sub-sektor strategis untuk sektor jasa-jasa. *Sub-sektor industri anpa migas* menjadi sektor strategis pada sektor industri pengolahan. Yang menarik adalah sub-sektor peternakan menjadi sub-sektor strategis.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut dan kondisi riil potensi Kota Sawahlunto sendiri, maka untuk menetapkan basis pengembangan kotanya, kiranya perlu diciptakan kombinasi antar sektor dan sub-sektor tersebut.

Sektor strategis berupa jasa-jasa dan industri pengolahan perlu dikombinasikan dengan sektor lain yang kurang strategis, ini bertujuan untuk menciptakan linkage antar sektor dan agar tidak mengecilkan peran sektor tersebut dalam analisis serta memperhatikan prospek perkembangannya secara riil di Kota Sawahlunto sendiri. Akhirnya basis pengembangan Kota Sawahlunto terdiri dari :

- A. *Sektor jasa-jasa, khususnya jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga,*
- B. *Sektor Industri pengolahan, khususnya industri tanpa migas*
- C. *Sektor pariwisata yang berbasis wisata tambang*

Secara keseluruhan kinerja perekonomian Kota Sawahlunto tidak mengalami pertumbuhan, bahkan bisa dikatakan terjadi *stagnasi* (mandeg). Sektor yang selama ini menjadi andalan yaitu sektor pertambangan tidak lagi memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Untuk itu kebijakan perekonomian Kota Sawahlunto harus lebih diarahkan dan dititikberatkan pada sektor lain yang strategis dan menjadi

unggulan, dalam hal ini sektor industri pengolahan dan jasa-jasa serta keterkaitannya dengan sektor lain yang mendukung.

4.1.3 Analisis Wilayah Perencanaan Kota Sawahlunto

4.1.3.1 Penentuan Hirarki Kota Sawahlunto

Struktur pelayanan kota diperlukan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan dan daerah pelayanan pada tingkat yang berbeda, penentuan fasilitas infrastruktur pokok, sehingga mampu melayani kebutuhan beragam sektor dari penduduk dan mengintegrasikan pelayanan pada tingkat yang berbeda serta menciptakan keterkaitan jaringan untuk mengembangkan aksesibilitas dan efisiensi (Budiharsono, 2001:138).

Analisis pusat pelayanan untuk kasus strategi pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang dilakukan untuk melihat wilayah-wilayah yang akan menjadi pusat kegiatan berbagai sektor ekonomi yang merupakan sektor ekonomi andalan pengganti peran sektor pertambangan. Sehingga dapat diketahui hirarki wilayah di Kota Sawahlunto, yang berguna dalam penentuan strategi pengembangan kota ini pascatambang.

Analisis yang dipakai untuk menentukan hirarki kota tersebut adalah analisis Skalogram Guttman, yang akan memberikan gambaran mengenai adanya pengelompokan wilayah per-desa/kelurahan berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek kependudukan, aspek aksesibilitas, aspek kebijakan dan kelengkapan jenis fasilitas yang ada di desa/kelurahan tersebut. Aspek kependudukan berkaitan dengan jumlah penduduk yang mendiami desa/kelurahan tersebut, sedangkan aspek aksesibilitas berhubungan dengan kelancaran akses ke desa/kelurahan, yaitu dilihat dari moda angkutan dan prasarana penunjangnya. Aspek kebijakan berkaitan dengan prioritas,

perhatian dan peruntukan khusus terhadap desa/kelurahan tersebut, yaitu berupa rencana pusat pengembangan, kawasan wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Sedangkan aspek fasilitas dilihat dari kelengkapan dan jumlah fasilitas pelayanan masyarakat yang ada di desa/kelurahan tersebut.

Berdasarkan aspek-aspek di atas, maka disusunlah keperluan data dan analisis seperti lampiran G. Untuk mendapatkan hasil akhir berupa hirarki berdasarkan data tersebut, maka hirarki dari masing-masing aspek di atas diberi bobot sesuai tingkatannya. Hasil akhir seperti terlihat pada Tabel IV.8.

TABEL IV.8
HIRARKI KOTA SAWAHLUNTO

No	Desa/Kelurahan	Bobot ^{*)}		Jumlah	Hirarki
		Hirarki Berdasarkan Jumlah Penduduk	Hirarki Berdasarkan Fasilitas, Aksesibilitas dan Kebijakan		
1	2	3	4	5	6
1	Talawi Hilir	3	3	6	I
2	Muaro Kalaban	3	2	5	I
3	Silungkang Tigo	2	3	5	I
4	Santur	2	3	5	I
5	Pasar	2	3	5	I
6	Talawi Mudiak	2	2	4	II
7	Durian I	2	2	4	II
8	Durian II	2	2	4	II
9	Sikalang	2	1	3	III
10	Tumpak Tengah	2	1	3	III
11	Saringan	2	1	3	III
12	Lumindai	2	1	3	III
13	Kumbayau	1	1	2	III
14	Kubang Tengah	1	1	2	III
15	Talago Gunung	1	1	2	III
16	Lb Panjang	1	2	3	III
17	Tanah Lapang	1	2	3	III
18	Aur Mulyo	1	1	2	III
19	Salak	1	2	3	III
20	Lunto Barat	1	1	2	III
21	Silungkang Duo	1	2	3	III
22	Silungkang Oso	1	1	2	III
23	Kolok Nan Tuo	1	1	2	III

Bersambung...

...Lanjutan

24	Bukit Gadang	1	1	2	III
25	Lunto Timur	1	1	2	III
26	Air Dingin	1	1	2	III
27	Kb Sirakuk Selatan	1	2	3	III
28	Pasar Kubang	1	1	2	III
29	Sijantang Koto	1	2	3	III
30	Kb Sirakuk Utara	1	2	3	III
31	Kolok Mudiak	1	1	2	III
32	Kubang Utara Sikabu	1	1	2	III
33	B. Batu Sandaran	1	1	2	III
34	Taratak Bancah	1	1	2	III
35	Rantih	1	1	2	III
36	Batu Tanjuang	1	1	2	III
37	Datar Mansiang	1	1	2	III

Sumber : Hasil Analisis, 2003

^{*)} Keterangan :

Dari hirarki berdasarkan jumlah penduduk, fasilitas, aksesibilitas dan kebijakan diberi bobot masing-masing :

Hirarki I = 3

Hirarki II = 2

Hirarki III = 1

Sehingga :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah kelas} &= 1,33 + \log n \\ &= 1,33 + \log 24 \\ &= 2,9 \rightarrow 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= (\text{skor terbesar} - \text{skor terkecil})/\text{jumlah kelas} \\ &= (6-2)/3 \\ &= 1,3 \end{aligned}$$

maka kelas intervalnya adalah sebagai berikut :

Hirarki I : > 4,7

Hirarki II : 3,4 – 4,7

Hirarki III : 2 – 3,3

Dari perhitungan tersebut, wilayah yang termasuk ke dalam masing-masing hirarki adalah sebagai berikut :

- a) Hirarki I terdiri dari Kelurahan Pasar, Desa Talawi Hilir, Desa Santur, Desa Silungkang Tigo dan Muaro Kalaban.

b) Hirarki II terdiri dari Desa Talawi Mudiak, Kelurahan Desa Durian I dan II, sedangkan yang lain tergolong ke dalam wilayah hirarki III.

Desa/kelurahan yang tergolong ke dalam hirarki I menjadi pusat pelayanan dan pengembangan kota, karena memiliki pengaruh yang paling besar terhadap desa/kelurahan lain. Kelurahan Pasar sebagai pusat di Kecamatan Lembah Segar Desa Talawi Hilir di Kecamatan Talawi, Desa Santur di Kecamatan Barangin dan Desa Silungkang Tigo dan Muaro Kalaban di Kecamatan Silungkang.

4.1.3.2 Penentuan Wilayah Pengaruh Kota Sawahlunto

Konsep dasar dari analisis ini adalah untuk merumuskan model kebiasaan berbelanja melalui penaksiran ukuran dan jarak antar pusat perdagangan. Salah satu metoda yang digunakan untuk menghitung pengaruh antara pusat perdagangan adalah *Reilly's Law of Retail Gravitation*, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\int_a^b = \frac{D_{ab}}{\left[1 + \sqrt{\frac{P_b}{P_a}} \right]} \quad (2)$$

dimana:

\int_a^b : skope wilayah pengaruh a terhadap b

D_{ab} : jarak dari wilayah a ke b, dimana b merupakan kota pesaing terdekat

P_a : jumlah penduduk di wilayah a (Pusat)

P_b : jumlah penduduk di wilayah b

Analisis wilayah pengaruh atau influence area ini dihitung dengan menentukan titik henti (*breaking point*) dari desa/kelurahan yang menjadi pusat, yaitu desa/kelurahan hirarki I (hirarki I menjadi pusat wilayah pengembangan). Data yang digunakan adalah jumlah penduduk desa/kelurahan bersangkutan serta jarak dengan hirarki I. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

(1) Rute Kelurahan Pasar – Desa Silungkang Tigo

- Kelurahan Pasar – Muaro Kalaban – Silungkang Tigo (jumlah penduduk Kelurahan Pasar 1.514 jiwa, penduduk Desa Silungkang Tigo berjumlah 1.937 jiwa dan jarak kedua desa tersebut 12,95 km) :

$$BP = \frac{\text{Jarak Pasar – Silungkang Tigo}}{1 + \sqrt{\text{Penduduk Slkg Tigo/Penduduk Pasar}}}$$

$$= \frac{12,95 \text{ km}}{1 + \sqrt{1.937/1.514}} = 6,08 \text{ km}$$

- Kelurahan Pasar – Kubang Tengah – Silungkang Tigo (jarak = 15,17 km)

$$BP = \frac{15,17 \text{ km}}{1 + \sqrt{1.937/1.514}} = 7,12 \text{ km}$$

(2) Rute Kelurahan Pasar -- Desa Santur (jumlah penduduk Santur 1.730 jiwa, jarak 10,07 km)

$$BP = \frac{10,07 \text{ km}}{1 + \sqrt{1.730/1.514}} = 4,87 \text{ km}$$

(3) Rute Talawi Hilir – Santur

- Desa Talawi Hilir – Salak – Santur (jumlah penduduk Talawi = 5.678 jiwa jarak 10,13 km)

$$BP = \frac{10,13 \text{ km}}{1 + \sqrt{1.730/5.678}} = 6,53 \text{ km}$$

- Rute Talawi Hilir – Kolok – Santur (jarak 9,77 km)

$$BP = \frac{9,77 \text{ km}}{1 + \sqrt{1.730/5.678}} = 6,30 \text{ km}$$

Dari nilai-nilai hasil analisis wilayah pengeruh ini dapat digambarkan peta wilayah pengaruhnya, dengan *asumsi* bahwa desa/kelurahan yang luas wilayahnya lebih besar dipengaruhi oleh satu pusat pengembangan, maka desa/kelurahan tersebut tergolong ke wilayah pengembangan tersebut. Peta wilayah pengaruhnya adalah sebagai berikut :



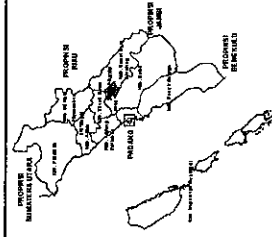
**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCA TAMBANG**

PETA WILAYAH PENGARUH KOTA SAWAHLUNTO

KETERANGAN :

	Batas Kabupaten		Pusat Hirarki I
	Batas Kecamatan		Pusat Hirarki II
	Batas Desa		Pusat Hirarki III
	Jalan		Pusat Hirarki IV
	Rel Kereta Api		
	Sungai		
	Kota		
	Kecamatan		
	Desa		
	Titik Henti		
	Batas Wilayah Pengaruh		

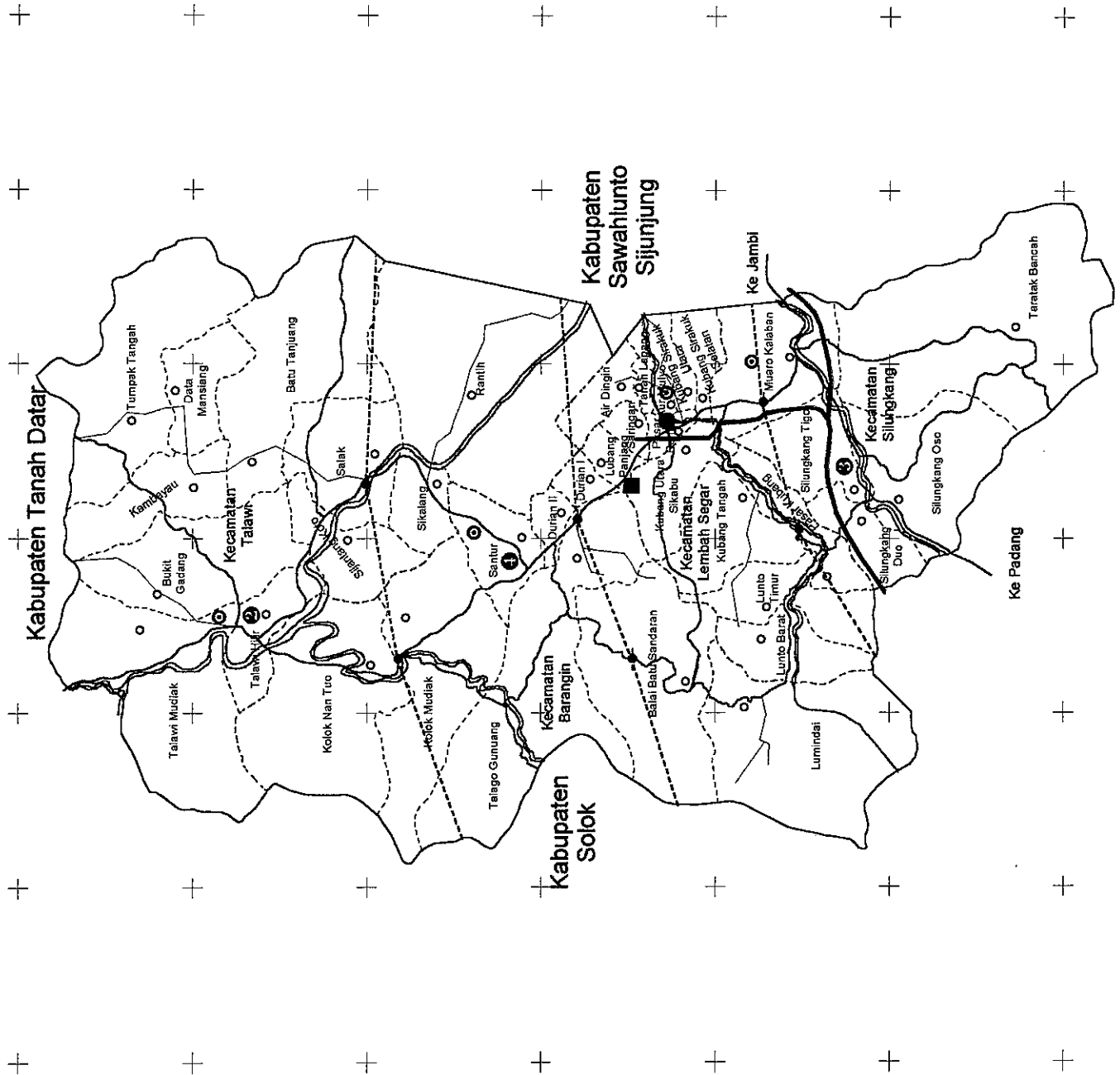


Nomor Gambar : 4.1
Halaman : 114



0 2 4 6 Km

Sumber : Hasil Analisis, 2003



Dari analisis pemetaan terhadap wilayah pengaruh berdasarkan hirarki pusat pengembangan di atas, maka wilayah Kota Sawahlunto dibagi atas empat Bagian Wilayah Pengembangan (BWP), yaitu :

- (1) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) I berpusat di Kelurahan Pasar, dengan wilayah meliputi Kelurahan Durian I, Lubang Panjang, Saringan, Air Dingin, Tanah Lapang, Aur Mulyo, Kubang Sirakuk Utara dan Selatan, Kubang Utara Sikabu, Desa Kubang Tengah, Pasar Kubang, Lunto Timur dan Barat, Lumindai serta Balai Batu Sandaran.
- (2) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) II berpusat di Desa Talawi Hilir, dengan wilayah meliputi Desa Talawi Mudiak, Kolok Nan Tuo, Sijantang Koto, Salak, Batu Tanjuang, Data Mansiang, Tumpak Tengah, Kumbayau dan Bukit Gadang.
- (3) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) III berpusat di Desa Silungkang Tigo, dengan wilayah meliputi Desa Silungkang Oso, Silungkang Duo, Muaro Kalaban dan Taratak Bancah.
- (4) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) IV berpusat di Desa Santur, dengan wilayah meliputi Kelurahan Durian II, Desa Rantih, Sikalang, Kolok Mudiak dan Talago Gunung.

Pembagian wilayah pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 Peta Bagian Wilayah Pengembangan Kota Sawahlunto.

Berdasarkan pembagian wilayah pengembangan ini nantinya akan dianalisis potensi Kota Sawahlunto yang betul-betul menggambarkan potensi riil dilihat dari jumlah employment per-desa/kelurahan.



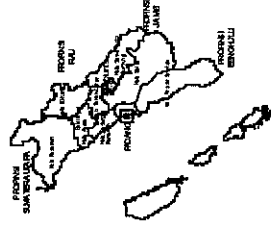
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBAH

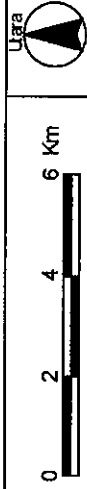
PETA
BAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (BWP) KOTA SAWAHLUNTO

KETERANGAN :

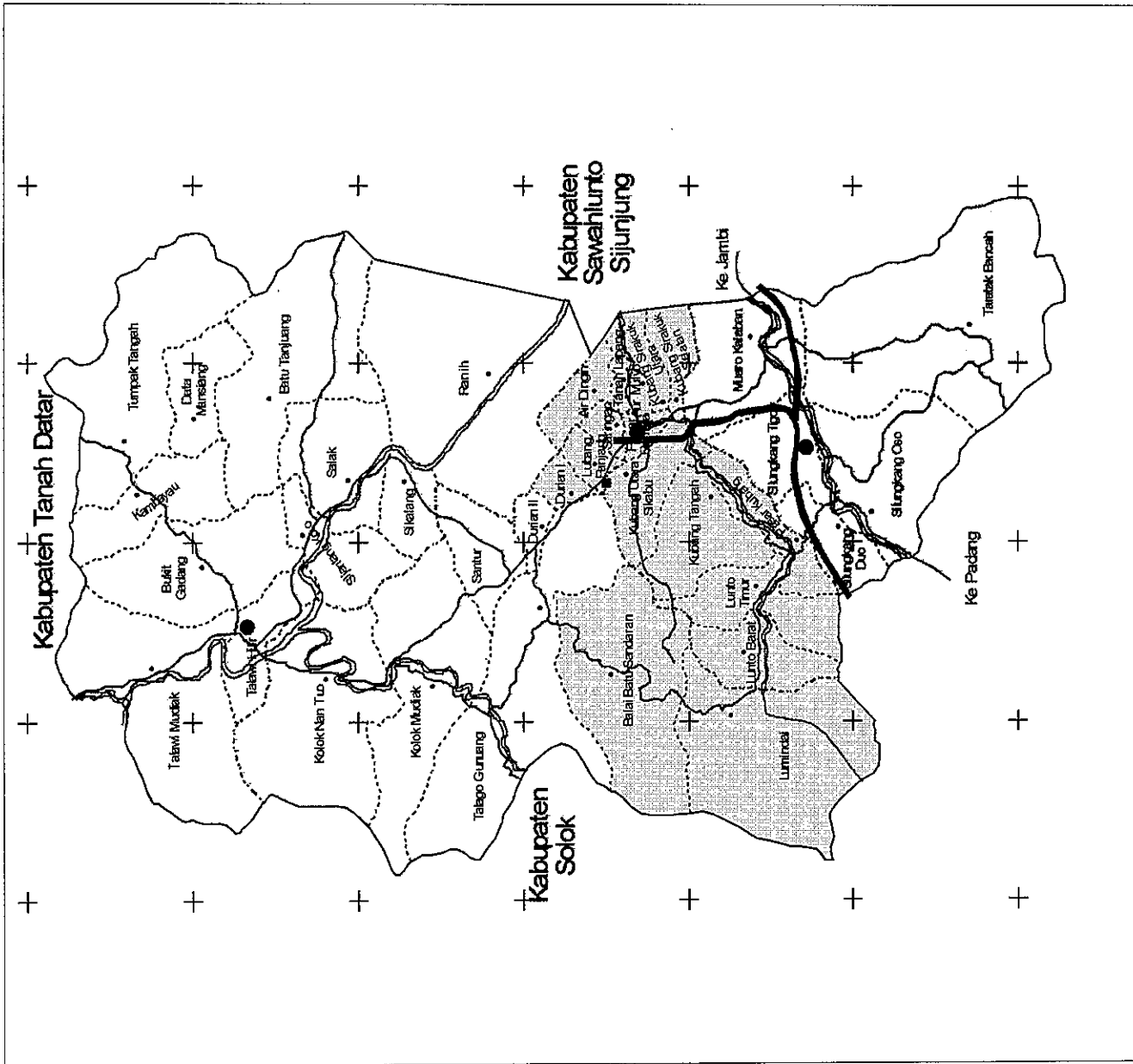
- | | |
|--|--------------------|
| | BWP I |
| | BWP II |
| | BWP III |
| | BWP IV |
| | Batas Kabupaten |
| | Batas Kecamatan |
| | Batas Desa |
| | Jalan |
| | Rel Kereta Api |
| | Sungai |
| | Kota |
| | Pusat Pengembangan |
| | Desa |



Nomor Gambar : 4.2
Halaman : 116



Sumber : Hasil Analisis, 2003



4.1.4 Analisis Perkembangan Ruang Kota Sawahlunto

4.1.4.1 Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sedangkan pola perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan gambaran hasil perpaduan antara jenis penggunaan lahan dan kegiatan manusia di suatu wilayah/kota pada kurun waktu tertentu, dimana kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi fisik lahan daerah tersebut.

Perubahan penggunaan lahan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 1995 sampai dengan 2001 tidak banyak mengalami perubahan, karena kondisi fisik alamnya yang berbukit dan kemiringan tinggi. Berdasarkan perhitungan peta guna lahan tahun 1995 dan 2001, luas perubahan penggunaan lahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

TABEL IV.9
PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 1995-2001

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		Perubahan (Ha)	Persentase
		1995	2001		
1	Perumahan	2.329,0	2.372,5	43,5	1,87
2	Industri	45,6	47,4	1,8	3,95
3	Perdagangan	341,3	352,1	10,8	3,16
4	Pertambangan	1.138,7	1.225,4	86,7	7,61
5	Persawahan	2.272,0	2.194,0	-78	-3,34
6	Tegalan/ladang	891,0	927,0	36	4,04
7	Perkebunan Rakyat	1.196,0	1.374,6	178,6	14,93
8	Hutan	13.039,3	12.741,7	-297,6	-2,28
9	Perairan Darat	41,3	42,2	0,9	2,18
10	Lain-lain	6.051,1	6067,3	16,2	0,27
	J u m l a h	27.345,0	27.345,0	0	2,74

Sumber : Hasil Analisis



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCA TAMBANG**

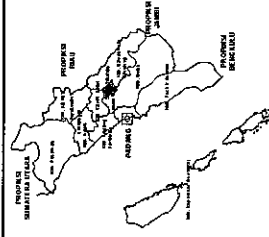
**PETA TATA GUNA LAHAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 1995**

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

TGL Tahun 1995

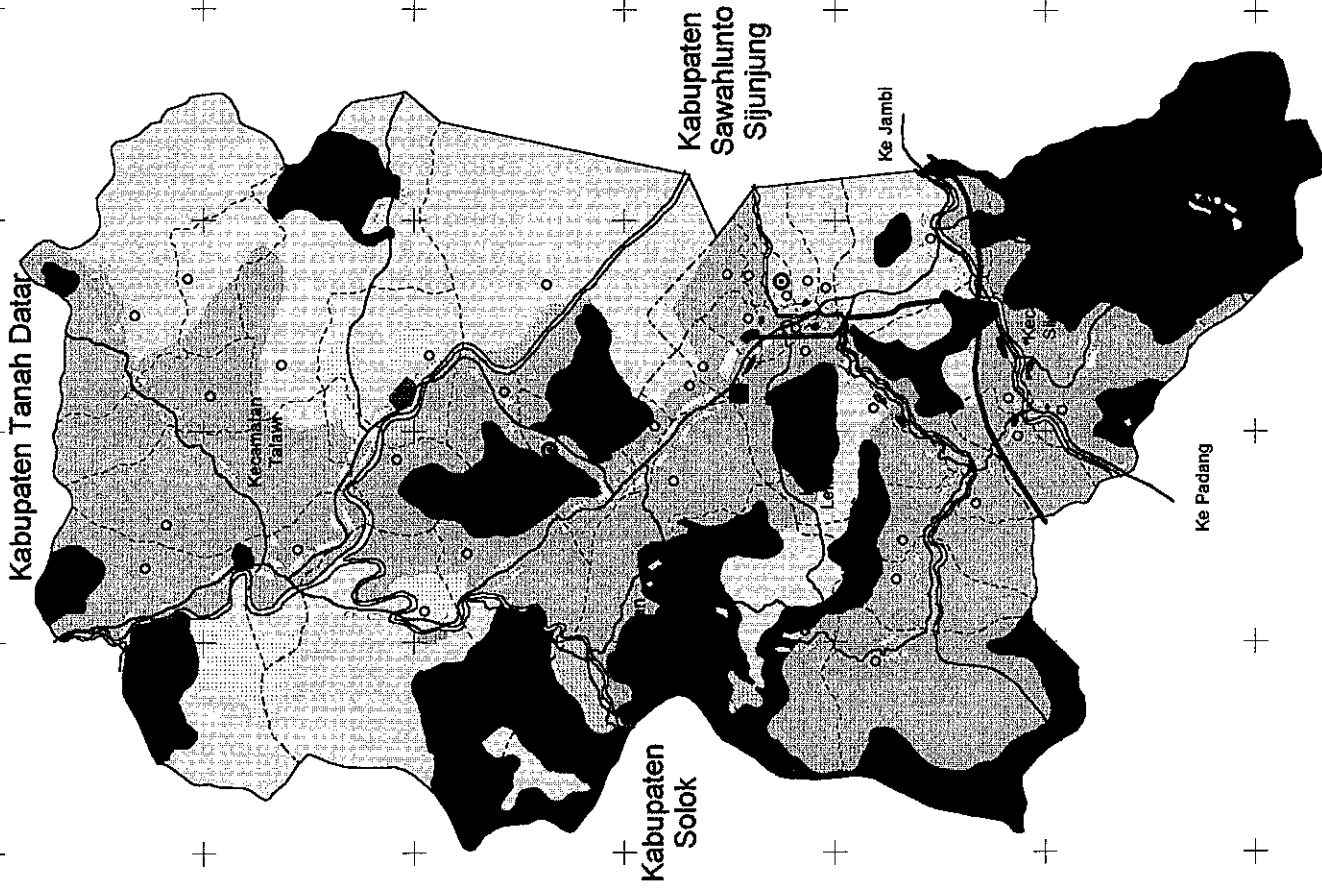
- Hutan
- Industri
- Kampung
- Kebun Campuran,
Tegalan, Ladang
- Perairan Darat
- Perdagangan
- Perkebunan
- Sawah
- Tanah Kosong



Nomor Gambar : 4.3
Halaman : 118



Sumber : BPN Kota Sawahlunto





**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG**

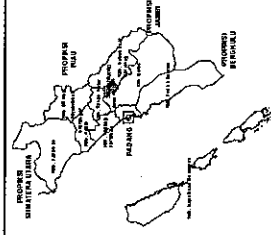
**PETA TATA GUNA LAHAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2001**

KETERANGAN :

	Batas Kabupaten		Jalan
	Batas Kecamatan		Rel Kereta Api
	Batas Desa		Sungai

TGL Tahun 2001

	Hutan		Perdagangan
	Industri		Perkebunan
	Kampung		Sawah
	Kebun Campuran, Tegalan, Ladang		Tanah Kosong
	Perairan Darat		Pertambangan

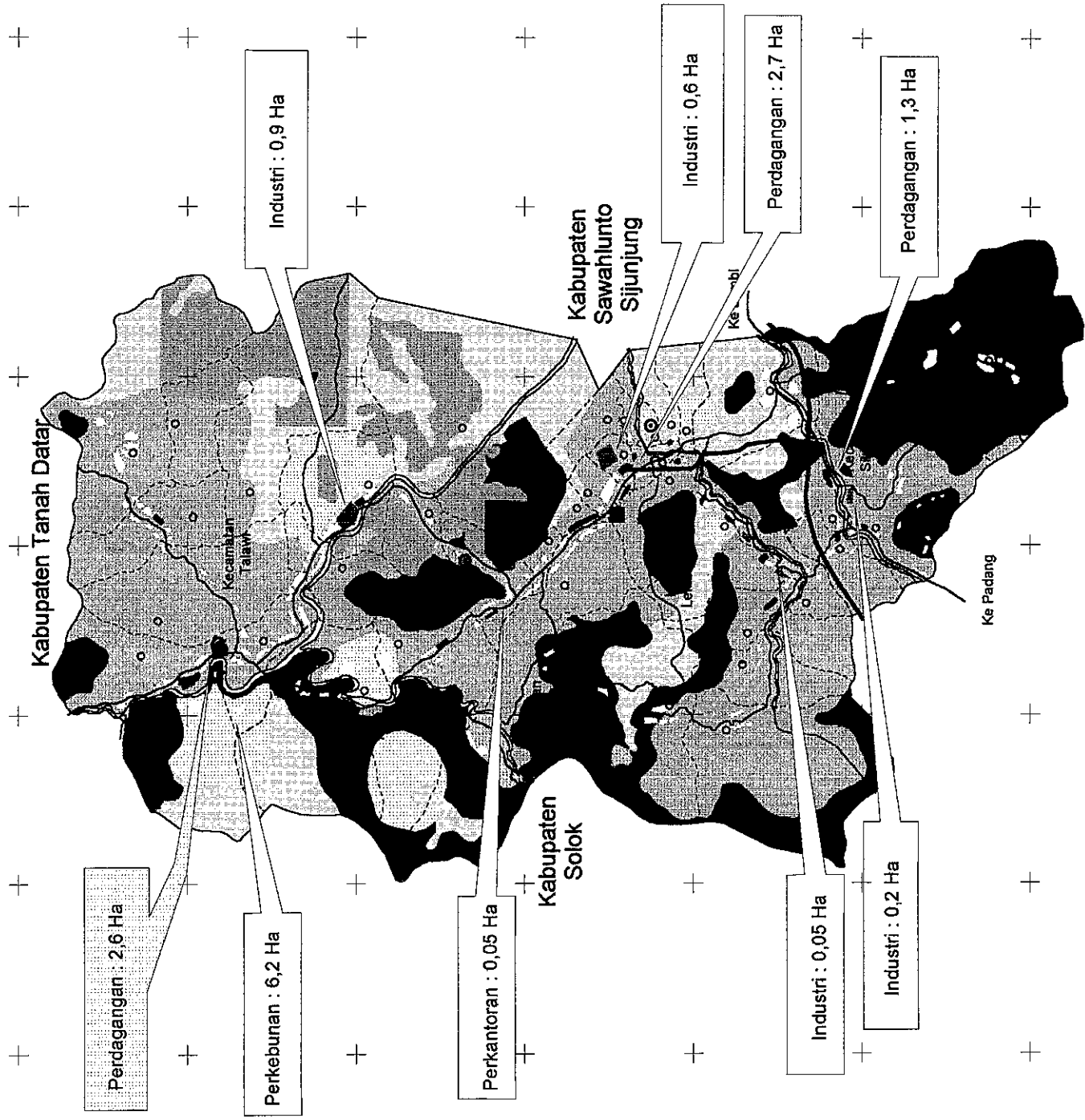


Nomor Gambar : 4.4
Halaman : 119



0 2 4 6 Km

Sumber : BPN Kota Sawahlunto





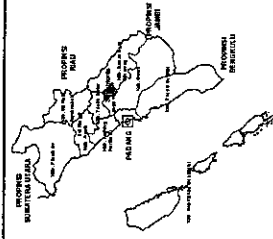
**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCA TAMBANG**

**PETA ARAH PERKEMBANGAN KERUANGAN
KOTA SAWAHLUNTO**

KETERANGAN :

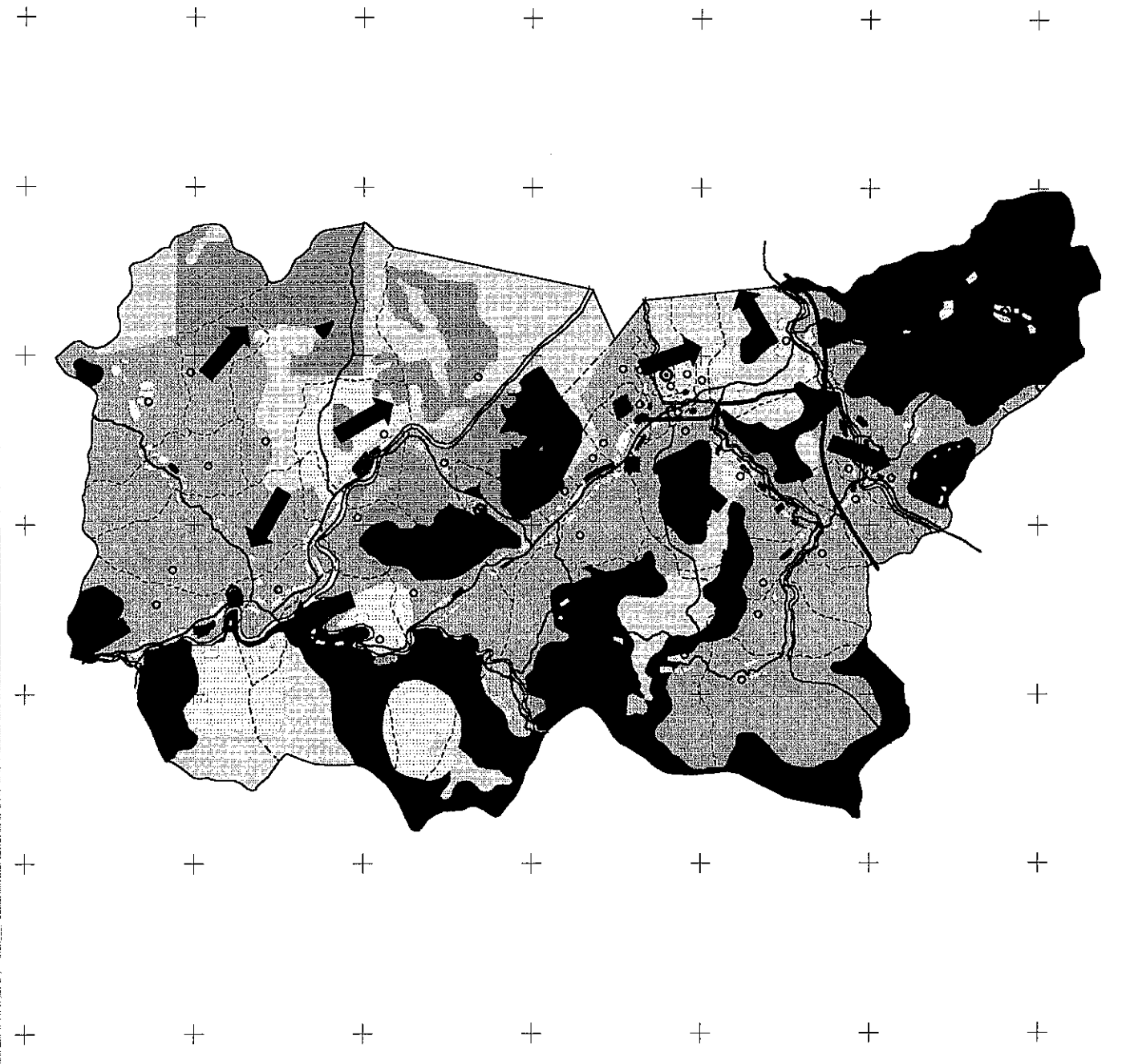
	Batas Kabupaten		Jalan
	Batas Kecamatan		Rel Kereta Api
	Batas Desa		Sungai
	Hutan		Perdagangan
	Industri		Perkebunan
	Kampung		Sawah
	Kebun Campuran, Tegalan, Ladang		Tanah Kosong
	Perairan Darat		Pertambangan
	Arah Perkembangan		



Nomor Gambar : 4.5
Halaman : 120



Sumber : Hasil Analisis, 2003



Selama kurun waktu analisis (1995-2001) terlihat bahwa perkembangan penggunaan lahan di Kota Sawahlunto tidak terlalu besar, ini sangat tergantung dengan aktivitas baik ekonomi, sosial dan sebagainya yang ada di kota ini. Perubahan penggunaan lahan untuk perkebunan rakyat adalah yang paling dominan (14,93 %). Sementara itu areal persawahan berkurang sebesar 3,34 %. Ini disebabkan oleh berkurangnya debit air Sungai Batang Ombilin yang selama ini menjadi sumber air di sawah-sawah petani, sehingga banyak petani beralih profesi dari bertanam padi di sawah menjadi berkebun, ladang dan aktivitas lain yang secara ekonomis menguntungkan.

Penggunaan lahan untuk industri juga tidak banyak mengalami perubahan, hanya 3,95 % selama kurun waktu enam tahun, padahal sektor ini merupakan sektor basis dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Ini menandakan bahwa efektifitas penggunaan lahan untuk sektor ini cukup baik. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan juga tidak terlalu besar, hanya 7,61 % (86,7 ha) dalam enam tahun atau rata-rata pertahunnya 1,27 ha saja.

4.1.4.2 Kecenderungan Perkembangan Kota Sawahlunto

Dari peta perubahan penggunaan lahan Kota Sawahlunto tahun 1995-2001 terlihat bahwa aktivitas ekonomi yang dominan adalah perkebunan dengan penambahan lahan mencapai 214,6 Ha. Ini terjadi terutama di Kecamatan Talawi yang selama ini menjadi sentra pertanian, yaitu Desa Talawi Mudiak, Bukit Gadang, Talawi Hilir, Kumbayau. Kecamatan Lembah Segar di Desa Lumindai, Lunto dan Balai Batu Sandaran. Kecamatan Barangin di Desa Kolok Mudiak dan Kolok Nan Tuo. Namun, berdasarkan laporan studi peningkatan ekonomi rakyat di Kota Sawahlunto (Bappeda, 2000) perkembangan ruang dari aktivitas pertanian untuk saat ini sudah maksimal,

karena perluasan usaha pertanian dibandingkan dengan keadaan topografi wilayahnya sudah sangat kecil. Secara lebih terperinci aktivitas ekonomi dan ruang di Kota Sawahlunto dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL IV.10
AKTIVITAS EKONOMI DAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 1995-2001

Aktivitas Ekonomi (Perubahan Guna Lahan)	Ruang (Desa/Kelurahan)			
	Kec. Talawi	Kec. Barangin	Kec. Lb Segar	Kec. Silungkang
1	2	3	4	5
1. Perkebunan (+178,6 Ha)	Desa Talawi Mudiak, Talawi Hilir, Bukit Gadang, Kumbayau	Desa Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo	Desa Lumindai, Lunto Barat & Timur, Balai Batu Sandaran	Desa Silungkang Oso.
2. Industri (+1,8 Ha)	Desa Salak, Talawi Hilir	-	Desa Kubang Tangah, Pasar Kubang, Lunto	Desa Silungkang Tigo, Silungkang Oso, Muaro Kalaban.
3. Perdagangan (+10,8 Ha)	Desa Talawi Mudiak, Talawi Hilir	Desa Santur, Kel. Durian I,	Kel. Pasar, Pasar Kubang, Lunto Timur	Desa Silungkang Duo, Silungkang Tigo, Muaro Kalaban
4. Persawahan (-78 Ha)	Desa Talawi Mudiak, Sijantang Koto, Sikalang	Desa Kolok Mudiak, Talago Gunuang, Balai Batu Sandaran.	-	-
5. Jasa-Jasa	Desa Talawi Mudiak, Talawi Hilir, Salak	Desa Santur, Durian I, II	Kel. Lb Panjang, Pasar, Saringan, Tanah Lapang, Sidomulyo	Desa Silungkang Tigo, Muaro Kalaban
6. Pertambangan Non Batubara	Desa Talawi Mudiak, Talawi Hilir, Sijantang Koto, Rantih	Desa Kolok Mudiak, Kolok Nan tuo	Desa Lunto Barat dan Timur, Kubang	Desa Silungkang Tigo, Muaro Kalaban
7. Listrik, Gas dan Air Minum	Desa Sijantang Koto	-	Kel. Pasar	-
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Desa Talawi Hilir	-	Kel. Pasar	Desa Silungkang Tigo,

Bersambung...

... Lanjutan

1	2	3	4	5
9. Bangunan	Desa Talawi Hilir, Sijantang, Salak	Desa Durian II, Santur	Kel. Pasar, Lb Panjang, Saringan	Kel. Silungkang Tigo
10. Angkutan dan Komunikasi	Desa Talawi Mudiak	-	Kel. Pasar	Desa Silungkang Tigo

Sumber : Hasil Analisis, 2003

4.1.5 Analisis Pengembangan Sesuai Wilayah Perencanaan

Potensi unggulan dan arah perkembangan ruang merupakan dua hal yang akan menentukan arah dan strategi pengembangan Kota Sawahlunto. Potensi ekonomi unggulan ditentukan dengan menggunakan analisis ekonomi basis dan shift-share dari masing-masing bagian wilayah pengembangan hasil analisis hirarki dan wilayah pengaruh, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) I

BWP I yang berpusat di Kelurahan Pasar ini meliputi wilayah Kelurahan Lubang Panjang, Durian I, Saringan, Air Dingin, Tanah Lapang, Aur Mulyo, Tanah Lapang, Kubang Sirakuk Utara dan Selatan, Kubang Utara Sikabu, Desa Kubang Tengah, Pasar Kubang, Lunto Timur dan Barat, Lumindai serta Balai Batu Sandaran. Data yang digunakan untuk analisis adalah data employment per-desa/kelurahan yang disesuaikan untuk BWP I ini. Data employment berupa sektor lain-lain diasumsikan menjadi sektor listrik, gas, air bersih, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sehingga sembilan sektor yang ada dalam perekonomian tetap ada. Hasil perhitungan LQ dan Shift-Share adalah sebagai berikut :

TABEL IV.11
HASIL PERHITUNGAN LQ DAN SHIFT-SHARE BWP I

No	Lapangan Usaha	LQ	KPP	KPK
1	2	3	4	5
1	Pertanian	0.86	0.00	0.00
2	Pertambangan	0.98	-0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	1.20	0.02	0.02
4	Bangunan	0.99	0.01	-0.01
5	Perdagangan	1.13	0.02	0.00
6	Angkutan	1.02	0.03	0.01
7	Jasa-Jasa	1.00	0.01	0.01
8	Lain-Lain*)	1.02	0.01	0.02

Sumber : Hasil Analisis, 2003

*) Keterangan : Lain-lain tidak diperhitungkan

Hasil analisis sektor ekonomi unggulan berupa pembobotan terhadap sektor basis, non basis, unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur berdasarkan nilai-nilai di atas adalah sebagai berikut :

TABEL IV.12
ANALISIS EKONOMI UNGGULAN BWP I KOTA SAWAHLUNTO

Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Kete-rangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pertanian		1	3				4	Kurang Strategis
2. Pertambangan		1		2			3	Mundur
3. Industri	2		3				5	Strategis
4. Bangunan		1			2		3	Mundur
5. Perdagangan	2		3				5	Strategis

Bersambung...

...Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Angkutan	2		3				5	Startegis
7. Jasa-Jasa	2		3				5	Strategis
8. Lain-lain	2		3				5	

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Bobot :

- Basis = 2
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 2
- Mundur = 1

Jumlah :

- 5 = Strategis
- 4 = Kurang Strategis
- 3 = Mundur
- 2 = Mundur Sekali

Sektor yang menjadi unggulan di BWP ini adalah sektor industri pengolahan, sektor angkutan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. BWP yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah Kecamatan Lembah Segar ini merupakan pusat kota lama Sawahlunto dan wilayah yang paling berkembang dibanding kecamatan lainnya. Kelurahan Pasar sebagai pusat pengembangan merupakan pusat perdagangan dengan adanya pasar regional. Selain itu juga merupakan pusat jasa-jasa, angkutan dan komunikasi. Selain itu terdapat juga industri kecil berupa kerupuk singkong di Desa Kubang, kerajinan sapu ijuk di Desa Lunto. Arah perkembangan aktivitas ekonominya adalah ke pusat kota lama dan ke Muaro Kalaban di Kecamatan Silungkang, karena produk industrinya sudah merupakan produk ekspor ke daerah tetangga, seperti Solok dan Padang, bahkan ada yang ke luar propinsi, yakni Propinsi Riau dan Jambi. Kawasan kota lama ini merupakan kawasan konservasi terhadap berbagai bangunan kuno peninggalan Belanda.

2. Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) II

BWP II yang berpusat di Desa Talawi Hilir dengan wilayah meliputi Desa Talawi Mudiak, Kolok Nan Tuo, Sijantang Koto, Salak, Batu Tanjung, Data Mansiang, Tumpak Tangah, Kumbayau dan Bukit Gadang. Hasil perhitungan LQ dan Shift-Share adalah sebagai berikut :

TABEL IV.13
HASIL PERHITUNGAN LQ DAN SHIFT-SHARE BWP II

No	Lapangan Usaha	LQ	KPP	KPK
1	2	3	4	5
1	Pertanian	1.17	0.00	0.00
2	Pertambangan	0.87	-0.01	-0.01
3	Industri Pengolahan	1.08	0.02	0.12
4	Bangunan	1.04	0.01	0.00
5	Perdagangan	0.95	0.02	-0.01
6	Angkutan	1.02	0.03	-0.01
7	Jasa-Jasa	1.01	0.01	0.01
8	Lain-lain *)	1.12	0.01	0.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

*) Keterangan : Lain-lain tidak diperhitungkan

Hasil analisis sektor ekonomi unggulan berupa pembobotan terhadap sektor basis, non basis, unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur berdasarkan nilai-nilai di atas adalah sebagai berikut :

TABEL IV.14
ANALISIS EKONOMI UNGGULAN BWP II KOTA SAWAHLUNTO

Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Kete-rangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1. Pertanian	2		3				5	Strategis
2. Pertambangan		1				1	2	Mundur Sekali
3. Industri	2		3				5	Strategis
4. Bangunan	2		3				5	Strategis
5. Perdagangan		1			2		3	Mundur
6. Angkutan	2				2		4	Kurang Strategis
7. Jasa-Jasa	2		3				5	Strategis
8. Lain-lain	2		3					

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Bobot :

- Basis = 2
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 2
- Mundur = 1

Jumlah :

- 5 = Strategis
- 4 = Kurang Strategis
- 3 = Mundur
- 2 = Mundur Sekali

Dari hasil perhitungan sektor ekonomi unggulan BWP II ini terlihat bahwa yang merupakan sektor unggulan adalah sektor pertanian, sektor industri, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Sementara dari analisis keruangannya sektor yang berkembang adalah sektor pertanian. Wajar memang, karena wilayahnya relatif lebih datar dan subur. Kota Sawahlunto dalam rencana pengembangannya pun juga diarahkan ke wilayah ini (Kec. Talawi). Kecamatan Talawi sendiri, selama ini dikenal sebagai sentra pertanian Kota Sawahlunto, terutama di Desa Talawi Mudiak, Bukit Gadang, Tumpak Tengah, Data Mansiang dan Kumbayau. Produksi padi sawah Kecamatan

Talawi ini tahun 2000 adalah 6.080 ton dengan luas persawahan 1.216 ha, palawija sebesar 210,7 ton dari luas areal 37,41 ha (Sawahlunto dalam Angka, 2000). Selain itu terdapat beberapa potensi industri, seperti keramik dan batubata di Desa Talawi Hilir dan Salak. Arah perkembangan sektor pertanian adalah ke Kab. Tanah Datar, karena adanya Pasar Saruaso yang berjarak sekitar 10 km dari Kecamatan Talawi ini dengan akses transportasi yang cukup lancar. Selain itu, Pasar Talawi yang terletak di Desa Talawi Mudiak juga terkenal ramai dan menjadi pusat perdagangan.

3. Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) III

BWP III yang berpusat di Desa Silungkang Tigo ini meliputi wilayah Desa Silungkang Oso, Silungkang Duo, Muaro Kalaban dan Taratak Bancah. Sebelumnya merupakan wilayah Kecamatan Silungkang. Hasil perhitungan LQ dan Shift-Share BWP III ini adalah sebagai berikut :

TABEL IV.15
HASIL PERHITUNGAN LQ DAN SHIFT-SHARE BWP III

No	Lapangan Usaha	LQ	KPP	KPK
1	2	3	4	5
1	Pertanian	0.94	0.00	0.02
2	Pertambangan	0.63	-0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	1.48	0.02	0.10
4	Bangunan	0.68	0.01	-0.03
5	Perdagangan	0.92	0.02	0.04
6	Angkutan	1.11	0.03	0.02
7	Jasa-Jasa	1.23	0.01	0.16
8	Lain-lain*)	0.90	0.01	0.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

*) Keterangan : Lain-lain tidak diperhitungkan

Hasil analisis sektor ekonomi unggulan berupa pembobotan terhadap sektor basis, non basis, unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur berdasarkan nilai-nilai di atas adalah sebagai berikut :

TABEL IV.16
ANALISIS EKONOMI UNGGULAN BWP III KOTA SAWAHLUNTO

Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Kete-rangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pertanian		1	3				4	Kurang Strategis
2. Pertambangan		1		2			3	Mundur
3. Industri	2		3				5	Strategis
4. Bangunan		1			2		3	Mundur
5. Perdagangan		1	3				4	Kurang Strategis
6. Angkutan	2		3				5	Startegis
7. Jasa-Jasa	2		3				5	Strategis
8. Lain-lain		1	3					

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Bobot :

- Basis = 2
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 2
- Mundur = 1

Jumlah :

- 5 = Strategis
- 4 = Kurang Strategis
- 3 = Mundur
- 2 = Mundur Sekali

Sektor yang menjadi unggulan di BWP III ini adalah sektor industri pengolahan, sektor angkutan serta sektor jasa-jasa. Kecamatan Silungkang sendiri dengan luas wilayah terkecil, hanya 3.293 ha merupakan sentra industri kerajinan, terutama tenun yang sudah menembus pasar negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Terdapat satu perusahaan aneka industri yang tergolong besar, yaitu PT Gapersil di

Desa Silungkang Tigo dan Usaha Tenunan dan Bordiran Aina yang menghasilkan berbagai motif tenunan khas Silungkang. Di samping itu kecamatan ini juga merupakan sentra kerajinan souvenir. Perkembangan sektor industri lebih menunjukkan perkembangan di kecamatan ini, karena posisinya yang strategis, berada pada Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan propinsi-propinsi di Pulau Sumatera. Namun, kondisi alam yang berbukit menyebabkan lokasi industri ini menyatu dengan permukiman penduduk. Sampai saat ini permukiman berkembang ke arah Desa Muaro Kalaban, yang merupakan persimpangan Jalan Lintas Sumatera ke pusat Kota Sawahlunto, sehingga perkembangannya cukup pesat. Terutama dengan telah beroperasinya kawasan Rest Area Muaro Kalaban.

4. *Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) IV*

BWP IV yang berpusat di Desa Santur ini meliputi wilayah Kelurahan Durian II, Desa Rantih, Sikalang, Kolok Mudiak dan Talago Gunung. Hasil perhitungan LQ dan Shift-Share BWP IV ini adalah sebagai berikut :

TABEL IV.17
HASIL PERHITUNGAN LQ DAN SHIFT-SHARE BWP IV

No	Lapangan Usaha	LQ	KPP	KPK
1	Pertanian	1.13	0.00	0.00
2	Pertambangan	1.21	-0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	0.73	-0.02	0.02
4	Bangunan	1.27	0.01	0.01
5	Perdagangan	0.87	0.02	0.00
6	Angkutan	0.85	0.03	-0.01
7	Jasa-Jasa	0.94	0.01	0.01
8	Lain-lain*)	0.86	0.01	0.02

Sumber : Hasil Analisis, 2003

*) Keterangan : Lain-lain tidak diperhitungkan

Hasil analisis sektor ekonomi unggulan berupa pembobotan terhadap sektor basis, non basis, unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur berdasarkan nilai-nilai di atas adalah sebagai berikut :

TABEL IV.18
ANALISIS EKONOMI UNGGULAN BWP IV KOTA SAWAHLUNTO

Sektor	LQ		SHIFT-SHARE				Jumlah	Kete-rangan
	Basis	Non Basis	Unggul	Agak Unggul	Agak Mundur	Mundur		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1. Pertanian	2		3				5	Strategis
2. Pertambangan	2			2			4	Kurang Strategis
3. Industri		1		2			3	Mundur
4. Bangunan	2		3				5	Strategis
5. Perdagangan		1	3				4	Kurang Strategis
6. Angkutan		1			2		3	Mundur
7. Jasa-Jasa		1	3				4	Kurang Strategis
8. Lain-lain		1	3					

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Bobot :

- Basis = 2
- Non Basis = 1
- Unggul = 3
- Agak Unggul = 2
- Agak Mundur = 2
- Mundur = 1

Jumlah :

- 5 = Strategis
- 4 = Kurang Strategis
- 3 = Mundur
- 2 = Mundur Sekali

Sektor yang menjadi unggulan adalah sektor pertanian dan sektor bangunan. Potensi pertanian ada di Desa Kolok Mudiak, Balai Batu Sandaran dan Talago Gunung sebagai penghasil beras dan sayur-sayuran, seperti tomat, terung, kacang panjang, mentimun, cabe dan sebagainya. Produksi sayur-sayuran tahun 2000 mencapai 151,2 ton (Ibid). Sektor pertambangan, dengan adanya penggalian pasir di sepanjang

Sungai Batang Ombilin dan sektor bangunan. Kecamatan Barangin ini sendiri merupakan wilayah pengembangan Kota Sawahlunto sesuai dengan RTRW 1995-2000. Perkembangan kawasan permukiman sejak tahun 1999 memang lebih banyak di Kecamatan Barangin dengan dibangunnya Perumahan Lembah Santur di Desa Santur dan Perumahan Kolok Nan Indah di Desa Kolok Mudiak. Ini berdampak pada aktivitas-aktivitas ekonomi di sekitarnya, seperti perdagangan dan transportasi. Apalagi semenjak ditingkatkannya kualitas jalan raya Santur-Talawi melewati Desa Kolok Mudiak dan Kolok Nan Tuo. Kecamatan Barangin kurang berkembang selama ini, karena perhatian pembangunan cenderung pada wilayah kota lama di Kecamatan Lembah Segar. Arah perkembangannya lebih banyak ke pusat kota lama Kelurahan Pasar di Kecamatan Lembah Segar. Secara lebih lengkap peta sektor ekonomi unggulan per-BWP ini dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto (RTRW) Tahun 1995-2000, bahwa pusat pemerintahan kota akan dipindahkan ke kawasan Santur di BWP IV. Ditandai dengan telah dibangun dan beraktivitasnya kantor-kantor pemerintahan di kawasan ini, seperti Kantor Dinas PU, Kantor Kecamatan Barangin, Dinas Pendidikan, PLN, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kantor BPN. Ini membawa konsekuensi berkembangnya aktivitas-aktivitas perdagangan dan jasa di kawasan ini. Sedangkan rencana pengembangan kota diarahkan ke Kecamatan Talawi yang kondisi topografinya relatif lebih datar dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Barangin dan Kabupaten Tanah Datar.



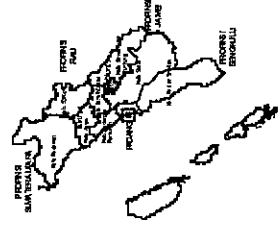
PROGRAM PASCASARJANA
 MACHISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
 KOTA SAWAHLUNTO PASCAEMBANG

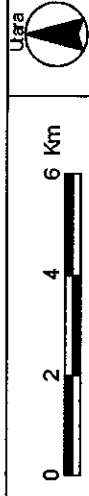
**PETA
 SEKTOR EKONOMI UNGGULAN PER-BWP**

KETERANGAN :

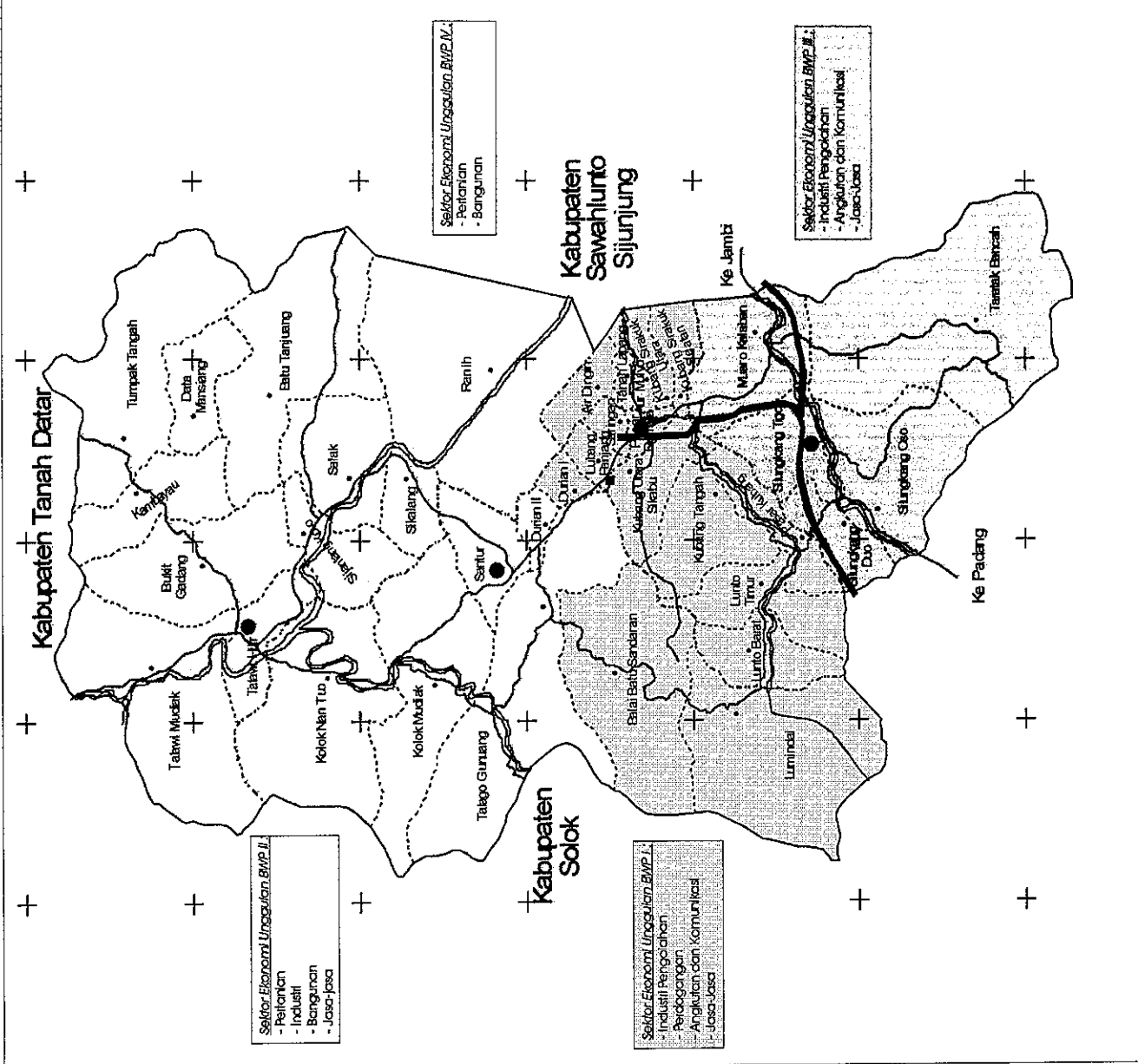
- | | | | |
|--|--------------------|--|---------|
| | Batas Kabupaten | | BWP I |
| | Batas Kecamatan | | BWP II |
| | Batas Desa | | BWP III |
| | Jalan | | BWP IV |
| | Rel Kereta Api | | |
| | Sungai | | |
| | Kota | | |
| | Pusat Pengembangan | | |
| | Desa | | |



Nomor Gambar : 4.6
 Halaman : 133



Sumber : Hasil Analisis, 2003



4.2 Arahan Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang

Arahan pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang ditentukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, terutama dilihat dari sektor ekonomi strategis non tambang, perkembangan ruang dan persepsi stakeholder kota terhadap rencana strategi tersebut. Pada hakekatnya arah pengembangan wilayah akan lebih mempertimbangkan potensi dan dinamika perkembangan wilayahnya sendiri.

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi dan keruangan Kota Sawahlunto, maka sektor yang menjadi dasar arah pengembangan Kota Sawahlunto adalah sektor industri pengolahan dan jasa-jasa, khususnya sub-sektor jasa perorangan dan rumah tangga. Ini merupakan potensi yang ada di Kota Sawahlunto sendiri sesuai dengan *teori local economic base*, bahwa perkembangan wilayah sangat ditentukan oleh elemen-elemen *endogeneous development* dalam kehidupan sosial ekonomi Kota Sawahlunto dan keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah sekitarnya. Sedangkan melihat fenomena yang berkembang di kota ini terutama setelah ancaman berhentinya aktivitas pertambangan, maka perhatian besar lebih tertuju pada sektor pariwisata yang berbasis wisata tambang. Setelah semua stakeholder kota ini melalui perdebatan yang alot dan mungkin satu-satunya daerah yang menetapkan visi dengan pola partisipatif menyatakan dan menyetujui rancangan visi kotanya sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020 (Wawancara, 2003).

TABEL IV.19
SINTESIS ANALISIS PENGEMBANGAN
KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG

ANALISIS EKONOMI		ANALISIS RUANG		HASIL STRATEGI
BWP	Sektor/Sub-Sektor Strategis	BWP	Sektor/Sub-Sektor Dominan	
1	2	3	4	5
1. BWP I	a) Industri Pengolahan b) Perdagangan, hotel dan restoran <ul style="list-style-type: none"> • Hotel • Restoran c) Angkutan dan komunikasi <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan kereta api • Jasa penunjang angkutan • Komunikasi d) Jasa-jasa <ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemerintahan dan pertahanan • Jasa hiburan dan rekreasi • Jasa perorangan dan rumah tangga 	BWP I	<input type="checkbox"/> Industri, <input type="checkbox"/> Jasa-jasa <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Angkutan dan komunikasi <input type="checkbox"/> Pariwisata	BWP I sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata tambang
2. BWP II	a) Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman pangan & hortikultura, • Perkebunan, • Peternakan, • Perikanan. b) Industri pengolahan, c) Bangunan f) Jasa-jasa <ul style="list-style-type: none"> • Jasa sosial kemasy. • Jasa perorg & RT 	BWP II	<input type="checkbox"/> Perkebunan, <input type="checkbox"/> Persawahan, <input type="checkbox"/> Perdagangan, <input type="checkbox"/> Industri pengolahan <input type="checkbox"/> Pariwisata	BWP II sebagai pusat pengembangan sektor pertanian yang mendukung pariwisata.
3. BWP III	a) Industri pengolahan b) Angkutan dan komunikasi <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan kereta api c) Jasa-jasa <ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemerintahan dan pertahanan • Jasa hiburan dan rekreasi • Jasa perorangan dan rumah tangga. 	BWP III	<input type="checkbox"/> Industri pengolahan <input type="checkbox"/> Perdagangan dan jasa-jasa	BWK III (Kec. Silungkang) sebagai pusat pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa
4. BWP IV	a) Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman pangan dan hortikultura, • Perkebunan, • Peternakan, • Perikanan. b) Bangunan	2. BWP IV	<input type="checkbox"/> Pertanian, <input type="checkbox"/> Permukiman dan perkantoran, <input type="checkbox"/> Pariwisata	BWP IV sebagai pusat permukiman, perkantoran

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Jadi ditinjau dari sisi ekonomi dan spasial yang telah dilakukan, maka penetapan arahan pengembangannya adalah :

a) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) I,

Berdasarkan analisis ekonomi, sektor yang unggul adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor angkutan dan sektor jasa-jasa, sedangkan dari analisis spasial, sektor yang dominan adalah pariwisata sejarah tambang, perdagangan dan jasa serta industri. Dilihat dari kenyataan ini maka BWP I dijadikan sebagai pusat pengembangan sektor pariwisata berbasis wisata tambang.

b) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) II,

Berdasarkan analisis ekonomi, sektor yang unggul adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Sedangkan dari analisis spasial, sektor yang dominan adalah pertanian, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Dilihat dari kenyataan ini maka BWP II dijadikan sebagai pusat pengembangan sektor pertanian yang mendukung sektor pariwisata.

c) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) III,

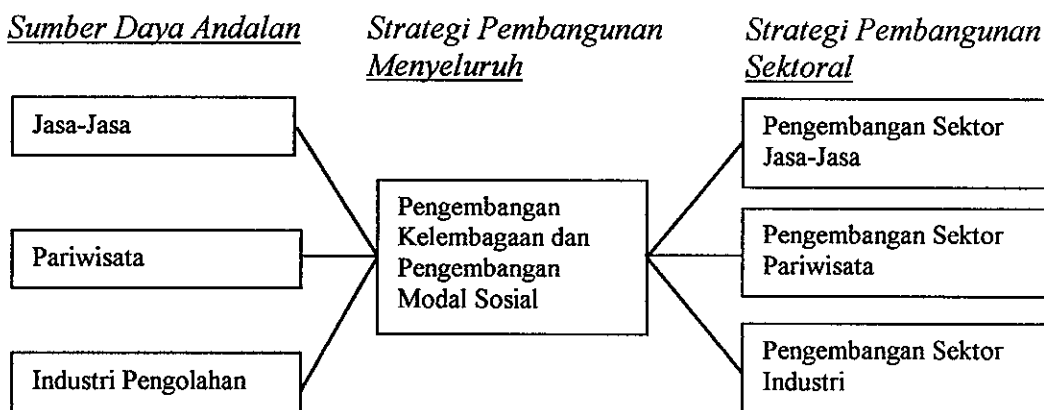
Berdasarkan analisis ekonomi, sektor yang unggul adalah sektor industri, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Sedangkan dari analisis spasial, sektor yang dominan adalah sektor perdagangan, jasa dan sektor industri. Dilihat dari kenyataan ini, maka BWP III dijadikan sebagai pusat pengembangan sektor industri dan jasa yang mendukung sektor pariwisata.

d) Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) IV,

Berdasarkan analisis ekonomi, sektor yang unggul adalah sektor pertanian dan sektor bangunan. Sedangkan dari analisis spasial, sektor yang dominan adalah

pertanian, bangunan/permukiman dan pariwisata. Dilihat dari kenyataan ini maka BWP IV dijadikan sebagai pusat permukiman dan perkantoran.

Strategi pembangunan yang berbasis wilayah menjadi acuan juga dalam pengembangan Kota Sawahlunto ke depan. Strategi ini menitikberatkan pada sumber daya andalan yang ada. Skematik strategi pengembangan Kota Sawahlunto menurut strategi pembangunan ini adalah sebagai berikut :



GAMBAR 4.6
PENGEMBANGAN KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN SUMBER DAYA LOKAL YANG DIANDALKAN

Sumber : Hasil analisis, 2003

Pengembangan kelembagaan dan modal sosial diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya andalan dan untuk kesinambungan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata harus didukung oleh sektor jasa-jasa dan industri pengolahan, sehingga lahir dan berkembanglah nantinya sektor jasa dan industri yang menunjang pariwisata.

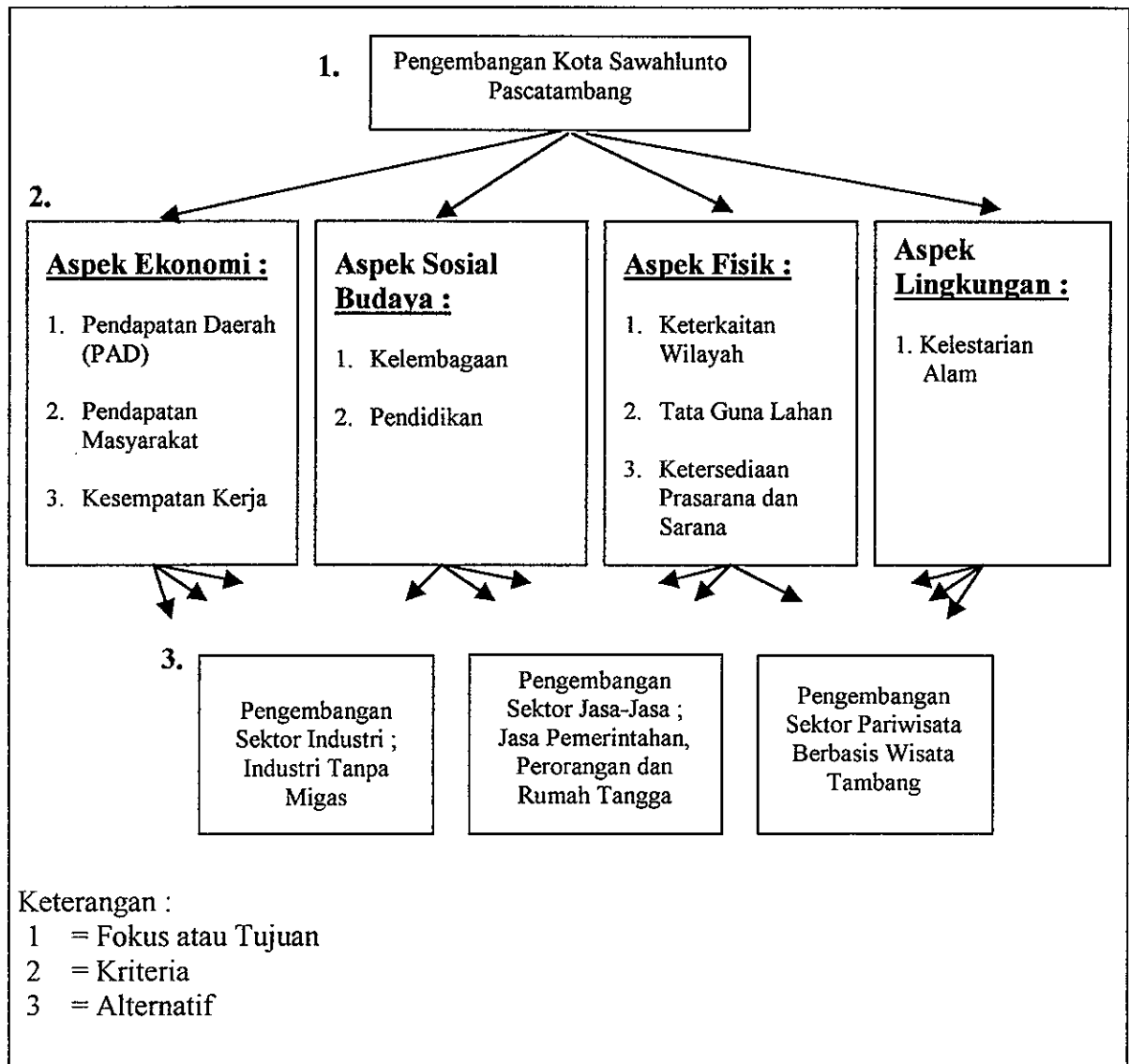
Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti punya linkage dengan sektor-sektor tersebut. Sesuai dengan sektor ekonomi strategis Kota Sawahlunto, yaitu sektor industri dan jasa-jasa, maka sektor-sektor ini punya keterkaitan langsung sebagai

penopang keberadaan pariwisata termasuk yang berbasis tambang. Secara tidak langsung keberadaan dan keberlanjutan pariwisata sangat tergantung dengan sektor jasa-jasa dan industri pengolahan ini, selain tidak mengenyampingkan peran sektor-sektor lain. Dengan kata lain sektor pariwisata merupakan sektor yang *multilinkage*. Suatu keunggulan tentunya bagi Kota Sawahlunto.

Analisis terhadap rancangan arahan ini juga diperkuat dengan melakukan Proses Analisis Hirarki (AHP), sehingga bisa mendapatkan legitimasi dari stakeholder. AHP ini diawali dengan menentukan beberapa aspek terhadap kriteria-kriteria strategi pengembangan tersebut yang didasarkan pada empat aspek pengembangan wilayah, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek lingkungan. Kemudian dari aspek-aspek tersebut faktor-faktor yang menentukan masing-masing adalah :

1. Aspek ekonomi, terdiri dari faktor :
 - Pendapatan daerah,
 - Pendapatan masyarakat,
 - Kesempatan kerja.
2. Aspek sosial budaya, terdiri dari faktor :
 - Kelembagaan,
 - Pendidikan.
3. Aspek fisik, terdiri dari faktor :
 - Tata guna lahan,
 - Ketersediaan prasarana dan sarana,
 - Keterkaitan wilayah (Widyaningsih, 2001:33-35)

Keempat adalah aspek lingkungan dengan memperhatikan faktor kelestariannya. Diagram keputusan arah pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang dengan AHP tersebut adalah :



GAMBAR 4.7
DIAGRAM KEPUTUSAN ARAH PENGEMBANGAN

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Hasil analisis AHP tersebut adalah sebagai berikut :

A. Prioritas kriteria arah pengembangan.

Prioritas kriteria arah pengembangan kotanya dinilai berdasarkan beberapa aspek pengembangan kota berupa aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek lingkungan. Dari kriteria awal ini dibuat perbandingan berpasangan untuk menentukan kriteria yang paling berpengaruh. Penilaian prioritas setiap kriteria dilakukan oleh stakeholder Kota Sawahlunto, yaitu antara lain Sekretaris Daerah, BAPPEDA, DPRD dan Forum Kota. Setelah disarikan dan diambil rata-ratanya, maka prioritas tertinggi adalah kriteria ekonomi dengan nilai 0,43. Kemudian prioritas lingkungan dengan nilai 0,29.

TABEL IV.20
PRIORITAS KRITERIA PENGEMBANGAN KOTA SAWAHLUNTO

KRITERIA	Ekonomi	Sosial Budaya	Fisik	Lingkungan	PRIORITAS
Ekonomi	1.00	2.00	4.00	2.00	0.43
Sosial Budaya	0.50	1.00	2.00	0.50	0.18
Fisik	0.25	0.50	1.00	0.33	0.10
Lingkungan	0.50	2.00	3.00	1.00	0.29
JUMLAH	2.25	5.50	10.00	3.83	1.00

Sumber : Hasil Analisis. 2003

Kriteria ekonomi memang merupakan titik tolak perhatian utama (*prime choice*) dalam menetapkan arah dan strategi pembangunan di mana saja, demikian juga di Kota Sawahlunto. Kebijakan ekonomi berupa peningkatan ekonomi rakyat dan menambah income daerah merupakan sisi-sisi yang paling krusial dalam era otonomi daerah ini.

B. Prioritas Kriteria Aspek Ekonomi

Kriteria aspek ekonomi terdiri dari pendapatan daerah (PAD), pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Berdasarkan survai yang dilakukan, peningkatan pendapatan masyarakat merupakan prioritas, namun dari hasil perhitungan justru perluasan kesempatan kerja yang menjadi prioritas utama (0,48), disusul oleh peningkatan pendapatan masyarakat (0,35) dan pendapatan daerah (0,17).

TABEL IV.21
PRIORITAS KRITERIA ASPEK EKONOMI

KRITERIA	Pendapatan Daerah (PAD)	Pendapatan Masyarakat	Kesempatan Kerja	PRIORITAS
Pendapatan Daerah (PAD)	1.00	0.33	0.50	0.17
Pendapatan Masyarakat	3.00	1.00	0.50	0.35
Kesempatan Kerja	2.00	2.00	1.00	0.48
JUMLAH	6.00	3.33	2.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Untuk memperoleh bobot-bobot akhir bagi masing-masing kriteria di atas, maka harus dikalikan dengan prioritas-prioritas tersebut dengan bobot kriteria aspek ekonomi (0,43). Hasilnya adalah untuk kriteria pendapatan daerah sebesar 0,07, kriteria pendapatan masyarakat sebesar 0,15 dan kesempatan kerja sebesar 0,21. Jadi dari hasil perhitungan kriteria aspek ekonomi, maka kesempatan kerja merupakan kriteria utama yang menjadi pilihan bagi arah pengembangan Kota Sawahlunto. Alasannya adalah karena kesempatan kerja secara luas akan menimbulkan multiplier bagi kriteria-kriteria lain.

C. Prioritas Kriteria Aspek Sosial Budaya

Kriteria aspek sosial budaya adalah pendidikan dan kelembagaan. Berdasarkan hasil perhitungan dari kedua kriteria tersebut, maka faktor kelembagaan lebih

diprioritaskan, yaitu dengan nilai 0,67 dibanding pendidikan yang hanya 0,33. Bobot akhir yang diperoleh untuk kriteria ini adalah dengan mengalikan prioritas-prioritas ini dengan bobot prioritas aspek sosial budaya (0,18), yaitu masing-masing 0,12 untuk kelembagaan dan 0,06 untuk pendidikan.

TABEL IV.22
PRIORITAS KRITERIA ASPEK SOSIAL BUDAYA

KRITERIA	Kelembagaan	Pendidikan	PRIORITAS
Kelembagaan	1.00	2.00	0.67
Pendidikan	0.50	1.00	0.33
JUMLAH	1.50	3.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Faktor kelembagaan disadari memang merupakan hal yang penting dalam suatu aktivitas khususnya dalam bidang pemerintahan. Untuk ini Kota Sawahlunto harus melakukan reorganisasi kelembagaan di lingkungan pemerintahannya termasuk para staf yang kompeten dan berkualitas. Sementara ini Kota Sawahlunto memang telah melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahannya. Berdasarkan hasil laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tanggal 22 Januari 2003, Kota Sawahlunto merupakan Kota kedua terbaik dari 134 Kabupaten dan Kota di Indonesia dalam bidang kelembagaan.

D. Prioritas Kriteria Aspek Fisik

Kriteria aspek fisik terdiri dari tata guna lahan, ketersediaan prasarana dan sarana serta keterkaitan wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan AHP yang dilakukan, maka prioritas tertinggi berada pada tata guna lahan sebesar 0,61, kemudian ketersediaan prasarana dan sarana sebesar 0,27 dan keterkaitan wilayah sebesar 0,12. Bobot akhir diperoleh dengan mengalikan nilai-nilai prioritas tersebut dengan

nilai prioritas aspek fisik (0,10). Hasilnya adalah 0,061 untuk tata guna lahan, ketersediaan prasarana dan sarana 0,027 dan keterkaitan wilayah sebesar 0,012.

TABEL IV.23
PRIORITAS KRITERIA ASPEK FISIK

KRITERIA	Tata Guna Lahan	Ketersediaan Prasarana dan Sarana	Keterkaitan Wilayah	PRIORITAS
Tata Guna Lahan	1.00	3.00	4.00	0.61
Ketersediaan Prasarana dan Sarana	0.33	1.00	3.00	0.27
Keterkaitan Wilayah	0.25	0.33	1.00	0.12
JUMLAH	1.58	4.33	8.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Jika dicermati realitas tata guna lahan di Kota Sawahlunto terutama rencana tata ruang kotanya belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan program pembangunan, masih terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengikat disertai sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang dan gunanya.

E. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Pendapatan Daerah.

Alternatif ditentukan berdasarkan analisis sebelumnya, dengan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share berupa sektor-sektor yang memiliki keunggulan sebagai sektor basis dan punya daya kompetitif, yaitu sektor industri berupa sub-sektor industri tanpa migas, sektor jasa-jasa berupa sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga serta sektor pariwisata berbasis wisata tambang. Hasil perhitungan berdasarkan kriteria pendapatan daerah ini adalah sebagai berikut :

TABEL IV.24
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN KRITERIA
PENDAPATAN DAERAH

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor Industri Tanpa Migas	Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor Industri Tanpa Migas	1.00	3.00	4.00	0.62
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	0.33	1.00	2.00	0.24
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	0.25	0.50	1.00	0.14
JUMLAH	1.58	4.50	7.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Prioritas tertinggi dari hasil perhitungan adalah sektor industri sub-sektor industri tanpa migas dengan nilai 0,62, kemudian sektor jasa-jasa berupa sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga dengan nilai 0,24, sedangkan sektor pariwisata berbasis wisata tambang hanya sebesar 0,14. Sektor industri biar bagaimanapun tetap menarik untuk dikembangkan, karena nilai tambahnya cukup besar bagi perekonomian. Pengembangan industri di Kota Sawahlunto hanya terbatas pada industri kerajinan rakyat yang memang sudah terkenal selama ini, seperti tenun. Kondisi alam yang berbukit dan kemiringan tinggi tidak mendukung pengembangan sektor ini. Untuk itu walaupun perannya masih cukup besar dalam perekonomian sebagai sektor basis, namun tidak menjanjikan dalam jangka panjang.

F. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan kriteria pendapatan masyarakat, maka hasil perhitungan yang didapatkan bahwa sektor jasa-jasa berupa sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga merupakan prioritas tertinggi dengan nilai mencapai 0,48,

sedangkan sektor pariwisata berbasis wisata tambang dan sektor industri sub-sektor industri tanpa migas masing-masing adalah 0,35 dan 0,17. Sektor jasa-jasa masih merupakan prioritas bagi kesejahteraan masyarakat terutama jasa-jasa umum pemerintahan dan pertahanan. Semuanya didorong oleh tingginya pendapatan para pegawai PT Bukit Asam UPO.

TABEL IV.25
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN KRITERIA
PENDAPATAN MASYARAKAT

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	0.50	0.33	0.17
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	2.00	1.00	2.00	0.48
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	3.00	0.50	1.00	0.35
JUMLAH	6.00	2.00	3.33	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

G. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Kesempatan Kerja

Berdasarkan pertimbangan kesempatan kerja, maka prioritas strategi terbesar adalah sektor industri sub-sektor industri tanpa migas dengan nilai 0,54, sedangkan sektor industri berbasis pariwisata dan jasa-jasa masing-masing adalah 0,30 dan 0,16.

TABEL IV.26
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN
KRITERIA KESEMPATAN KERJA

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	3.00	2.00	0.54
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	0.33	1.00	0.50	0.16
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	0.50	2.00	1.00	0.30
JUMLAH	1.83	6.00	3.50	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

H. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Kelembagaan

Berdasarkan pertimbangan kelembagaan, maka prioritas strategi utama adalah sektor pariwisata berbasis tambang dengan nilai 0,54, sedangkan sektor jasa-jasa serta industri masing-masing adalah 0,30 dan 0,16.

TABEL IV.27
PRIORITAS BERDASARKAN KRITERIA KELEMBAGAAN

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	0.50	0.33	0.16
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	2.00	1.00	0.50	0.30
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	3.00	2.00	1.00	0.54
JUMLAH	6.00	3.50	1.83	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

I. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Pendidikan

Berdasarkan pertimbangan pendidikan, maka prioritas strategi utama adalah sektor industri sub-sektor industri tanpa migas dengan nilai 0,59, sedangkan sektor jasa-jasa dan pariwisata masing-masing adalah 0,25 dan 0,16

TABEL IV.28
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN KRITERIA
PENDIDIKAN

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	3.00	3.00	0.59
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	0.33	1.00	2.00	0.25
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	0.33	0.50	1.00	0.16
JUMLAH	1.67	4.50	6.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

J. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Keterkaitan Wilayah

Berdasarkan pertimbangan keterkaitan wilayah, maka prioritas strategi utama adalah sektor pariwisata dengan nilai 0,59, sedangkan sektor industri sub-sektor industri tanpa migas dan jasa-jasa berupa sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga masing-masing adalah 0,25 dan 0,16

TABEL IV.29
PRIORITAS BERDASARKAN KRITERIA
KETERKAITAN WILAYAH

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	2.00	0.33	0.25
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	0.50	1.00	0.33	0.16
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	3.00	3.00	1.00	0.59
JUMLAH	4.50	6.00	1.67	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

K. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Tata Guna Lahan

Berdasarkan pertimbangan tata guna lahan, maka prioritas strategi utama adalah sektor pariwisata berbasis tambang dengan nilai 0,54, sedangkan industri sub-sektor industri tanpa migas dan sektor jasa-jasa masing-masing adalah 0,27 dan 0,19

TABEL IV.30
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN
KRITERIA TATA GUNA LAHAN

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengemb. Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	2.00	0.33	0.27
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintah, perorangan & RT	0.50	1.00	0.50	0.19
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	3.00	2.00	1.00	0.54
JUMLAH	4.50	5.00	1.83	1.00

Sumber : Hasil Analists, 2003

L. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Ketersediaan Prasarana dan Sarana

Berdasarkan pertimbangan ketersediaan prasarana dan sarana, maka prioritas strategi utama adalah sektor pariwisata berbasis tambang dengan nilai 0,62, sedangkan industri sub-sektor industri tanpa migas dan sektor jasa-jasa masing-masing adalah 0,22 dan 0,16

TABEL IV.31
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN
KRITERIA KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengemb. Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	2.00	0.25	0.22
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintah, perorangan & RT	0.50	1.00	0.33	0.16
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	4.00	3.00	1.00	0.62
JUMLAH	5.50	6.00	1.58	1.00

Sumber : Hasil Analists, 2003

M. Prioritas terhadap Alternatif Pengembangan Berdasarkan Pertimbangan Kelestarian Lingkungan

Berdasarkan pertimbangan kelestarian lingkungan, maka prioritas strategi utama adalah sektor pariwisata berbasis tambang dengan nilai 0,68, sedangkan industri sub-sektor industri tanpa migas dan sektor jasa-jasa masing-masing adalah 0,20 dan 0,12

TABEL IV.32
PRIORITAS PENGEMBANGAN BERDASARKAN KRITERIA
KELESTARIAN LINGKUNGAN

PRIORITAS PENGEMBANGAN	Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	Pengemb.Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	PRIORITAS
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	1.00	2.00	0.25	0.20
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa dengan sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	0.50	1.00	0.20	0.12
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	4.00	5.00	1.00	0.68
JUMLAH	5.50	8.00	1.45	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2003

N. Menentukan Bobot Akhir Alternatif

Bobot akhir dari berbagai alternatif di atas ditentukan dengan mencari rata-rata geometris matrik prioritas alternatifnya dan melakukan normalisasi matrik prioritas tersebut untuk menemukan bobot prioritas akhirnya.

TABEL IV.33
BOBOT AKHIR ALTERNATIF PENGEMBANGAN

MATRIK KRITERIA PRIORITAS	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial Budaya	Aspek Fisik	Aspek Lingkungan	BOBOT AKHIR
Pengembangan Sektor Industri sub-sektor industri tanpa migas	0.18	0.06	0.03	0.06	0.32
Pengembangan Sektor Jasa-Jasa sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan & rumah tangga	0.13	0.05	0.02	0.03	0.23
Pengembangan Sektor pariwisata berbasis wisata tambang	0.12	0.08	0.06	0.20	0.45

Sumber :Hasil Analisis, 2003

Jadi berdasarkan intensitas kriteria keputusan yang digunakan di atas, maka prioritas preferensi stakeholder terhadap arahan pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang adalah :

- *Sektor pariwisata berbasis wisata tambang sebagai prioritas I dengan bobot akhir pilihan 45 %*
- *Sektor industri, yaitu sub-sektor industri tanpa migas sebagai prioritas II dengan bobot akhir pilihan 32 %*
- *Sektor jasa-jasa, yaitu sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga sebagai prioritas III dengan bobot akhir pilihan 23 %*

Sektor pariwisata berbasis wisata tambang ditetapkan sebagai prioritas utama yang menjadi dasar pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang. Ini sesuai dengan visi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sendiri sejak tahun 2000, namun dari penilaian sementara belum ada upaya yang maksimal dari Pemerintah Kota untuk menunjang terlaksananya visi tersebut. Tercermin dari program-program pembangunan yang ada dalam APBD (Wawancara Fadli,2003).

Konsekuensi sebagai dasar pengembangan adalah setiap kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk kemajuan sektor ini, sehingga tujuan akhirnya sebagai sektor yang diharapkan mampu menggantikan peran sektor pertambangan dapat tercapai dalam waktu yang singkat.

Suatu konsep pengembangan wilayah termasuk pariwisata harus didukung dengan kesiapan pelaksana dan infrastruktur penunjangnya. Untuk menjadi kota wisata tambang, maka Sawahlunto harus melakukan pengembangan institusi dan pembangunan fisik pendukung. Pengembangan institusi mencakup pengorganisasian, kebijakan dan peraturan-peraturan. Pembangunan fisik berupa kegiatan konstruksi dan operasi akan mendukung berfungsinya institusi. Pengembangan kapasitas institusi termasuk pengembangan kerja sama antar daerah harus merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Pembangunan fisik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kota dan pengembangan produk wisata akan sangat tergantung dengan ketersediaan dana pembiayaannya.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pengembangan Kota Sawahlunto ini, yaitu :

1) Peraturan penataan ruang dan bangunan

Ini ditujukan untuk menentukan tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang telah ada dan yang akan datang sebagai pedoman. Diperlukan penetapan zona, seperti zona konservasi, untuk mempertahankan keaslian bangunan dan gedung serta menciptakan suasana lingkungan masa lalu. Zona rehabilitasi, dengan memperbaiki gedung dan unsur-unsur tertentu serta adanya zona larangan terhadap pembangunan di kawasan tertentu.

2) Peningkatan kapasitas perencana dan pengelola kota

Ini berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam manajemen pengelolaan kota, untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang berkaitan, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kota, baik secara teknis maupun visual dan mampu menjadikan Kota Sawahlunto sebagai tempat tinggal yang layak dan enak (*liveable*).

3) Inventarisasi terhadap potensi, kendala dan peluang pengembangan ke depan, sehingga dapat dilakukan perencanaan yang komprehensif dan antisipasi terhadap ancaman perkembangannya.

4) Membentuk forum antar daerah

Ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama secara nyata dengan daerah-daerah lain yang punya keterkaitan, sehingga tercipta rumusan strategi pemasaran wisata secara kolektif termasuk menentukan segmen dan permintaan pariwisata.

5). Memberikan kemudahan akses permodalan bagi perusahaan-perusahaan industri dan jasa yang ada, seperti industri tenun Silungkang, industri kerupuk singkong, industri keramik, perajin souvenir, perajin sapu hias sehingga hasil produksinya dapat menunjang keberadaan sektor pariwisata.

6). Membantu fasilitas pemasaran produk hasil industri dan jasa tersebut dengan menciptakan keterkaitan antar wilayah dan antar sektor ekonomi yang komplementer, misalnya promosi pariwisata ke daerah-daerah lain, kerja sama dengan hotel, restoran dan biro perjalanan wisata.

Harus diakui bahwa, pariwisata berbasis pertambangan dengan arsitektur Hindia Belanda yang sangat unik dan satu-satunya di Indonesia dan menjadi potensi tersendiri bagi Kota Sawahlunto. Wisata tambang merupakan jenis wisata alternatif yang belum

begitu dikenal. Sebagai gambaran di Inggris, wisata pertambangan (*mines tourism*) digolongkan sebagai pariwisata warisan keindustrian (*industrial heritage tourism*). Karena tambang, khususnya batubara merupakan salah satu penggerak revolusi industri. Big Pit Museum di Rhondda Valley Wales adalah bekas lobang tambang batubara sedalam 90 meter di bawah tanah dan telah dikunjungi 107.551 orang tahun 1993 (Sawahlunto, 2020).

Tantangan tersendiri sebetulnya di Sawahlunto khususnya dan Sumatera Barat umumnya, dimana selama ini pariwisata selalu identik dengan kemaksiatan dan hal-hal yang negatif. Masyarakat Sumatera Barat terkenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadatnya. Kondisi kontradiktif seperti itu telah menyebabkan sektor pariwisata secara umum di propinsi ini tidak berkembang, padahal potensinya sangat besar.

Sawahlunto sendiri sebagai suatu kota tidak dapat mengembangkan diri secara dinamis, karena kondisi alam dan lokasinya. Fasilitas pelayanan kota memang tumbuh dan berkembang, namun hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Kota lama Sawahlunto cenderung mandeg menjadi museum peninggalan kejayaan pertambangan batubara Ombilin masa lalu. Sungai Batang Lunto yang membelah kota ini tidak terawat lagi dan mengalami pendangkalan serta debit air yang menurun. Tantangan semacam inilah yang menjadi tantangan bagi pengembangan pariwisata khususnya. Selain sektor pariwisata ke depan, sebetulnya Kota Sawahlunto masih punya sektor industri yang punya nilai yang tinggi dan terkenal dari dulu, tidak saja di dalam negeri tapi sampai ke negara tetangga Singapura dan Malaysia, yaitu industri tenun Silungkang.

Jenis dan kelompok industri yang ada pada umumnya merupakan industri kecil, sedangkan kelompok aneka industri ada satu unit, yaitu PT. GAPERSIL di Kecamatan Silungkang. Perannya terhadap perekonomian kota cukup besar, namun daerah pemasaran dan modal usaha merupakan kendala yang dirasakan selama ini. Pemerintah Kota harus memberikan subsidi dan peluang pengembangan usaha untuk meningkatkan produksinya.

Perkembangan Kota Sawahlunto tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya keterkaitan dan dukungan sektor lain. Dalam hal ini menciptakan *linkage* antar sektor sangat penting. Sektor pariwisata merupakan sektor yang punya *linkage* luas dan tidak tergantung dengan jenis dan produk tertentu. Industri rumah tangga yang banyak di Sawahlunto akan menjadi penopang sektor pariwisata tersebut. Selain tercipta *linkage* antar sektor juga diperlukan *linkage* antar wilayah, terutama pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga tercipta suatu simbiosis yang punya fungsi spesifik dan akhirnya tercipta ketergantungan secara internal.

Pengembangan wisata tambang dapat dilakukan mulai dari kota lama Sawahlunto di Kecamatan Lembah Segar sampai dengan kawasan tambang terbuka di Desa Rantih, Sikalang, Salak dan Batu Tanjung di Kecamatan Talawi melalui Kelurahan Durian I dan Durian II di Kecamatan Barangin. Kota lama mempunyai modal keunggulan, karena mempunyai situs penambangan, instalasi pemrosesan batubara, prasarana dan stasiun kereta api dan bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Sehingga diharapkan keberhasilan pengembangan di kota lama ini akan menjadi impuls yang dapat mendorong perkembangan wisata tambang secara keseluruhan. Peta arahan pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang ini dapat digambarkan sebagai berikut :



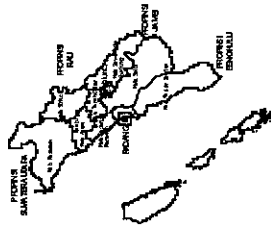
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

STUDI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHILUNTO PASCAAMBANG

PEETA
ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERUANGAN
KOTA SAWAHILUNTO PASCAAMBANG

KETERANGAN :

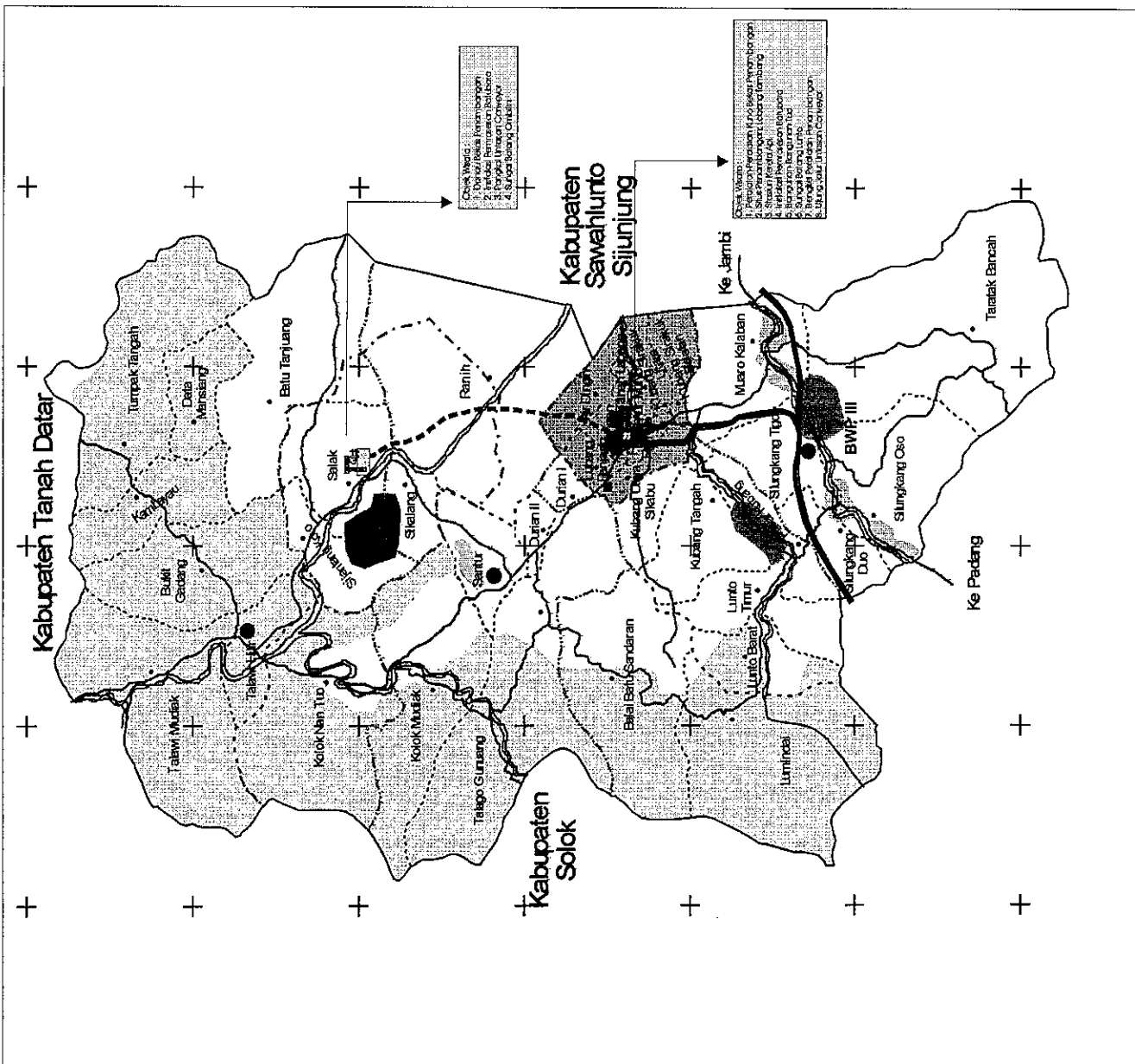
	Batas Kabupaten		Danau
	Batas BWP		Bata Tambang
	Batas Desa		Kawasan Wisata Saak
	Jalan		Kawasan Wisata Kota Lama
	Rel Kereta Api		Stasiun Kereta Api
	Sungai		Museum
	Kota		Pemukimahan Batahari
	Pusat Pengembangan		Industri
	Desa		Perumahan
	Conveyor		Perdagangan
			Perkebunan
			Pemukimahan
			Jasa-Jasa



Nomor Gambar : 4.9
Halaman : 156



Sumber : Hasil Analisis, 2003



4.3 Spesifikasi Kawasan Pengembangan

4.3.1 Kawasan Kota Lama

Kota lama merupakan daerah yang paling berkembang di Kota Sawahlunto, sudah sejak lama kawasan ini menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Di kawasan kota lama ini terdapat berbagai bangunan bersejarah, seperti Mesjid Agung Sawahlunto yang dulunya merupakan gudang mesiu Belanda, Gereja, Kantor Pusat Pertambangan Ombilin yang sebelumnya merupakan bangunan gereja terbesar di Sawahlunto, Bengkel Utama Pertambangan Ombilin, fasilitas penyaringan dan pengangkutan batubara, stasiun kereta api dan lobang tambang yang melintas di bawah pusat kota lama ini

Kawasan yang berupa lembah sebagaimana layaknya kuali, sehingga terkenal dengan sebutan *kota kuali* ini dilalui oleh Sungai Batang Lunto yang membelah pusat kotanya dan bermuara di Sungai Batang Ombilin. Dalam analisis yang dilakukan, kota lama ini menjadi pusat Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) I, karena memang memiliki kelengkapan fasilitas dibanding bagian wilayah pengembangan lain. Karakteristik utama di sini adalah sebagai kawasan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Belanda waktu itu, sehingga letak tata bangunan dan area terbuka hijau lebih teratur, terutama di kawasan permukiman pegawai tambang serta bangunan pasar di sepanjang jalan utama. Kawasan sepanjang Sungai Batang Lunto dimanfaatkan sebagai kawasan aliran air dengan drainase yang berakhir di sini untuk menghindari banjir, karena kawasan kota lama ini relatif lebih rendah sebagai dasar lembah.

Potensi pengembangan kawasan ini sangat besar, yaitu dengan memanfaatkan berbagai peninggalan tambang dan menciptakan keterkaitan dengan kawasan pengembangan lain di Salak, yaitu dengan memanfaatkan jalur conveyor yang telah

menghubungkan kedua kawasan ini. Selain itu pemandangan alamnya indah jika berada di pinggir lembah, apalagi jika naik ke puncak bukit “puncak polan” yang berada di Selatan pusat kota lama ini. Puncak polan ini sendiri sampai sekarang tetap dimanfaatkan sebagai lokasi camping bagi para pencinta alam. Ini semua karena keindahan panorama alamnya apalagi saat malam hari, dengan kelap-kelip lampu di dasar lembah, sehingga orang sering menyebut kota lama ini layaknya Hongkong di waktu malam. Diharapkan dengan pengembangan kota lama ini akan memberikan impuls bagi pengembangan kawasa-kawasan lain yang juga potensial.

4.3.2 Kawasan Salak

Kawasan Salak yang berada di Bagian Wilayah Pengembangan II dan IV merupakan kawasan tambang luar yang paling luas dan terdapat danau bekas tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata resort. Pembangunan kawasan resort dengan danau tambangnya diharapkan akan menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata yang menarik, sehingga dapat menunjang pengembangan wisata tambang secara keseluruhan. Selain itu dengan adanya aliran Sungai Batang Ombilin yang dapat pula dimanfaatkan dengan berbagai atraksi wisata di atas air, serta kawasan pinggir sungai sebagai kawasan peristirahatan dan bersantai.

Di kawasan Salak yang meliputi Desa Salak, Sijantang Koto, Rantih dan Sikalang terdapat (PLTU) Sijantang dan PLTA Salak yang memasok kebutuhan listrik Kota Sawahlunto dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan bahan bakar batubara. Namun keberlanjutannya terancam seiring dengan akan berhentinya aktivitas pertambangan. Di sini juga terdapat pusat pertambangan Plat Tengah dengan fasilitas penambangan yang lengkap disertai peralatan berat pemrosesan batubara, terdapat pangkal conveyor yang menyalurkan batubara ke pusat kota lama, untuk penyaringan

sebelum pengangkutan dengan kereta api ke Pelabuhan Teluk Bayur. Kawasan yang berpenduduk sekitar 5.000 orang ini merupakan pusat permukiman pekerja tambang sampai sekarang, sehingga aroma pluralisme sangat terasa. Berbagai suku bangsa terdapat di sini, seperti Suku Minang, Jawa, Batak, Sunda serta Timor. Sebagian besar mereka merupakan pekerja kasar pada perusahaan-perusahaan tambang.

Kawasan Salak terkenal sebagai daerah industri dan jasa dengan adanya dua pembangkit tenaga listrik dan daerah permukiman yang telah menumbuhkan berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan jasa. Industri batu bata merupakan salah satu yang terkenal di sini, karena sebagian besar kebutuhan batu bata di Kota Sawahlunto dan daerah-daerah sekitarnya berasal dari Desa Sijantang ini.

4.4 Operasionalisasi Arah Pengembangan Kota Sawahlunto Pascatambang

Walaupun Kota Sawahlunto masih mengharapkan kelanjutan aktivitas pertambangan batubara, yaitu tambang dalam yang masih memiliki cadangan yang cukup besar, namun ketergantungan akan sumber daya ekstraktif yang bersifat non-renewable ini tidak akan menjamin keberlanjutan kota dalam jangka panjang. Untuk itu konsep pengembangan pariwisata ini merupakan momentum yang tepat untuk masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah diutarakan dalam karakteristik Kota Sawahlunto, di mana kawasan pengembangan wisata tambang adalah di kota lama dan Desa Salak, Sijantang, Sikalang dan Rantih serta dengan memanfaatkan lintasan conveyor yang menghubungkan kedua kawasan tersebut. Demi terlaksananya konsep pengembangan pariwisata berbasis wisata tambang ini, maka dibuat suatu rancangan operasional, berupa :

A. Identifikasi dan renovasi terhadap objek-objek wisata yang potensial

Ini diperlukan untuk menjaga agar terhindar dari kerusakan dan gangguan masyarakat, melalui pembentukan suatu tim pengelolaan objek wisata yang bertugas melakukan identifikasi, inventarisir dan ditetapkan sebagai objek milik negara yang perlu dilindungi. Dilakukan perbaikan-perbaikan dan renovasi.

B. Pembangunan sarana dan prasarana pemunjang kegiatan pariwisata

Kegiatan yang dilakukan antara lain, pembangunan hotel, penginapan, jalan dan sarana angkutan, melalui kerja sama dengan swasta dan masyarakat. Pemerintah daerah mengagendakan dalam APBD berupa program dan proyek pembangunan.

C. Rehabilitasi Kanal Sungai Batang Lunto,

Memperbaiki bendung yang ada di sepanjang kanal Sungai Batang Lunto yang membelah Kota Lama Sawahlunto, menghilangkan laguna-laguna berupa endapan pasir yang membuat kanal jadi dangkal. Membuat taman-taman di sepanjang tepian kanal dengan menanam berbagai tanaman hias dan pelindung. Membuat peraturan-peraturan yang melarang pendirian bangunan di sepanjang kanal, dilarang membuang sampah dan kotoran.

D. Pembangunan ruang pameran pertambangan batubara,

Lobi dan ruang depan kantor PT BA UPO direnovasi untuk digunakan sebagai ruang pameran permanen dan sekaligus museum yang berisikan tentang sejarah dan kegiatan aktivitas pertambangan Sawahlunto, sebagai pengantar sebelum melihat objek-objek lain. Ruang ini berisikan gambaran tentang :

- Keberadaan batubara pada umumnya, mulai dari pembentukan, sifat-sifat, penggunaan dan mengapa batubara ada di Sawahlunto,

- Proses penambangan, mulai dari peyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi sampai penggunaan,
- Riwayat perkembangan aktivitas pertambangan Sawahlunto sampai dengan pengangkutan dan pembangunan kereta api,
- Sejarah kemanusiaan yang pernah terjadi berupa penderitaan buruh paksa dan kecelakaan besar yang pernah terjadi di sini,
- Penjelasan tentang Sawahlunto dan kehidupan administratur pertambangan.

E. Renovasi Wisma Ombilin,

Wisma yang merupakan penginapan bagi tamu-tamu penting ini harus dikembalikan kepada gaya arsitektur *indische*, sehingga tetap memiliki kekhasan kunonya, melalui kegiatan renovasi sehingga tetap menarik untuk ditempati.

F. Memperluas akses ke objek wisata,

Membangun jalan dan membuka akses ke objek-objek wisata, seperti lubang-lubang bekas tambang dan ke berbagai instalasi tambang yang dijadikan objek wisata, seperti di Desa Durian I dan II, Kelurahan Saringan dan Kelurahan Lubang Panjang. Pembukaan jalan ini harus diikuti dengan ketersediaan sarana angkutannya, seperti kereta api wisata.

G. Pengembangan objek wisata,

Ini dilakukan dengan merancang lubang tambang, instalasi pemrosesan dan pengangkutan batubara, sehingga punya nilai estetis tersendiri. Menentukan bagian mana yang pantas diperlihatkan dan mana yang berbahaya.

H. Renovasi dan pemanfaatan stasiun kereta api

Ini dilakukan guna melihat kemungkinan pemanfaatannya sebagai kereta api wisata, dengan membangun rel melewati objek-objek wisata yang ada.

I. Pengembangan dan pemanfaatan lahan bekas tambang

Ini dilakukan untuk pemanfaatannya sebagai resort dan danau buatan, terutama yang berada di kawasan pertambangan Sawah Rasau, serta menjaga lingkungan sekitarnya, agar sistem tata airnya tetap terpelihara.

J. Memberikan kemudahan usaha dan bantuan modal bagi sektor industri dan jasa yang mendukung pariwisata

Yaitu dengan suntikan modal usaha dengan bunga rendah, kemudahan akses ke lembaga keuangan, mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang home industry yang bernilai ekonomis tidak saja sebagai usaha sampingan tapi merupakan usaha utama penopang ekonomi keluarga.

K. Menggalang sumber pendanaan melalui kerja sama dengan investor untuk menanamkan modal dalam pengembangan pariwisata tambang.

Ini dengan bantuan para perantau dan pengusaha, terutama yang ada di luar daerah. Di samping modal swadaya dari masyarakat dan anggaran pembangunan Kota Sawahlunto sendiri. Pemerintah daerah giat melakukan pertemuan-pertemuan dengan agenda pembangunan daerah dengan para perantau dan investor, sehingga mereka mau menanamkan modalnya di Kota Sawahlunto, khususnya pengembangan sektor wisata. Pemerintah kota sendiri harus menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, melalui kemudahan pajak, pungutan dan birokrasi serta peraturan-peraturan yang mendukung.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan objek-objek wisata potensial yang ada adalah sebagai berikut :

a) Pertambangan Sungai Durian dan Ex Sekolah Pertambangan

Daerah ini merupakan daerah tambang pertama dan di belakangnya terdapat gua bekas penambangan yang memiliki kedalaman mencapai 150 m di bawah permukaan tanah. Goa bekas penambangan ini harus direnovasi dengan menata kawasan sekitarnya, membangun tempat-tempat santai dan memadukannya dengan alam sekitar yang indah.

b) Pertambangan Plat Tengah

Terletak di sepanjang jalan utama Sawahlunto-Talawi dengan *conveyor* yang melintasi jalan raya tersebut. Di sinilah terdapat lobang Sawah Rasau yang merupakan daerah tambang kedua setelah Sungai Durian. Banyak benda-benda bersejarah peninggalan Belanda terdapat di sini. Tempat ini dikembangkan dengan memugar kompleks dan bangunan-bangunan pengolahan tambang, *conveyor* dihidupkan kembali seperti jalur kereta gantung atau kereta api mini.

c) Stasiun Kereta Api

Di sini terdapat benda-benda tua, seperti lokomotif tua dan alat pemutar rel kereta api. Penanganannya dilakukan dengan merenovasi dan mengaktifkan kembali jalur kereta api ini menjadi kereta api wisata, sementara peralatan-peralatan kuno disimpan di museum yang dibangun di kantor pusat PT BA UPO saat ini.

d) Bangunan Masjid Agung

Dulunya bangunan Masjid Agung ini merupakan gudang mesiu Belanda. Sampai sekarang masih dipertahankan keasliannya.

e) Bangunan Gereja

Bangunan dengan gaya arsitektur kolonial (*art deco*) ini punya keunikan tersendiri dan masih dipertahankan sampai sekarang.

f) Batu Sandaran

Berupa jajaran batuan yang unik dan konon dipakai untuk sandaran para sesepuh adat yang melakukan musyawarah waktu itu. Pengembangannya dilakukan dengan membangun tempat-tempat peristirahatan di sekitar objek ini yang juga memiliki pemandangan alam yang indah.

g) Rumah Gadang Talawi

Merupakan rumah gadang tradisional yang keseluruhannya terbuat dari kayu dan masih terpelihara dengan baik sampai sekarang. Rumah ini harus dijadikan simbol Kecamatan Talawi, lingkungan sekitar bangunan harus ditata dengan menanam dengan pohon-pohon pelindung agar kelihatan asri.

h) Makam dan Perpustakaan Mr. Muhammad Yamin

Makam ini harus dipugar dan dipelihara, sementara perpustakaan harus diperkaya dengan buku-buku baru dan dijadikan sebagai perpustakaan daerah.

Operasionalisasi arahan pengembangan ekonomi dan keruangan Kota Sawahlunto pascatambang dilakukan dalam empat tahap, tahap pertama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak, tahap berikutnya merupakan tahap lanjutan dan kurang mendesak. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara gradual dan terarah serta dapat diterima masyarakat. Diharapkan akhirnya pendapatan daerah dan masyarakat dari pariwisata sektor pariwisata khususnya dapat menjamin keberlanjutan pembangunan kota, sehingga ketergantungan terhadap sumber daya yang bersifat ekstraktif dapat dialihkan.

Secara umum operasionalisasi arahan pengembangan ekonomi dan keruangan Kota Sawahlunto pascatambang dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL IV.34
RANCANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA SAWAHLUNTO PASCATAMBANG

No	Sektor	Program	Kegiatan	Lokasi
1	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi kawasan dan objek wisata ▪ Pembangunan fisik berupa pengembangan objek wisata 	<p style="text-align: center;">4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Survei dan pendataan kawasan dan objek wisata potensial, Inventarisasi dan pengkajian ▪ Menetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi ▪ Rehabilitasi dan pengembangan objek wisata berupa bangunan bersejarah, stasiun kereta api, lokomotif tua, lobang tambang, danau bekas tambang, instalasi pencucian dan pemecahan (<i>sizing</i>) batubara, <i>conveyor</i>, permukiman pekerja tambang ▪ Rehabilitasi kanal kota (Batang Lunto) ▪ Peningkatan pelayanan air bersih ▪ Pengembangan sistem sanitasi kota ▪ Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah ▪ Renovasi jalan, ruang publik dan drainase dari halaman kantor UPO sampai terminal ▪ Pengembangan akomodasi wisata ▪ Pembangunan akses ke objek wisata ▪ Renovasi gedung koperasi karyawan UPO dan gedung societiet (Bank Mandiri) ▪ Renovasi ruko pasar remaja ▪ Renovasi kios di tepian kanal (Batang Lunto) ▪ Pengembangan stasiun kereta api ▪ Peningkatan kualitas perumahan di pinggir rel kereta api ▪ Renovasi pasar Sawahlunto ▪ Pembangunan pusat informasi, auditorium dan ruang pameran kota wisata tambang ▪ Renovasi wisma ombilin ▪ Pembentukan badan koordinasi pengembangan pariwisata sawahlunto (Bakopars) ▪ Penyusunan peraturan penataan ruang dan peraturan bangunan kota. ▪ Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan kota ▪ Pengembangan organisasi pelaksana kegiatan wisata ▪ Inventarisasi dan penegasan hak atas berbagai properti kota ▪ Pembentukan forum antar daerah untuk pengembangan kepariwisataan 	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Kota Sawahlunto</p> <p>BWK I, II, III dan IV</p> <p>Kel. Pasar Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto Kel. Saringan, Pasar Kel. Pasar, Desa Muaro Kalaban, Silungkang Tigo, Talawi Hillir, Kolok Nan Tuo</p> <p>Kel. Pasar</p> <p>Kota Sawahlunto</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan makam Prof. M. Yamin, SH ▪ Peningkatan dan pengembangan wisata alam (panjat tebing, terbang layang dan air terjun) ▪ Konservasi goa alam (Goa Slamet) dan goa janjian ▪ Rehabilitasi kolom renang (Air Dingin dan Sijantang) ▪ Pengembangan objek wisata panorama (kelok 16, Kayu Gadang, Puncak microwave, Balai Batu Sandaran, Gulang-Gulang, Puncak Polan) ▪ Pengembangan sentra kerajinan tenunan Silungkang sebagai objek wisata ▪ Pembinaan kesenian tradisional (talempong bambu, lukah gilo, dll) ▪ Pembangunan pasar wisata Silungkang ▪ Penyelesaian pembangunan rest area muaro kalaban sebagai terminal outlet informasi wisata pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pariwisata non-tambang dan fasilitas penunjang ▪ Pemasaran wisata 	<p>Desa Talawi Mudiak Kel. Kb Sirakuk, Desa Kubang, Rantih Desa Rantih, Data Mansiang Desa Mr Kalaban, Sijantang Mr Kalaban, Kayu Gadang, Kb Sirakuk, Lunto, Kubang, Lumindai, B Batu Sandaran Kec Silungkang Taratak Bancah, Lunto, Sarangan Silungkang Tigo Muaro Kalaban</p> <p>Kota Sawahlunto</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan lahan basah ▪ Peningkatan produksi Lahan kering (Tanaman pangan, hortikultura, tanaman keras) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Penataan pola usaha tani - Optimalisasi pemanfaatan lahan ▪ Rehabilitasi dan mempertahankan lahan pertanian basah yang ada ▪ Menjaga ketersediaan debit air Sungai Batang Ombilin ▪ Optimalisasi saluran irigasi yang ada ▪ Pembinaan pola usaha tani ▪ Pola tumpang sari dengan tanaman padi sawah ▪ Pengembangan komoditi lokal spesifik (sawo, rambutan, durian, mangga) ▪ Pembinaan industri pengolahan hasil pertanian yang mendukung sektor pariwisata ▪ Intensifikasi tanaman sayuran dengan sistem rotasi 	<p>BWK I, II dan IV</p> <p>BWK II dan III</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produksi Perikanan darat ▪ Peningkatan produksi Peternakan ▪ Penataan lahan bekas tambang ▪ Penataan kawasan pertambangan dan galian potensial lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kolam ikan darat ▪ Pengembangan keramba di sungai-sungai ▪ Memberi kesempatan modal usaha dan peluang ke lembaga keuangan ▪ Pengembangan daerah basis peternakan ▪ Optimalisasi dana bergulir untuk peternakan ▪ Penghijauan kembali lahan bekas tambang ▪ Pemanfaatan untuk objek wisata ▪ Mencari alternatif sumber mineral lain ▪ Penelitian kelayakan eksploitasi ▪ Optimalisasi objek bahan galian yang ada 	Desa Lunto, Kumbayau, Kolok, Talawi Mudiak dan Hilir, Lumindai Kolok, Kumbayau, Kubang, Lumindai
3	Pertambangan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan lahan bekas tambang ▪ Penataan kawasan pertambangan dan galian potensial lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rantih, Sijantang, Tanjung ▪ Rantih, Salak, Batu ▪ Sijantang, Tanjung, Kolok, Silungkang
4	Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan industri pertanian ▪ Pengembangan industri kecil dan kerajinan ▪ Pengembangan industri tenun Silungkang sebagai kekhlasan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun industri pengolahan hasil pertanian, terutama komoditi spesifik daerah ▪ Mendorong pengembangan hasil industri pertanian yang menunjang pariwisata ▪ Membantu jalur pemasaran produk ▪ Bantuan permodalan dan pelatihan ▪ Mencari bapak angkat, terutama dengan perusahaan yang sudah maju ▪ Bantuan permodalan, pemasaran dan kerja sama dengan jalur pemasaran di luar daerah dan luar negeri yang sudah ada selama ini ▪ Membentuk kawasan industri 	Talawi Hilir, Kolok, Lunto, Kubang, Lumindai BWP III (Kec. Silungkang), Lunto, Lumindai, Kubang, Talawi BWP III (Kec. Silungkang)
5	Prasarana dan sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun jalan dan jembatan ke objek wisata yang ada ▪ Menyediakan sarana angkutan ke tempat tersebut ▪ Membangun hotel, penginapan dan restoran yang memiliki standar nasional dan internasional ▪ Pengaktifan kembali jalur kereta api 	Kel. Pasar, Saringan, Durian, Desa Salak, Rantih, Santur, Muaro Kalaban

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana sosial ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan pasar regional/lokal ▪ Peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dan keterampilan ▪ Peningkatan pelayanan fasilitas produksi pada daerah-daerah hinterland ▪ Pembangunan fasilitas perekonomian <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan industri - Kawasan pusat bisnis 	<p>Kel. Pasar, Durian I, Desa Santur, Muaro Kalaban, Silungkang Tigo, Talawi Hilir</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana dasar dan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan sistem drainase <ul style="list-style-type: none"> - Studi tentang catchment area - Penataan sistem drainase perkotaan (saluran primer, sekunder, tersier) ▪ Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ke sentra-sentra produksi ▪ Peningkatan pelayanan air bersih dan sumber-sumber air baku 	<p>Kel. Pasar, Saringan, Air Dingin, Desa Kolok, Talawi Hilir&Mudiak, Kubang, Lunto,</p>

Sumber : Hasil Analisis, 2003

B A B V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap arahan pengembangan Kota Sawahlunto pascatambang yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Model regenerasi dan pengembangan kota-kota bekas tambang bukanlah mengacu pada pengembangan daerah secara keseluruhan, tapi lebih pada pengembangan kawasan tertentu yang punya prospek untuk berkembang. Kawasan yang punya prospek di Kota Tambang Sawahlunto adalah kawasan kota lama dan kawasan Salak. Di kawasan kota lama terdapat situs-situs pertambangan, berupa lobang tambang, peralatan-peralatan kuno bekas penambangan dan bangunan-bangunan bersejarah yang harus dilestarikan pada sebuah museum dan didukung oleh atraksi-atraksi wisata baik atraksi budaya dan permainan yang modern. Sedangkan di kawasan Salak terdapat danau bekas tambang yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan resort. Selain itu Kota Sawahlunto cukup kaya dengan industri kerajinan tradisional khususnya kerajinan tenun di Kecamatan Silungkang, yang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang wisata tambang, namun inti dari keberhasilan kota-kota wisata bekas tambang tersebut adalah investasi yang besar. Demikian pula tentunya tuntutan untuk Kota Sawahlunto.
- (2) Sektor-sektor ekonomi alternatif yang dapat menggantikan peran yang sangat signifikan dari sub-sektor pertambangan batubara adalah sektor industri pengolahan khususnya sub-sektor industri tanpa migas dan sektor jasa-jasa, yaitu sub-sektor jasa pemerintahan, perorangan dan rumah tangga, karena sektor dan

sub-sektor inilah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di Kota Sawahlunto berdasarkan Analisis Location Quotient dan Shift-Share yang dilakukan. Konsekuensinya adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto harus memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor tersebut, sebab pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan wilayah.

- (3) Arah perkembangan keruangan Kota Sawahlunto selama kurun waktu analisis didominasi oleh sektor pertanian, khususnya sub-sektor perkebunan. Sementara sektor alternatif sebagai hasil analisis ekonomi berupa sektor industri pengolahan dan jasa-jasa tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, ini menandakan bahwa efektifitas sektor ini terhadap penggunaan ruang cukup tinggi. Perkembangan ruang yang paling dominan terjadi di Kecamatan Talawi dan Barangin.
- (4) Berdasarkan analisis hirarki dan wilayah pengaruh, maka Kota Sawahlunto yang terdiri dari 37 buah desa dan kelurahan terbagi atas tiga hirarki yang akan menggambarkan wilayah pusat dan wilayah belakang (hinterlandnya). Wilayah hirarki pertama terdiri dari Desa Talawi Hilir, Muaro Kalaban, Silungkang Tigo, Santur dan Kelurahan Pasar, sedangkan hirarki kedua terdiri dari Desa Talawi Mudiak, Kelurahan Durian I dan Durian II. Dari hirarki wilayah ini didapatkan wilayah perencanaannya yang terdiri atas empat Bagian Wilayah Pengembangan (BWP), sesuai wilayah pengaruh dari masing-masing pusat tersebut. BWP I berpusat di Kelurahan Pasar, BWP II berpusat di Desa Talawi Hilir, BWP III berpusat di Desa Silungkang Tigo dan BWP IV berpusat di Desa Santur. Ini berbeda dari rencana pengembangan yang telah ditetapkan Pemda Kota Sawahlunto dalam RTRW-nya.

(5) Berdasarkan hasil analisis ekonomi dan keruangan serta dengan memperhatikan dinamika dan perkembangan yang ada di Kota Sawahlunto sendiri dengan analisis AHP, maka arahan pengembangan kotanya pascatambang didasarkan pada sektor pariwisata berbasis wisata tambang dengan menciptakan keterkaitan pada sektor-sektor lain yang memiliki keunggulan, yaitu sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Sesuai dengan unit analisis Bagian Wilayah Pengembangan (BWP) yang didapatkan, maka BWP I dijadikan sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata tambang, BWP II sebagai pusat pengembangan sektor pertanian yang mendukung pariwisata, BWP III sebagai pusat pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, BWP IV sebagai pusat permukiman dan perkantoran.

5.2 Rekomendasi

Dari temuan studi yang didapatkan, maka perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pemerintah Daerah :

- (1) Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam mengembangkan wisata tambang harus dilakukan pada kawasan-kawasan potensial untuk berkembang, yaitu kawasan kota lama dan kawasan Salak, untuk itu dari awal harus dilakukan sosialisasi pada masyarakat terutama masyarakat kawasan pengembangan tentang prospek dan program penanganan kawasan serta langkah-langkah yang harus diambil terhadap bangunan dan benda-benda bersejarah yang ada. Pembangunan museum merupakan langkah awal melestarikan benda-benda tersebut agar terpelihara dan ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk :

- Penyebarluasan dokumen rencana pengembangan beserta peta-petanya,
 - Publikasi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, papan informasi, buku rencana yang dicetak khusus untuk konsumsi masyarakat,
 - Pertemuan-pertemuan, seperti rapat-rapat khusus, lokakarya dan simposium.
- (2) Investasi yang besar merupakan syarat mutlak tercapainya tujuan pengembangan wisata tambang, sehingga pemerintah daerah harus mampu mendatangkan investor yang mau menanamkan modal serta kerja sama dengan pihak swasta. Namun terlebih dahulu harus dilakukan pembenahan dalam daerah berkaitan dengan kemudahan, insentif dan situasi yang menguntungkan untuk menanamkan modal.
- (3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan dan pengembangan wisata khususnya wisata pertambangan kepada aparatur instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto serta masyarakat,
- (4) Memberikan prioritas yang lebih besar terhadap usulan proyek yang berkaitan langsung dan menunjang tercapainya pengembangan wisata tambang,

B. Studi Lanjutan :

- (1) Keterbatasan waktu, data dan tenaga serta alat analisis yang sangat sederhana menjadikan studi ini belum begitu mendalam, sehingga diperlukan studi lanjutan berupa studi langsung ke lapangan, yang bisa memberikan hasil yang lebih mendalam tentang potensi ekonomi yang betul-betul memiliki keunggulan dan menjamin keberlanjutan Kota Sawahlunto,

- (2) Perlu dilakukan studi yang mendalam terhadap fenomena berhentinya aktivitas pertambangan batubara di Kota Sawahlunto ini. Terutama berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya, seperti kemungkinan eksodus pekerja tambang dan keluarganya yang akan berakibat menyusutnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto itu sendiri, penanganan asset-asset bekas pertambangan dan sisa-sisa galian yang telah menyebabkan degradasi lingkungan. Adanya beberapa kawasan bekas tambang yang tidak bisa dimasuki masyarakat karena terdapat gas beracun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alkadri et al, *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*, Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, 1999.
- Anwar, Affendi, *Pengembangan Agropolitan ; Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 1999.
- Ardani, A, *Kriteria Penentuan Sektor-Sektor Strategis*, P4N UGM, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta ,Jakarta, 1998.
- Berry, Jim Ed. *Urban Regeneration, Property, Investment and Development*, University of Ulster Jordanstown, 1993.
- Bingham, Richard D and Robert Mier Ed. *Theories of Local Economic Development, Perspective From Across the Disciplines*, SAGE Publications New Bury Park, 1993.
- Bintarto, R dan Surastopo Hadisumarno, *Metode Analisa Geografi*, LP3ES Yogyakarta 1978.
- Blair, John P, *Local Economic Development Analysis and Practice*, Sage Publication Inc. California 1995.
- Blakely, E.J, *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, Sage Publication, 1989.
- Branch, Melville C, *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*, edisi terjemahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Budiharsono, Sugeng, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Catanese, Anthony J dan James C. Snyder, *Perencanaan Kota*, Edisi Terjemahan, Erlangga, 1996.
- Daldjoeni, N, *Geografi Kota dan Desa*, Alumni Bandung, 1998.
- _____, *Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung, 1997.
- Glasson, John, *Pengantar Perencanaan Regional*, Edisi Terjemahan Paul Sihotang, LPFE UI, Jakarta, 1977.

- Gallion B, Arthur and Simon Eisner, *Pengantar Perancangan Kota, Desain dan Perencanaan Kota*, Jilid 1, Erlangga Jakarta, 1994.
- _____, *Pengantar Perancangan Kota, Desain dan Perencanaan Kota*, Jilid 2, Erlangga Jakarta, 1996.
- Jayadinata, Johara T, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung, 1999.
- Kadariah, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE UI Jakarta, 1985.
- Moelong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Myrdal, Gunnar, *Economic Theory In Underdeveloped Regions*, Duckworth London, 1957.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988.
- Oppenheim, Norbert, *Applied Models in Urban and Regional Analysis*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Parr, John B, *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*, Carfax Publishing 1999.
- Perlof, HS, ES Dunn, EE Lampard and RF Muth, *Regions, Resources and Economic Growth*, Resources of The Future Inc. John Hopkins Press, Baltimore 1960.
- Richardson, Harry W, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, (edisi terjemahan: Paul Sihotang), LPFE UI, Jakarta, 2001.
- Rondinelli, D, *Applied Methods of Regional Analysis*, Westview Press Colorado 1985.
- Saaty, Thomas L, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*, PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES Jakarta 1995.
- Soerjani, Moh, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, *Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press Jakarta, 1987.
- Suwantoro, Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Yogyakarta, 1997.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung Jakarta, 1996.
- Warpani, Suwardjoko, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB Bandung, 1984.

Wirawan, IB, Sukidin dan Basrowi, *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Jember University Press, 2001.

Yakin, Addinul, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*, Akademika Presindo Jakarta, 1997.

Yunus, Hadi Sabari, *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2001.

B. BULETIN/TERBITAN BERKALA/STUDI TERBATAS

Akil, Syarifuddin, *Konsep Pengembangan Wilayah di Indonesia*, Dirjen Penataan Ruang Departemen Kimpraswil, 2002.

Anonim, *Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*, Geo-FMIPA UI, 1989.

_____, *Sawahlunto Kota Kecil yang Mandi Uang*, Mimbar Minang, 23 Mei 2002.

_____, *Sawahlunto 2020 ; Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*, Pemerintah Kota Sawahlunto, 2001.

Antono, Hari Tetra, Sahrudin Sahmiran, Bambang Yuniarto, *Studi Transformasi Struktural Pasca Pertambangan Perusahaan Umum Batubara Ombilin Propinsi Sumatera Barat*, Dirjen Pertambangan Umum Jakarta, 1993.

Hanafiah, HT, *Tata Laksana dan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan*, Sarasehan Pemantapan Rencana Peraturan Pemerintah Kawasan Perdesaan, Cisarua Bogor, 1996.

Hendarto, R. Mulyo, *Analisis Potensi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah Diklat Prop. Jawa Tengah, 2001.

Kuswartojo, Tjuk, *Sawahlunto 2020 : Agenda Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*, Pemda Kota Sawahlunto, 2001.

Ma'rif, Samsul, *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*, Diktat Kuliah PWK UNDIP Semarang, 2002.

North, DC, *Location Theory and Regional Economic Growth*, Journal of Political Economy, 1955.

Octavia, Deasy, *Identifikasi Bentuk dan Struktur Kota-Kota Kecil serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kab. Dati II Malang*, Plannit Journal, Th I/No.2 Juli-Agustus 2001.

Santoso, Jo, *Konsep Pengembangan dan Penataan Ruang Wilayah Kota Bercirikan Lokal*, Buletin Tata Ruang Vol. 1 No. 5 Tahun 2000

Sjafrizal, *Teori Ekonomi Regional : Konsep dan Perkembangannya*, ISEI Sekretariat FE UA Padang, 1983.

Taufan, Muhammad, *Penerapan Model Analisis Proses Hirarki (AHP) dalam Penentuan Prioritas Usulan Rencana Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar dalam Rapat Koordinasi Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Jawa Barat*, Tesis pada Prog. Magister PWK ITB, Bandung, 1996.

Widyarningsih, Nikken Setyowati, *Relevansi Preferensi Penduduk terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota*, Plannit Journal, Th I/No.2 Juli-Agustus 2001.

Zulkarnain, Hanan, *Kajian Perkembangan Fisik Kota Pertambangan, Kasus Kota Tanjung Enim Sumatera Selatan*, Thesis pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1999.

C. BUKU DATA/LAPORAN/PERATURAN

Laporan NKLD Kota Sawahlunto, Bappeda Kota Sawahlunto, 1999.

Laporan PDRB Kota Sawahlunto, Bappeda Kota Sawahlunto, 2000.

Laporan PDRB Kota Sawahlunto, Bappeda Kota Sawahlunto 2001

Laporan Pengawasan Pertambangan PT BA-UPO Kotamadya Sawahlunto, Kanwil Deptamben Propinsi Sumatera Barat, 1999.

Laporan Potensi Desa, Bappeda Kota Sawahlunto, 2001

Laporan Studi Peningkatan Ekonomi Rakyat di Kotamadya Sawahlunto, Bappeda Tingkat II Kotamadya Sawahlunto dengan Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, 1999.

Perhitungan Input-Output Kota Sawahlunto Tahun 2000, Kerja Sama Bappeda dan BPS Kota Sawahlunto, 2001

Perhitungan Koefisien ICOR dalam Pembangunan Kota Sawahlunto, Bappeda Kota Sawahlunto, 2000.

RTRW Kota Sawahlunto Tahun 1995/2000, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, 1995.

Sawahlunto dalam Angka Tahun 2000, Kerja Sama Bappeda dan BPS Kota Sawahlunto, 2001

Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2001, BPS Propinsi Sumatera Barat, 2002